



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2025-2029





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Imam Bonjol Nomor 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3546469, 3546607
Faksimile 024-3551289 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dkp@jatengprov.go.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : Endi Faiz Effendi, SPi, MA
NIP : 19710909 199603 1 006
Jabatan : Kepala Dinas
Berdasar SK Gubernur Nomor : 800.1.3.3/2902025
Tanggal : 7 Mei 2025

bertugas untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No.134, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50131.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan serta program kerja berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, September 2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Tengah



Endi Faiz Effendi, S.Pi, MA.
NIP. 197109091996031006

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum..... I-3

1.3 Maksud Tujuan I-6

1.4 Sistematika Penulisan I-6

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu

Strategis Perangkat Daerah II-1

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... II-1

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah II-22

2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah II-39

2.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah..... II-69

2.5 Isu Strategis Perangkat Daerah II-76

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan III-1

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... III-1

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah..... III-4

3.3. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah III-16

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... IV-1

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah IV-1

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah IV-4

BAB V Penutup..... V-1

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Jawa Tengah merupakan salah satu dari 6 (enam) provinsi yang ada di Pulau Jawa dan terletak di bagian tengah dengan Semarang sebagai ibukotanya. Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat pada bagian barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada bagian selatan, Jawa Timur pada bagian timur laut serta Laut Jawa pada bagian utara. Secara geografis, provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota, seperti Kabupaten Kendal, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan lain sebagainya. Dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 17 diantaranya merupakan kabupaten/kota pesisir dengan 340 desa (BPS, 2024). Selain itu, Jawa Tengah juga memiliki Perairan Umum Daratan berupa Sungai dengan jumlah 50 buah dan panjang 1.500 kilometer serta kawasan danau, waduk buatan, rawa atau lahan basah lainnya seluas 11.200 Ha (Balai Pusdatin SDA, 2017)

Secara geografis wilayah pesisir dan laut Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu wilayah pantai utara (Pantura) termasuk Kepulauan Karimunjawa dan wilayah pantai selatan (Pansela). Garis pantai Provinsi Jawa Tengah yang digunakan adalah garis pantai berdasarkan Peraturan Kepala BIG Nomor 26.4 Tahun 2021 dan Laporan Pemeriksaan Hasil Supervisi Peta Dasar Unsur Garis Pantai Untuk RTRW Jawa Tengah oleh Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai Badan Informasi Geospasial pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan panjang 1.127,85 km, yang mencakup garis pantai Wilayah Pantura 651,47 km, wilayah Kepulauan Karimunjawa 132,88 km dan wilayah Pansela adalah 343,50 km. Untuk wilayah perairan Kabupaten Kendal, Kota Semarang dan Kabupaten Demak perencanaan ruang laut menggunakan garis pantai rencana sebagaimana termuat dalam peta rencana pola ruang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi. Luas wilayah laut Jawa Tengah hingga 12 mil laut ke arah laut adalah 1.732.269,32 Ha dengan luas laut wilayah Pantura 916.426,40 Ha, luas wilayah laut Karimunjawa adalah 468.576,94 Ha dan luas wilayah Pansela adalah 347.265,98 Ha (Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir (RZWP3K) Tahun 2022).

Potensi kelautan dan perikanan Jawa Tengah meliputi luas mangrove existing sebesar 15.089 Hektar dengan potensi sebesar 44.784 Hektar (Peta Mangrove Nasional, 2021). Potensi perikanan tangkap pada Laut Jawa (WPP 712) yang mencakup 8 provinsi adalah 1.034.485 ton/tahun, sedangkan Samudra Hindia (WPP 573) yang mencakup 8 Provinsi adalah 1.338.442 ton/tahun dengan jumlah kapal Jawa Tengah tahun 2023 adalah 65.512 unit, jumlah nelayan 279.824 orang, Produksi perikanan tangkap tahun 2023 396.076 ton, Produksi perikanan budidaya di tahun 2023 sebesar 543.934 ton (KKP, 2024). Potensi

tambak garam di Jawa Tengah tersebar di 5 (lima) Kabupaten wilayah pantai utara Jawa Tengah yaitu Jepara, Pati, Rembang, Demak dan Brebes, usaha pengembangan garam dilaksanakan di wilayah pantai selatan antara lain Kebumen, Cilacap dan Purworejo dengan dengan produksi tahun 2024 sejumlah 543.934 ton (KKP, 2024). Sedangkan jumlah unit usaha pengolahan produk kelautan dan perikanan (UPI dan UPPN) yang terdaftar 10.379 unit, jumlah unit usaha pemasaran produk kelautan dan perikanan yang terdaftar 16.925 unit (KKP, 2024).

Pengelolaan potensi dan pemanfaatan peluang tersebut memerlukan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang matang, melalui implementasi ekonomi biru untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan dan ketahanan pangan nasional. Ekonomi biru mengacu pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan, termasuk di dalamnya kegiatan seperti perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, energi terbarukan, dan industri yang terkait dengan kelautan.

Namun demikian, peran ekonomi biru dalam memperkuat ketahanan ekonomi tidak terlepas dari tantangan dan risiko yang perlu diatasi, maka dari itu diperlukan perencanaan pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang mampu mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional sebagai upaya antisipasi terhadap hambatan serta tantangan dalam pengelolaan. Secara teknis, perencanaan pengelolaan yang baik harus mampu mengantisipasi karakter sumberdaya perikanan laut yang pada hakekatnya tidak dapat dibatasi berdasarkan wilayah administrasi dan bersifat terbuka dalam pemanfaatannya. Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan ke depan akan dikembangkan melalui berbagai industri kelautan dan perikanan yang berorientasi pasar dan berbasis pada kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, pembangunan kelautan dan perikanan di Jawa Tengah diarahkan mengukuhkan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, mengatasi penurunan produksi perikanan tangkap, peningkatan produksi perikanan budidaya, peningkatan daya dukung pesisir, peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat, peningkatan angka konsumsi ikan, serta optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Dalam implemntasi ekonomi biru sektor kelautan dan perikanan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi, memberikan sumber daya pangan dan protein yang vital bagi populasi, serta menawarkan peluang ekonomi yang berkelanjutan untuk masyarakat pesisir dan pulau-pulau di seluruh dunia. Untuk itu diperlukan suatu model perencanaan yang mengintegrasikan berbagai perencanaan nasional dan regional dalam bentuk Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2025-2029.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kepala daerah wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD), dan menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dengan telah dilantikannya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk periode tahun 2025-2030,

maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mulai menyusun dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 untuk menjabarkan visi, misi, dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Selanjutnya, seluruh perangkat daerah juga secara paralel menyusun dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada dokumen RPJMD.

Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka menengah yang disusun berpedoman pada RPJMD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mencakup penyusunan pohon kinerja, cascading, manajemen resiko, analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja, serta perumusan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Hal lain yang termaktub dalam Rencana Strategis ini adalah perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (Lima) tahun, yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Renstra digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memperhatikan keselarasan terhadap kebijakan nasional (RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029, dinamika perubahan peraturan perundang-undangan (PP 12 Tahun 2019, Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021), angka kemiskinan, serta mendasarkan hasil evaluasi kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201950 halaman 86 sampai dengan 92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
9. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90).
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang;
16. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 2025 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 adalah tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, yang mengatur Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 46);
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah;

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Inmendagri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025 – 2029;
33. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 000.7.2.2/0002764 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah dalam rangka penyesuaian dan penyelarasan dengan kebijakan nasional, dinamika perubahan peraturan perundangan-undangan, penyesuaian kebijakan pembangunan daerah serta dinamika pembangunan baru lainnya di Jawa Tengah.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah :

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan kelautan dan perikanan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung tujuan Jawa Tengah;
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan kelautan dan perikanan kurun waktu tahun 2025-2025 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 ini sesuai dengan surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.7/0001565 tanggal 26 Februari 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029. Adapun sistematika Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja PD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis PD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 2018-2023 dan RPD Tahun 2024-2026, dan mengulas hambatan hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib pelayanan dasar, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD, dan/atau

indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Subbab ini berisi tentang permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan dalam dokumen ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat daerah.

2.5. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis merupakan permasalahan Perangkat Daerah, potensi atau tantangan yang akan dihadapi oleh perangkat daerah ke depan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan memperhatikan Lingkungan Dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang mempengaruhi perangkat daerah langsung maupun tidak langsung

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran didapatkan dari kertas kerja Cascading Perangkat Daerah yang telah disusun sebelumnya.

a. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap Perangkat Daerah dalam satu periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap Perangkat Daerah. Tujuan Perangkat Daerah harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap OPD.

Perumusan tujuan dapat dilakukan dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan merupakan kalimat aktif, dimulai dengan kata kerja yang menjelaskan arah keinginan/preferensi dan satu kata benda yang menjelaskan obyek yang menjadi fokus perhatian. Contoh:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
2. Menurunkan tingkat kemiskinan.

Dalam menentukan tujuan harus disertai dengan indikator kinerja yang terukur dan target selama lima tahun kedepan. Pernyataan tujuan dijabarkan dalam 1 (satu) atau lebih sasaran Perangkat Daerah.

b. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan tiap Perangkat Daerah. Pernyataan sasaran bukan merupakan kalimat aktivitas,

dan disusun dengan diawali dengan kata seperti meningkatnya atau menurunnya.

Hal penting yang perlu diperhatikan bahwa sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan merupakan sasaran pada level OPD (eselon II), yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau outcome untuk jangka menengah.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran perangkat daerah akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Rumusan strategi yang disusun harus bersifat operasional, yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan perangkat daerah yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah.

Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

3.3. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Subbab ini memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan diuraikan dan dijelaskan secara naratif.

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Bab ini memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU

perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja kunci (IKK) yang merupakan indikator penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang telah ditetapkan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB

II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, sesuai Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2025 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok yang dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - 1. Perumusan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas;
 - 2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas;
 - 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas;
 - 4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
 - 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ditopang oleh struktur/susunan organisasi adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, sebagaimana tersebut di atas.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- (1) penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- (2) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- (3) penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- (4) penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- (5) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- (6) penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- (7) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- (8) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan :

1. Subbagian Program.

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Program, menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbag Program, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Program, menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di Bidang Program, menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas, menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas, menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di Bidang Program, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Program; dan, melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Keuangan.

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbag Keuangan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan, menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Keuangan, menyiapkan bahan pengelolaan keuangan, menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan, menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi, menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di Bidang Keuangan, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan, melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian, menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbag Umum dan Kepegawaian, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian, menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian, menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas, menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas, menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas, menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas, menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas, menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian; dan, melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap, kepelabuhanan dan kenelayanan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan dan kenelayanan; dan
- 3) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Kelompok Kerja : Kelompok Kerja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap dan Kelompok Kerja Kepelabuhanan dan Kenelayanan.

D. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan terkait peningkatan produksi garam, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, usulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Pelaksanaan kebijakan terkait peningkatan produksi garam, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, usulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait peningkatan produksi garam, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, usulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Monitoring dan evaluasi terkait peningkatan produksi garam, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, usulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Pelaporan dan rekomendasi peningkatan produksi garam, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, usulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Kelompok Kerja : Kelompok Kerja Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

E. Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan

Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan penangkapan ikan di perairan umum daratan, pembudidayaan ikan air payau dan perairan umum daratan, pergaraman, pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, pencegahan pencemaran perairan daratan, peredaran jenis ikan membahayakan dan merugikan, penumbuhkembangan masyarakat pengawas, pengembangan sistem pengendalian pengelolaan sumberdaya perikanan, kerjasama penegakan hukum, tindak lanjut hasil pengawasan, penanganan pelanggaran dan pengenaan sanksi di bidang perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan penangkapan ikan di perairan umum daratan, pembudidayaan ikan air payau dan perairan umum daratan, pergaraman, pengolahan, distribusi dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, peredaran jenis ikan membahayakan dan merugikan, penumbuhkembangan masyarakat pengawas, pengembangan sistem pengendalian pengelolaan sumberdaya perikanan, kerjasama penegakan hukum, tindak lanjut hasil pengawasan penanganan pelanggaran dan pengenaan sanksi di bidang perikanan;
3. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan penangkapan ikan di perairan umum daratan, pembudidayaan ikan air payau dan perairan umum daratan, pergaraman, pengolahan, distribusi dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, peredaran jenis ikan membahayakan dan merugikan, penumbuhkembangan masyarakat pengawas, pengembangan sistem pengendalian pengelolaan sumberdaya perikanan, kerjasama penegakan hukum, tindak lanjut hasil pengawasan penanganan pelanggaran dan pengenaan sanksi di bidang perikanan;
4. Monitoring dan evaluasi terkait pengendalian pemanfaatan penangkapan ikan di perairan umum daratan, pembudidayaan ikan air payau dan perairan umum daratan, pergaraman, pengolahan, distribusi dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, peredaran jenis ikan membahayakan dan merugikan, penumbuhkembangan masyarakat pengawas, pengembangan sistem pengendalian pengelolaan sumberdaya perikanan, kerjasama penegakan hukum, tindak lanjut hasil pengawasan penanganan pelanggaran dan pengenaan sanksi di bidang perikanan;
5. Pelaporan dan rekomendasi terkait pengendalian pemanfaatan penangkapan ikan di perairan umum daratan, pembudidayaan ikan air payau dan perairan umum daratan, pergaraman, pengolahan, distribusi dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, peredaran jenis ikan membahayakan dan merugikan,

penumbuhkembangan masyarakat pengawas, pengembangan sistem pengendalian pengelolaan sumberdaya perikanan, kerjasama penegakan hukum, tindak lanjut hasil pengawasan penanganan pelanggaran dan pengenaan sanksi di bidang perikanan; dan

6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional yaitu Kelompok Kerja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan.

F. Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas

Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan dan pengembangan komoditas perikanan budidaya kelautan dan perikanan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan terkait penguatan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan dan pengembangan komoditas budidaya kelautan dan perikanan
2. Pelaksanaan kebijakan terkait penguatan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan dan pengembangan komoditas budidaya kelautan dan perikanan;
3. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait penguatan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan dan pengembangan komoditas budidaya kelautan dan perikanan;
4. Monitoring dan evaluasi terkait penguatan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan dan pengembangan komoditas budidaya kelautan dan perikanan;
5. Pelaporan dan rekomendasi terkait penguatan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan dan pengembangan komoditas budidaya kelautan dan perikanan; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Kelompok Kerja : Kelompok Kerja Pengembangan Komoditas dan Kelompok Kerja Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

G. Cabang Dinas Kelautan Kelas A

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun 2025 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah,

Cabang Dinas Kelautan Kelas A membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu dinas di bidang kelautan di wilayah kerjanya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Cabang Dinas Kelautan Kelas A melaksanakan fungsi:

1. penyusunan rencana teknis operasional sub urusan pengawasan kelautan, konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir;
2. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional sub urusan pengawasan kelautan, konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir;
3. evaluasi, dan pelaporan pengelolaan sub urusan pengawasan kelautan, konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir;
4. pengelolaan ketatausahaan administrasi perkantoran dan kepegawaian Cabang Dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Cabang Dinas Kelautan Kelas A terdiri atas :

- a. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A;
- b. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A; dan
- c. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A.

Struktur Organisasi Cabang Dinas Kelautan Kelas A sebagai berikut:

a. Kepala Cabang Dinas

Bertugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Cabang Dinas sebagaimana tersebut di atas.

Kepala Cabang Dinas melaksanakan kewenangan dalam hal :

1. kewenangan pengawasan, meliputi :
 - a. Operasi pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan
 - b. Penetapan tindak lanjut penanganan pelanggaran.
2. kewenangan konservasi, rehabilitasi dan perijinan, meliputi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan dan program serta pelaksanaan administrasi dibidang sub urusan konservasi dan rehabilitas;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan dan verifikasi bahan rekomendasi teknis;
 - c. Pemberian rekomendasi teknis.
3. kewenangan lainnya, meliputi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan dan program serta pelaksanaan administrasi dibidang sub urusan pengawasan, konservasi, dan rehabilitasi;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya.

b. Sub bagian Tata Usaha.

Bertugas menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan; melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan kegiatan; melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; menyiapkan pengelolaan administrasi keuangan; melaksanakan pengelolaan

- administrasi perlengkapan dan peralatan kantor; melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat; melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga; melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat; melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Cabang.
- c. Seksi Pengawasan;
- Bertugas menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional sebagian tugas dinas di bidang pengawasan kelautan; menyiapkan strategi, sarana prasarana, jadwal, wilayah jangkauan dan perawatan kapal pengawas; menyiapkan pelaksanaan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan pemanfaatan ruang laut; melaksanakan pengawasan di kawasan konservasi kewenangan provinsi; melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan; menyiapkan personel pengawas perikanan penerbitan HPK dan SLO kapal perikanan kewenangan provinsi di pelabuhan perikanan kewenangan provinsi; menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi serta pelaporan pengawasan SDK; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi
- Bertugas menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional sub urusan pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah dan rehabilitasi ekosistem pesisir; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis sub urusan pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah dan rehabilitasi ekosistem pesisir; menyiapkan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah dan rehabilitasi ekosistem pesisir; menyiapkan pengoordinasian pemenuhan sarana prasarana sub urusan pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah dan rehabilitasi ekosistem pesisir; menyiapkan evaluasi dan pelaporan sub urusan pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah dan rehabilitasi ekosistem pesisir; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

H. UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun 2025 tentang

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

1. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kelas A

yang terdiri atas:

- a. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari; dan
- b. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung;

2. Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A

- a. Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor;
- b. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak;
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo; dan
- d. Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending.

3. Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B

yang terdiri atas:

- a. Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong;
- b. Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto;
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang;
- d. Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa; dan
- e. Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan.

4. Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A

5. Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kelas A mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, menyinergikan dan mengendalikan operasional pengelolaan pelabuhan perikanan Nusantara dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara kelas A dan Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. Pelayanan tambat labuh bongkar muat dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
- b. Pelaksanaan pemantauan usaha di bidang perikanan tangkap;
- c. Pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan hasil tangkapan ikan;
- d. Pelaksanaan koordinasi urusan Keamanan, Kebersihan, Ketertiban Keindahan, Dan Keselamatan (K5) dalam kawasan pelabuhan perikanan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan meliputi : mampu melayani Kapal Perikanan yang melakukan kegiatan Perikanan di Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Laut Lepas, memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh untuk Kapal Perikanan berukuran paling kecil 30 (tiga puluh) *gross tonnage*, memiliki dan/ atau memanfaatkan dermaga paling pendek 150 (seratus lima puluh) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 3 (tiga) meter, mampu menampung Kapal Perikanan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) *gross tonnage*, memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 10 (sepuluh) hektar, terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan

- pemasaran hasil perikanan rata-rata 15 (lima belas) ton per hari; dan terdapat industri pengolahan Ikan dan industri penunjang lainnya;
- f. Pelaksanaan publikasi operasional pelabuhan perikanan;
 - g. Pelayanan dokumen distribusi ikan;
 - h. Pelayanan logistik dan perbekalan;
 - i. Pelayanan retribusi penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di pelabuhan perikanan;
 - j. Fasilitasi tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat;
 - k. Penyelenggaraan wisata Bahari;
 - l. Pengelolaan ketatausahaan; dan
 - m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Kelas A, terdiri atas:

a. Kepala Pelabuhan.

Bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara Kelas A

b. Subbagian Tata Usaha.

Bertugas menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan; menyiapkan pengelolaan ketatausahaan; menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan; menyiapkan pengelolaan keuangan; menyiapkan pengelolaan kepegawaian; menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah ; menyiapkan kerja sama dan kehumasan; menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Melaksanakan tugasnya mengkoordinasikan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas : Kelompok Kerja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran dan Kelompok Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha.

d. Unit Penunjang

Unit penunjang merupakan unit organisasi non struktural berupa Sentra Pendaratan Ikan dan Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan yang dipimpin oleh seorang Koordinator.

Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, menyinergikan dan mengendalikan operasional pengelolaan pelabuhan perikanan pantai dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pelabuhan Perikanan Pantai kelas A melaksanakan fungsi :

- a. Pelayanan tambat labuh bongkar muat dan kesyahbandaran Pelabuhan perikanan;
- b. Pelaksanaan pemantauan usaha di bidang perikanan tangkap;
- c. Pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan hasil tangkapan ikan;

- d. Pelaksanaan koordinasi urusan Keamanan, Kebersihan, Ketertiban Keindahan, dan Keselamatan (K5) dalam kawasan pelabuhan perikanan
- e. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan meliputi : mampu melayani Kapal Perikanan yang melakukan kegiatan Perikanan di Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh untuk Kapal Perikanan berukuran paling kecil 10 (sepuluh) *gross tonnage*; memiliki dan/ atau memanfaatkan dermaga paling pendek 100 (seratus) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 2 (dua) meter; mampu menampung Kapal Perikanan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 300 (tiga ratus) *gross tonnage*; dan memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 5 (lima) hektar ; terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 (lima) ton per hari; dan terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya;
- f. Pelaksanaan publikasi operasional pelabuhan perikanan;
- g. Pelayanan dokumen distribusi ikan;
- h. Pelayanan logistik dan perbekalan;
- i. Pelayanan retribusi penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di pelabuhan perikanan;
- j. Fasilitasi tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- k. Penyelenggaraan wisata Bahari;
- l. Pengelolaan ketatausahaan; dan
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A, terdiri atas:

a. Kepala Pelabuhan.

Bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A

b. Subbagian Tata Usaha.

Bertugas menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan; menyiapkan pengelolaan ketatausahaan; menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan; menyiapkan pengelolaan keuangan; menyiapkan pengelolaan kepegawaian; menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah ; menyiapkan kerja sama dan kehumasan; menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Melaksanakan tugasnya mengkoordinasikan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas : Kelompok Kerja Operasional

Pelabuhan dan Kesyahbandaran dan Kelompok Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha.

d. Unit Penunjang

Unit penunjang merupakan unit organisasi non struktural berupa Sentra Pendaratan Ikan dan Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan yang dipimpin oleh seorang Koordinator.

Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai. Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, menyinergikan dan mengendalikan operasional pengelolaan pelabuhan perikanan pantai dengan melaksanakan fungsi :

- a. Pelayanan tambat labuh bongkar muat dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
- b. Pelaksanakan pemantauan usaha di bidang perikanan tangkap;
- c. Pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan hasil tangkapan ikan
- d. Pelaksanaan koordinasi urusan Keamanan, Kebersihan, Ketertiban; Keindahan, dan Keselamatan (K5) dalam kawasan pelabuhan perikanan
- e. Pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana pelabuhan perikanan meliputi : mampu melayani Kapal Perikanan yang melakukan kegiatan Perikanan di Perairan Indonesia, memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh untuk Kapal Perikanan berukuran paling kecil 1 (satu) *gross tonnage*, memiliki dan/ atau memanfaatkan dermaga paling pendek 100 (seratus) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 1 (satu) meter, mampu menampung Kapal Perikanan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*, memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 2 (dua) hektar dan terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 0,5 (nol koma lima) ton per hari,
- f. Pelaksanaan publikasi operasional pelabuhan perikanan,
- g. Pelayanan dokumen distribusi ikan,
- h. Pelayanan logistik dan perbekalan;
- i. Pelayanan retribusi penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di pelabuhan perikanan;
- j. Fasilitasi tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- k. Penyelenggaraan wisata bahari;
- l. Pengelolaan ketatausahaan; dan
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B terdiri atas:

- a. Kepala Pelabuhan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, serta tata kelola dan pelayanan usaha. Tugas tersebut meliputi:

- a. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, serta tata kelola dan pelayanan usaha;
 - b. Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, serta tata kelola dan pelayanan usaha;
 - c. Menyiapkan inspeksi pembongkaran ikan;
 - d. Menyiapkan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik (CPIB);
 - e. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
 - f. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
 - g. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
 - h. Pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
 - i. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
 - j. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
 - k. Menyiapkan pelayanan cek fisik kapal dan alat penangkap ikan;
 - l. Menyiapkan kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - m. Pelaksanaan bimbingan teknis operasional pelabuhan, kesyahbandaran, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pelayanan usaha;
 - n. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
 - o. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
 - p. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana;
 - q. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan;
 - r. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha; dan
 - s. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- b. Subbagian Tata Usaha.
- Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketatausahaan. Tugas tersebut meliputi:
- a. Menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan;
 - b. Menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. Pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, umum;
 - e. Menyiapkan pengelolaan kepegawaian;

- f. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - g. Pengelolaan barang milik Daerah;
 - h. Menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 - i. Menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pelabuhan Perikanan;
 - k. Pelaksanaan pelayanan masyarakat perikanan; dan
 - l. Pelaksanaan pengendalian lingkungan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

6. Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A.

Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengembangan perikanan budidaya. dengan melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan budidaya ikan, produksi induk dan calon induk unggul, produksi benih bermutu, kelestarian sumber daya ikan dan penelitian;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan budidaya ikan, produksi induk dan calon induk unggul, produksi benih bermutu, kelestarian sumber daya ikan dan penelitian;
- c. Evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan budidaya ikan, produksi induk dan calon induk unggul, produksi benih bermutu, kelestarian sumber daya ikan dan penelitian;
- d. Pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A terdiri atas:

- a. Kepala Balai.

Bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A

- b. Subbagian Tata Usaha.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan. Tugas tersebut meliputi:

- 1. Menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan;
- 2. Menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;

3. Kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
4. Menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
5. Menyiapkan pengelolaan keuangan;
6. Menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian;
7. Menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah ;
8. Menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
9. Menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
10. Menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Balai dan;
11. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Kelompok Kerja Produksi dan Diseminasi Perikanan Budidaya mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Produksi dan Diseminasi Perikanan Budidaya. Tugas tersebut meliputi :

1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang produksi dan diseminasi perikanan budidaya;
2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang produksi dan diseminasi perikanan budidaya;
3. menyiapkan pelaksanaan adopsi inovasi teknologi, kaji terap, diseminasi kepada pembudidaya air tawar, payau dan laut, unit pembenihan skala rumah tangga dan Masyarakat;
4. menyiapkan pembinaan dan temu teknis produksi kepada pembudidaya air tawar, payau dan laut, unit pembenihan skala rumah tangga dan Masyarakat;
5. menyiapkan produksi calon induk dan benih ikan air tawar, payau dan laut;
6. menyiapkan pemuliaan ikan budidaya air tawar, payau dan laut;
7. menyiapkan evaluasi dan pelaporan dibidang produksi dan diseminasi perikanan budidaya;
8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Kelompok Kerja Kemitraan dan Pelayanan Usaha

1. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Kemitraan dan Pelayanan Usaha;
2. Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Kemitraan dan Pelayanan Usaha;
3. Menyiapkan penyebarluasan informasi teknologi budidaya ikan air tawar, payau dan laut;
4. menyiapkan pelayanan jasa konsultasi teknis kepada pembudidaya ikan tawar, payau dan laut, unit pembenihan skala rumah tangga dan Masyarakat

5. Menyiapkan pelayanan usaha penjualan induk, calon induk, benih dan produksi budidaya ikan air tawar, payau dan laut;
 6. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Kemitraan dan Pelayanan Usaha;
 7. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- e. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- f. Unit Penunjang
Unit penunjang merupakan unit organisasi non struktural berupa Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang dibentuk guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

7. Balai Kesehatan Ikan Dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A.

Balai Kesehatan Ikan Dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Pengelolaan Kesehatan Ikan dan bidang Penerapan dan Kelayakan Produk Hasil Perikanan dengan melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian, pengelolaan Kesehatan ikan dan kelayakan produk hasil perikanan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengujian, pengelolaan kesehatan ikan dan kelayakan produk hasil perikanan;
- c. evaluasi, dan pelaporan bidang pengujian, pengendalian hama dan penyakit dan pengujian dan penerapan mutu produk hasil perikanan;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Organisasi Balai Kesehatan Ikan Dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A, terdiri atas :

- a. Kepala Balai.
Bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Kesehatan Ikan Dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A.
- b. Subbagian Tata Usaha.
Bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan. Tugas tersebut meliputi:
 1. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 2. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;

3. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
4. menyiapkan pengelolaan keuangan;
5. menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian;
6. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah ;
7. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
8. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
9. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Kelompok Kerja Pengelolaan Kesehatan Ikan.

Bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Kesehatan Ikan. Tugas tersebut meliputi :

1. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian dan pengendalian hama penyakit ikan;
2. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
3. Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengujian dan pengendalian hama penyakit ikan;
4. Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
5. Menyiapkan penyebarluasan informasi teknologi mengatasi hama dan penyakit;
6. Memonitoring dan menganalisa residu obat, bahan kimia, bahan biologi dan kontaminan serta penggunaan pakan ikan;
7. Mengawasi peredaran bahan kimia maupun obat-obatan;
8. Monitoring, survailance dan menganalisa resiko akibat hama penyakit ikan;
9. Menganalisa dan mengevaluasi kerugian akibat hama penyakit ikan;
10. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan pengendalian hama penyakit ikan; dan
11. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

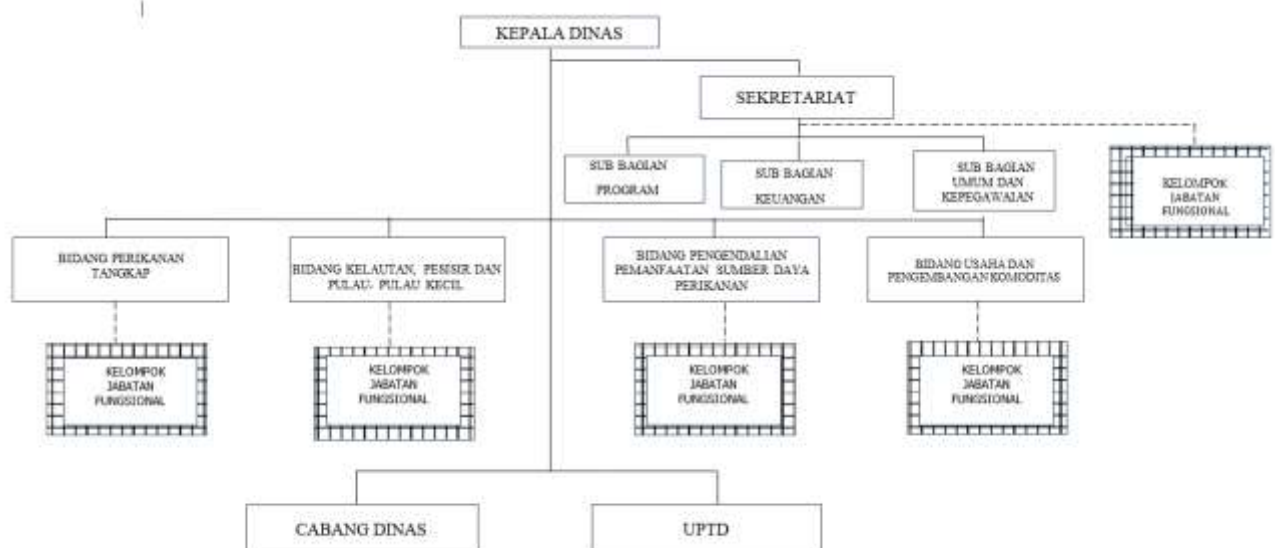
d. Ketua Kelompok Kerja Penerapan dan Kelayakan Produk Hasil Perikanan

Bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Penerapan dan Kelayakan Produk Hasil Perikanan. Tugas tersebut meliputi :

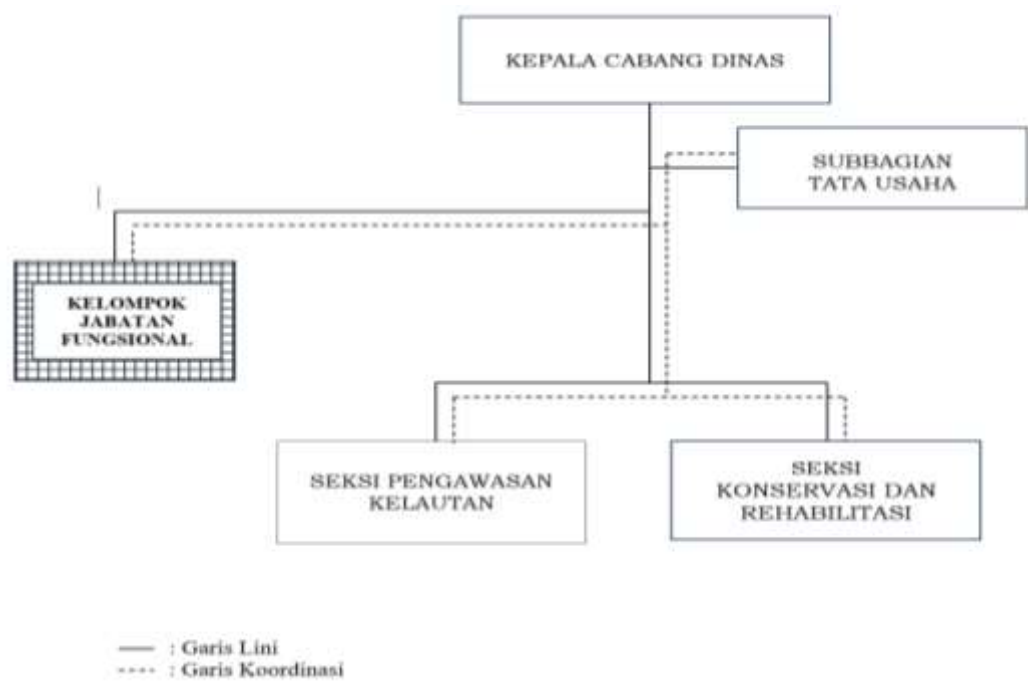
1. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang penerapan dan kelayakan produk hasil perikanan;
2. Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang penerapan dan kelayakan produk hasil perikanan;

3. Menyiapkan pengujian penerapan dan kelayakan hasil perikanan secara laboratoris terhadap produk pengolahan dan hasil perikanan (mikrobiologi, organoleptik dan kimia);
 4. Menyiapkan pengembangan kemampuan pengujian sesuai tuntutan pasar;
 5. Menyiapkan sistem manajemen laboratorium produk hasil perikanan;
 6. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan dibidang penerapan dan kelayakan produk hasil perikanan;
 7. Menyiapkan inspeksi penerapan cara pengolahan yang baik dan prosedur operasional standar sanitasi;
 8. Menyiapkan monitoring hasil perikanan pada unit pengolahan ikan dan suplier (air, es, kesegaranbahan baku, dan residu bahan kimia berbahaya)
 9. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan dibidang penerapan dan kelayakan produk hasil perikanan dan;
 10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- f. Unit Penunjang
- Unit penunjang merupakan unit organisasi non struktural berupa Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang dibentuk guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

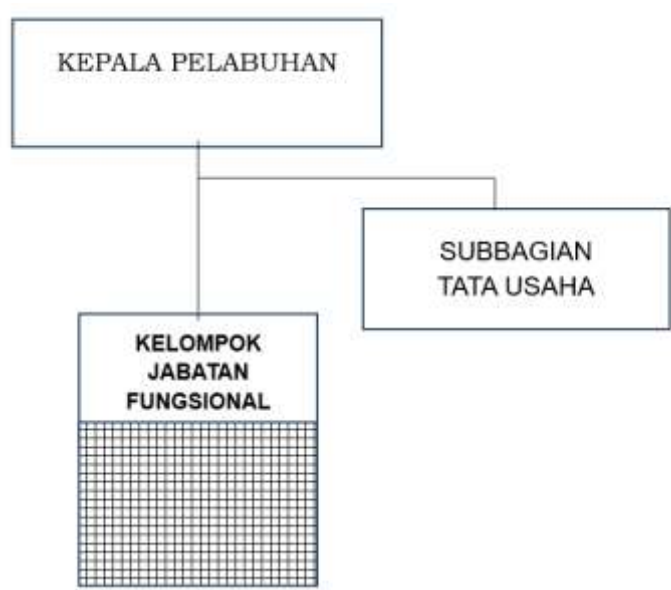
Bagan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.1.



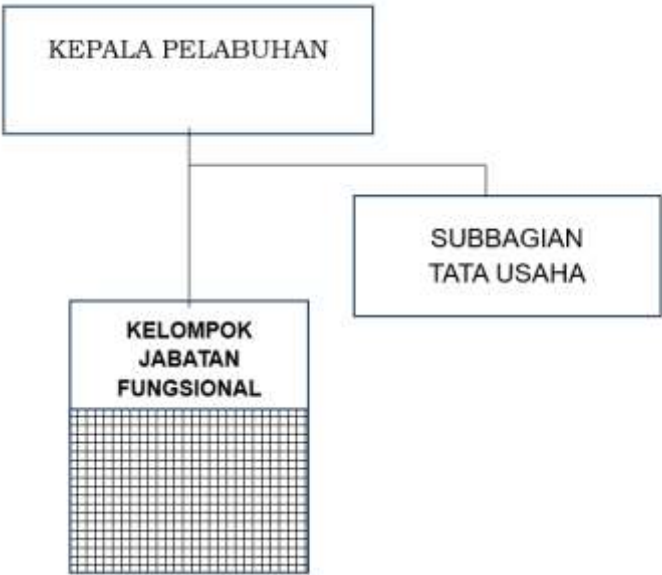
Gambar 2.1. Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



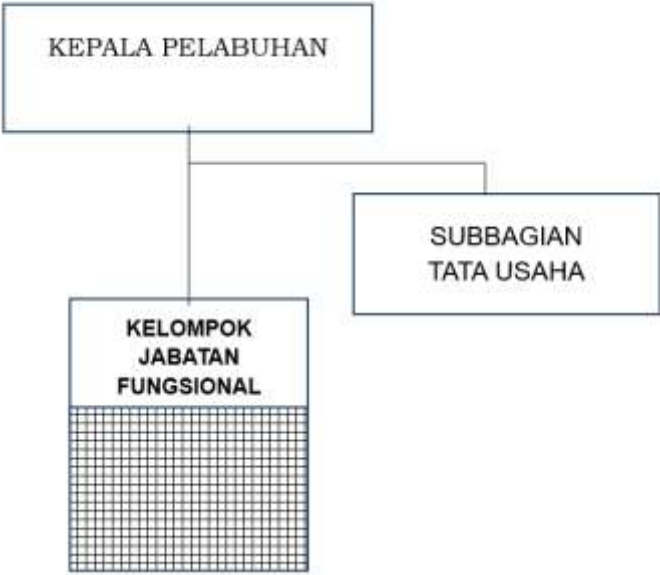
Gambar 2.2. Bagan Organisasi Cabang Dinas Kelautan Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



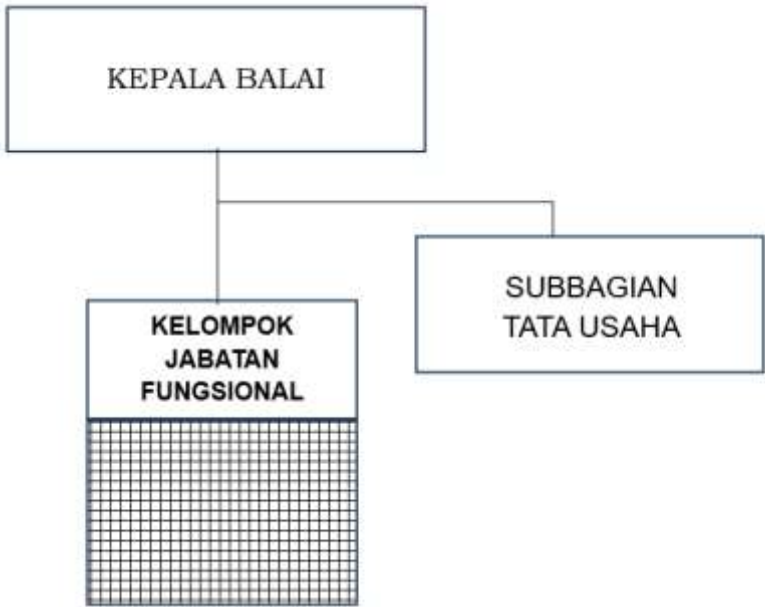
Gambar 2.3. Bagan Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



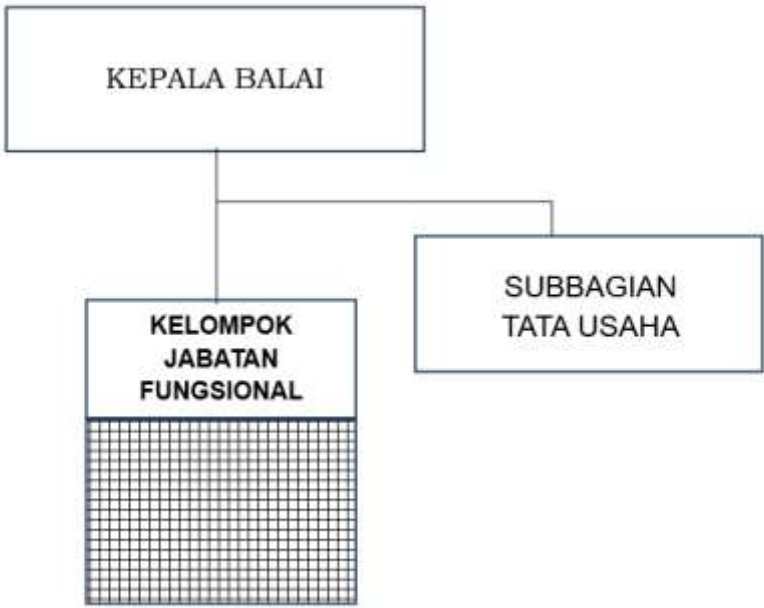
Gambar 2.4. Bagan Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.5. Bagan Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.6. Bagan Organisasi Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.7. Bagan Organisasi Balai Kesehatan Ikan Dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

2.2. SUMBERDAYA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

2.2.1. Jumlah Pegawai

Pada tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah pegawai sebanyak 253 orang. Sejumlah pegawai tersebut tersebar di seluruh bidang dan UPT dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2.a, dapat diketahui bahwa berdasarkan golongannya jumlah pegawai Golongan I berjumlah 5 orang, Golongan II sebanyak 25 orang, Golongan III sebanyak 167 orang dan Golongan IV sebanyak 27 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pegawai yang lulusan SD adalah 7 orang, SLTP sebanyak 7 orang, SLTA sebanyak 53 orang, Sarjana Muda sebanyak 16 orang, S1/DIV sebanyak 126 orang, S2 sebanyak 38 orang dan S3 sebanyak 2 orang. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut 2.1

Tabel 2.1

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah 2024

NO	INSTANSI	JUMLAH	I				II				III				IV				PPPK
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	63					1		2	2	7	12	5	14	6	5		1	8
2	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TEGALSARI	13				3				1	4	1	1	2	1				
3	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KLIDANGLOR	7							1					3	1				2
4	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MORODEMAK	5												2	1				2
5	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BAJOMULYO	8									1	1		3	1				2
6	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TASIKAGUNG	5											1	2	1				1
7	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LOHGENDING	9	1								1		1	3	1				2
8	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LARANGAN	8				1				2	2		1	2					
9	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI WONOKERTO	6									1	1		1	1				2
10	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI ASEMDOYONG	6							1		2			3					
11	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAWANG	5							1		1			1					2
12	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KARIMUNJAWA	9				1						4	1	2					1
13	CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH BARAT	8										6		2					
14	CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH TIMUR	14								2	2	4		4	2				

NO	INSTANSI	JUMLAH	I				II				III				IV				PPPK
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH SELATAN	10								1		3	1	5					
16	BALAI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU LAUT	18							2			3	2	7	1	1			2
17	BALAI LABORATORIUM PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	43					1	2	2	1	6	13	4	8	1				5
18	BALAI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	16						1			1	5	1	5	3				
	JUMLAH	253	1	0	0	5	2	3	9	9	28	53	18	69	20	6	0	1	29

Sumber : DKP Jateng, 2024

2.2.2. Aset/Modal

Sarana dan prasarana penunjang kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah secara bertahap terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Hingga Januari 2024, secara umum prasarana kerja berupa gedung perkantoran yang sudah milik sendiri antara lain: balai budidaya, laboratorium, kapal inspeksi perikanan, mobil laboratorium keliling dan mobil Gemarikan. Berikut ini merupakan Tabel 1.3. mengenai aset/modal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan sarana dan prasarana penunjang kinerja.

Tabel 2.2
Aset/Modal Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Tahun 2024

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (m ²)	Tahun Penga- daan	Letak/ alamat	Pengguna-an	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	14012	1986	Jl. Veteran No. 2 KAB. CILACAP	Pembenihan dan Budidaya Ikan Air Laut Kebumen	
2	TANAH.TANAH BANGUNAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III	564	1980	Ds. Gunung simping , Kec.Cilacap, KAB. CILACAP	LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL	
3	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	930	1988	Jl. Ksatrian, Karangkobar, Sokanegara, KAB. BANJARNEGARA	DINLUKANKAN PROV. JATENG	
4	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	20000	2012	Ds. Singosari Kec. Karangwelas KAB. BANYUMAS	BPBIAT Muntilan	
5	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	20000	2012	Ds. Tambaksogra Kec. Banyumas KAB. BANYUMAS	BPBIAT Muntilan	
6	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	90939	2016	DESA PASIR ,Pasir.Ayah.KAB. KEBUMEN	DERMAGA DAN TPI	
7	TANAH.TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA / JASA.TANAH BANGUNAN DERMAGA	41742	2016	DESA PASIR ,Pasir.Ayah.KAB. KEBUMEN	DERMAGA	
8	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	29510	1985	Jl Kerkop No. 1 Ds. Muntilan Kec. Muntilan KAB. MAGELANG	Perbenihan dan Budi Daya Ikan Tawar Muntilan MGL	
9	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	10405	1994	Ds. Sawangan , Kec. Sawangan , KAB. MAGELANG	BPBIAT Muntilan	
10	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	11540	1994	Ds. Sawangan , Kec. Sawangan , KAB. MAGELANG	BPBIAT Muntilan	
11	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	9720	1987	Ds. Ngrajek , Kec. Mungkid , KAB. MAGELANG	Perbenihan dan Budi Daya Ikan Tawar Ngrajek MGL	
12	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	43990	1987	Ds. Ngrajek , Kec. Mungkid , KAB. MAGELANG	Perbenihan dan Budi Daya Ikan Tawar Ngrajek MGL	
13	TANAH.TANAH KOSONG YANG SUDAH DIPERUNTUKKAN	100	2007	Ds. Parimono, Kec.Mungkid , Kab. Magelang, KAB. MAGELANG	Perbenihan dan Budi Daya Ikan Tawar Ngrajek MGL	
14	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR	28425	1981	Ds. Janti , Kec. Polanharjo , KAB.	Perbenihan dan Budi Daya Ikan	

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (m ²)	Tahun Penga- daan	Letak/ alamat	Pengguna-an	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	PEMERINTAH			KLATEN	Air Tawar Janti di Klaten	
15	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	600	1997	Ds. Ngabean Kec. Kartosuro Kab Sukoharjo,Ngabeyan.K artasura.KAB. SUKOHARJO	DINLUTKAN PROV. JATENG	
16	TANAH.TANAH BANGUNAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III	2207	1958	Jl. Diponegoro No. 90,Tasikagung KAB. REMBANG	Rumah dinas	
17	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	7405	1996	Ds. Tasikagung , Kec. Rembang, KAB. REMBANG	PPP TASIKAGUNG REMBANG	
18	TANAH.TANAH BANGUNAN POS JAGA/MENARA JAGA	7875	2004	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang.KAB. REMBANG	POSKAMLADU	
19	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	222	2009	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang.KAB. REMBANG		
20	TANAH.TANAH BANGUNAN PASAR	222	2012	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang.KAB. REMBANG		
21	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	222	2012	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang.KAB. REMBANG		
22	TANAH.TANAH BANGUNAN TERMINAL LAUT	4086	2014	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang.KAB. REMBANG	KBT	
23	TANAH.TANAH BANGUNAN TERMINAL LAUT	14456	2014	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang.KAB. REMBANG	PEKARANGAN KBT	
24	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	6359	2014	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang.KAB. REMBANG	TPI TASIKAGUNG	
25	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	3045	2014	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang.KAB. REMBANG	JALAN TPI	
26	TANAH.TANAH BANGUNAN TERMINAL LAUT	14311	2016	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang.KAB. REMBANG	KAWASAN PPP	
27	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	5751	1987	Ds. Jatisari Kec. sluke KAB. REMBANG	PIAP SLUKE REMBANG	
28	TANAH.TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU	30	2011	DESA SLUKE KEC. SLUKE REMBANG KAB. REMBANG	TANAH UNTUK INSTALASI AIR BERSIH PIAP SLUKE	
29	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	1997	1991	JL. SOEDIRMAN 12A PLANGITAN, KAB. PATI	CABANG DINAS KELAUTAN WIL TIMUR	
30	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	26570	2012	Ds. Pengkolan Kec. Margoyoso KAB. PATI	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
31	TANAH.TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/GDG.TEMPAT TINGGAL.LAIN-LAIN	1220	1990	JL. Achmad Dahlan, Kec.Karimunjawa, KAB. JEPARA	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) KARIMUNJAWA	
32	TANAH.TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/GDG.TEMPAT TINGGAL.LAIN-LAIN	9570	1990	JL. Achmad Dahlan, Kec.Karimunjawa, KAB. JEPARA	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) KARIMUNJAWA	
33	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR	1415	2009	Jl. Cik Lanang Jepara, Jobokuto KAB.	Ex Kantor Cabang Dinas Jepara	

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (m ²)	Tahun Penga- daan	Letak/ alamat	Pengguna-an	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	PEMERINTAH			JEPARA		
34	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	9296	2013	Karimunjawa KAB. JEPARA	Tanah Untuk Penampungan Air Tawar PPP Karimunjawa	
35	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	3000	2014	JL. AE SURYANI,Bulu, KAB. JEPARA	TANAH UNTUK TPI BULU JEPARA	
36	TANAH.TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/GDG.TEM PAT TINGGAL.LAIN-LAIN	1940	1990	Jl. Achmad Dahlan, Kec. Karimunjawa KAB. JEPARA	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) KARIMUNJAWA	
37	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	25110	2005	DS. Bulu Kec. Jepara KAB. JEPARA	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
38	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	25710	2005	DS. Bulu Kec. Jepara KAB. JEPARA	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
39	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	22200	2005	Ds. Kauman Kec jepara KAB. JEPARA	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
40	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	20090	2005	Ds. Jobokuto Kec. Jepara KAB. JEPARA	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
41	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	1500	2012	Ds. Bandengan Kec. Jepara KAB. JEPARA	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
42	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	19480	2014	DESA JOBOKUTO KEC. JEPARA, KAB. JEPARA	TANAH TAMBAK JOBOKUTO JEPARA	
43	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	8000	2014	DESA JOBOKUTO KEC. JEPARA, KAB. JEPARA	TAMBAK JOBOKUTO JEPARA	
44	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	1155	2014	DESA BULU KEC. JEPARA JEPARA KAB. JEPARA	TANAH UNTUK TAMBAK BULU JEPARA	
45	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	16160	2014	DESA KAUMAN KEC. JEPARA JEPARA KAB. JEPARA	TANAH TAMBAK KAUMAN JEPARA	
46	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	40000	1980	Ds. tambak bulusan kec. karang tengah KAB. DEMAK	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
47	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	13185	2001	Ds. Purworejo Kec. Bonang KAB. DEMAK	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
48	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	18419	2001	Ds. Morodemak Kec. Bonang KAB. DEMAK	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
49	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	22496	2001	Ds. Berahan Wetan Kec Wedung KAB. DEMAK	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
50	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	39698	2016	PURWOREJO BONANG, Morodemak. KAB. DEMAK	PELABUHAN	
51	TANAH.TANAH	500	1988	Ds. Nyatnyono , Kec.	DINLUTKAN	

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (m ²)	Tahun Penga- daan	Letak/ alamat	Pengguna-an	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	BANGUNAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III			Ungaran, KAB. SEMARANG	PROV. JATENG	
52	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	9510	1995	Ds. Pojoksari, Kec. Ambarawa, KAB. SEMARANG	Perbenihan dan Budi Daya Ikan Tawar Ambarawa SMG	
53	TANAH.TANAH NON PERSIL LAINNYA	22420	1998	Ds. Turunrejo , Kec. Brangsong, KAB. KENDAL	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
54	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	7738	2014	DESA GEMPOLSEWU KEC. ROWOSARI, KAB. KENDAL	KANTOR KAWASAN PPP TAWANG KENDAL	
55	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	12360	1988	Ds. Karangasem, Kec. Batang, KAB. BATANG	TPI KLIDANG LOR	
56	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	1600	1989	Ds. Karangasem, Kec.Batang, KAB. BATANG	PPP KLIDANG LOR	
57	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	225	1991	Ds.Kedungsegog, Kec. Tulis, KAB. BATANG	TPI ROBAN	
58	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	1010	1991	Ds. Kebondalem, Kec. Gringsing, KAB. BATANG	TPI SIKLAYU	
59	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	250	1993	Ds. Kedawung,Kec. Limpung, KAB. BATANG	TPI CELONG	
60	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	450	2016	KARANGASEM KAB. BATANG	KANTOR	
61	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	10360	2017	WUKIRSARI, KAB. BATANG	TAMBAK	
62	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	11040	1994	Ds. Sejomerto , Kec. Roban, KAB. BATANG	BBI SEJOMERTO	
63	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	725	1988	Ds. Sugih waras, Kec. Pemalang, KAB. PEMALANG	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) ASEMDOYONG	
64	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	19842	1995	Ds. Lawangrejo Kec. Pemalang, KAB. PEMALANG	BBIAPL TUGU	
65	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	21110	2012	Ds Pesantren Kec. Ulujami KAB. PEMALANG	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
66	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	20235	2016	DS ASEMDOYONG,Taman , KAB. PEMALANG	PELABUHAN ASEMDOYONG	
67	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	15300	2003	Ds. Banjaranyar , Kec. Randudongkal KAB. PEMALANG	BBI RANDUDONGKAL	
68	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	1600	1993	JL BANDENG MUNJUNGAGUNG, KAB. TEGAL	CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH BARAT	
69	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	190	1993	Ds. Mujungagung , Kec. Kramat, KAB. TEGAL	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
70	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG	21400	2016	Ds. Mujungagung , Kec. Kramat, KAB.	PPI LARANGAN	

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (m ²)	Tahun Penga- daan	Letak/ alamat	Pengguna-an	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	PELELANGAN IKAN			TEGAL		
71	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	91940	1989	Ds. Maribaya Kec. Kramat KAB. TEGAL	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
72	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	25000	2012	Ds. Kedung Kelor Kec. Marib KAB. TEGAL	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
73	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	22250	2012	Ds. Kedung Kelor Kec. Marib KAB. TEGAL	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
74	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	685	1995	Ds. Brebes , Kec. Brebes, KAB. BREBES	DINLUTKAN PROV. JATENG	
75	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	320	1987	Ds. Wates , Kec. Magelang Utara, KOTA MAGELANG	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar Munt	
76	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	1301	1985	Jl. Imam Bonjol No. 130,Sekayu,.Semarang Tengah, KOTA SEMARANG	DINLUTKAN PROV. JATENG	
77	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	1272	1985	Jl. Imam Bonjol No. 130,Sekayu,.Semarang Tengah, KOTA SEMARANG	DINLUTKAN PROV. JATENG	
78	TANAH.TANAH BANGUNAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III	496	2001	Jl. Trunojoyo X/23 A Banyumanik Banyumanik.KOTA SEMARANG	RUMDIN DINLUTKAN PROV. JATENG	
79	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	2885	2002	Jl. Imam Bonjol No. 134 Sekayu, Semarang Tengah, KOTA SEMARANG	DINLUTKAN PROV. JATENG	
80	TANAH.TANAH KOSONG YANG SUDAH DIPERUNTUKKAN	855	2015	Jl. Sisingamangaraja No. 77, Wonotinggal, Candisari, KOTA SEMARANG	RUMDIN	
81	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	25180	1990	Ds. Mangunharjo, Kec. Tugu, KOTA SEMARANG	DINLUTKAN PROV. JATENG	
82	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	5922	2001	Ds. Karanganyar, Kec. Tugu, KOTA SEMARANG	Budidaya Ikan Air Payau Karanganyar SMG	
83	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	37114	2001	Ds. Karanganyar, Kec. Tugu, KOTA SEMARANG	Budidaya Ikan Air Payau Karanganyar SMG	
84	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	692	1988	Jl. Mpu Tantular No. 2, Bandarharjo, Semarang Utara, KOTA SEMARANG	BALAI KARANTINA DAN KESEHATAN IKAN	
85	TANAH.TANAH BANGUNAN LABORATORIUM	2320	1978	Jl. Siliwangi No. 636, Krapyak, Semarang Barat, KOTA SEMARANG	LPPMHP SEMARANG	
86	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	13485	1993	Ds. Panjangwetan, Pekalongan Utara, KOTA PEKALONGAN	BPPI WONOKERTO	
87	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	2000	1977	Ds. Panjangwetan, Pekalongan Utara, KOTA PEKALONGAN	LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL P	

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (m ²)	Tahun Penga- daan	Letak/ alamat	Pengguna-an	Ket
1	2	3	4	5	6	7
88	TANAH.TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/GDG.TEM PAT TINGGAL.LAIN-LAIN	5480	2002	PPP TEGALSARI, TEGAL BARAT.KOTA TEGAL	PERUM KOMPLEK JONGOR	
89	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	7720	2002	PPP TEGALSARI, TEGAL BARAT.KOTA TEGAL	PUSAT PENDARATAN IKAN	
90	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	43160	2002	PPP TEGALSARI, TEGAL BARAT.KOTA TEGAL	PUSAT PENDARATAN IKAN	
91	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	36688	2002	PPP TEGALSARI, TEGAL BARAT.KOTA TEGAL	PELELANGAN IKAN	
92	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	11520	2002	PPP TEGALSARI, TEGAL BARAT.KOTA TEGAL	PUSAT PENDARATAN IKAN	
93	TANAH.TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA / JASA.TANAH BANGUNAN DERMAGA	50406	2002	PPP TEGALSARI, TEGAL BARAT.KOTA TEGAL	DERMAGA	

Sarana kerja penunjang lain yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah berupa sarana informasi portal berupa *website* dengan alamat akses <http://dkp.jatengprov.go.id>, Email: dkp@jatengprov.go.id, facebook: [dkpjateng](#); Twitter [@dkpjateng](#); Instagram [@dkpjateng](#); youtube : [dkpjateng](#). Sarana informasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah.

2.2.3. PROFIL UPT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Berikut ini adalah gambaran profil Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) yang berada dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

1. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) DAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) KELAS A

Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya.

UPT PPN Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berjumlah 2 (Dua) unit, UPT PPP Kelas A berjumlah 4 (Empat) unit yang tersebar di pantai utara dan pantai selatan. Berikut ini adalah gambaran umum PPN dan PPP yang ada di Provinsi Jawa Tengah :

- 1) *Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kota Tegal*
- PPP Tegalsari secara geografis terletak pada koordinat 06°51'-06°52' LS dan 109°09'-109°10' BT di Desa Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Tegalsari antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Breakwater, Revetment, training Jetty, Dermaga bongkar, Dermaga tambat labuh, Alur masuk pelabuhan, Kolam labuh, Kolam perbekalan, Jalan Penghubung).
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Fasilitas Pendaratan Ikan (Bangunan TPI dan Tempat Pengepakan), Fasilitas Navigasi (Pelayaran dan Komunikasi, Rambu Suar, Suar Penuntun, Telepon), Fasilitas Suplai Air dan BBM (Reservoir, Sumur Artesis, Jaringan Air Bersih, SPBN (Dikelola KUD “Karya Mina”), Catu Daya Listrik, Gardu Induk Listrik dan Travo, Jalan dan Saluran, Gorong-gorong), Pabrik Es (Kap.8 ton/hari), Chilling Room/Gold Storage (Kap.30 ton), Drainase).
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Kantor Administrasi (Kantor PPP Tegalsari, Kantor Syahbandar, dan Poskamladu), Bangunan Serbaguna dan lainnya (Balai Pelatihan Nelayan (SUPM), Mess Operator, Toilet Umum, Kios Pedagang (*Cofish*), Kios Pedagang Swadana, Kios Pedagang (APBD Jateng), Tempat Pengepakan Ikan (*Cofish*), Tempat Pengepakan Ikan (APBD Jateng), Tempat Pengepakan Ikan (Swadana), Gerbang Pelabuhan, Gedung Pabrik Tepung Ikan, Tempat Parkir, Ruko Swadana, Unit Pengolah Limbah (UPL), Tempat Fillet Ikan (Swadana), Pos Portal, Tempat Perbaikan Jaring, Kontainer Sampah, Excavator, Ponton / Tongkang)

2) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasik Agung Kabupaten Rembang

PPP Tasik Agung secara geografis terletak pada 111°000’-111°030’ BT dan 6°30’-7°00’ LS di Desa Tasik Agung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Tasik Agung antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Tanah, Dermaga bongkar, Dermaga muat, Kolam Pelabuhan, Break Water, Jalan komplek/ paving, Drainase, Talud/Turap)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: TPI (lantai lelang), Tempat Pengepakan, Kantor ADM, Bengkel, SPDN 30.000 liter, Tangki air, dan instalasi, Pabrik Es (CBIP), Timbangan, Basket, Kereta Pengangkut Ikan, Tempat perbaikan Jaring, Tempat Jemuran ikan, Listrik, Kantor Syahbandar, Kantor SSB, Telepon, Sound System, Waserda, Pagar keliling)
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Tempat Parkir, MCK (6x3m), Kantor Perhubungan, Gedung Pelayanan Terpadu, Kantor Polairud, Kantor HNSI, Kantor KUD Mina, Mushola).

3) Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor Kabupaten Batang

PPP Klidang Lor secara geografis terletak pada koordinat 6°53'11"LS-109°44'55"BT di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Klidang Lor antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: *Break water*, Alur Perairan, Dermaga (Tiang tambat labuh, penerangan, penangkis gelombang/talud)).

- Fasilitas Fungsional (meliputi: Kantor PPP, Kantor Syahbandar, TPI, Lantai Lelang, Instalasi listrik, Sound System, SPDN, Instalasi air bersih, Menara suar).
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Areal parkir, Kamar mandi/WC, Kios, Areal pengepakan ikan, Kereta dorong, Kolam labuh, Koperasi, Klinik Kesehatan, Pompa air).

4) Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kabupaten Demak

PPP Morodemak secara geografis terletak pada koordinat 110°32'40"BT dan 6°49'30"LS di Dukuh Kongsu Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Morodemak antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Alur Pelayaran, Dermaga Bongkar, Dermaga fender, Dermaga perbekalan, Breakwater barat, Breakwater timur, Talud sheet pile, Talud beton, Kapal perikanan, Groin, dan Jalan Kompleks)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Gedung TPI, Kantor TPI, Air bersih, Pos satpolair, Kantor ppp, Tempat perbaikan jaring)
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Areal parkir, Kios, Mushola, MCK, Gapura pintu masuk, Jalan masuk (tanah), Jalan kawasan (tanah), Pagar keliling, Mushola, MCK, Gapura pintu masuk, Jalan masuk (tanah), Jalan kawasan (tanah), Pagar keliling).

5) Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kabupaten Pati

PPP Bajomulyo secara geografis terletak pada koordinat 111°8'30"BT dan 6°42'30" di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Bajomulyo merupakan aset milik pemerintah daerah Kabupaten Pati antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Tanah, Dermaga/Turap, Kolam Pelabuhan, Break Water, Jalan komplek/ paving)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Gedung lelang, Reservoir, Tower, Listrik PLN, Genset, SPBB, SPDN, Sound Sistem).
- Fasilitas Penunjang, meliputi:
 - ✓ Unit I (Gedung Pertemuan, MCK umum, Gudang basket, Pos Jaga, Eks kantor UPBI, Cold storage, Musholla, Ruang genset, Area parkir, Pagar keliling)
 - ✓ Unit II (Gedung lelang, Pasar bangsal, Pengepakan ikan, Listrik PLN, Gedung Basket, MCK, Areal parkir depan tempat lelang, Lampu penerangan dermaga, Gedung pos jaga dan doorlup, Drainase induk, Kios perdagangan umum, Kantor Airud, SSB Pos Jaga, Gapura dan Pagar, Pagar Bangunan Lelang, Kantor pengawasan).

6) Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kabupaten Kebumen

PPP Logending secara geografis terletak pada 111°000'-111°030' BT dan 6°30'-7°00' LS di Desa Pasir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Logending antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Tanah, Dermaga bongkar, Dermaga muat, Kolam Pelabuhan, Break Water, Jalan komplek/paving, Drainase, Talud/Turap)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: TPI (lantai lelang), Tempat Pengepakan, Kantor ADM, Bengkel, SPDN, Tangki air, dan instalasi, Pabrik Es (CBIP), Timbangan, Basket, Kereta Pengangkut Ikan, Tempat perbaikan Jaring, Tempat Jemuran ikan, Listrik, Kantor Syahbandar, Kantor SSB, Telepon, Sound System, Waserda, Pagar keliling)
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Tempat Parkir, MCK, Kantor Perhubungan, Gedung Pelayanan Terpadu, Kantor Polairud, Kantor HNSI, Kantor KUD Mina, Mushola).

PPP Logending mempunyai 2 (dua) sentra pendaratan ikan yaitu :

- a. Sentra Pendaratan Ikan Pasir Kabupaten Kebumen
Sentra Pendaratan Ikan Pasir terletak di Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Adapun fasilitas yang di SPI Pasir antara lain: Rumah mesin, Tempat Parkir, Balai Pertemuan, dan Kantor SAR.
- b. Sentra Pendaratan Ikan Sentolokawat Kabupaten Cilacap
Sentra Pendaratan Ikan Sentolokawat terletak di Jl. Veteran No. 2 Kabupaten Cilacap. SPI Sentolokawat memiliki fasilitas berupa Tempat Pendaratan Ikan, SPDN (Solar Package Dealer Nelayan), dan Tempat Penjemuran Ikan

2. PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) KELAS B

Dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya, Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

UPT PPP Kelas B Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berjumlah 5 (lima) unit yang tersebar di pantai utara dan pantai selatan. Berikut ini adalah gambaran umum PPP yang ada di Provinsi Jawa Tengah:

1) *Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kabupaten Pemalang*

PPP Asemdayong secara geografis terletak pada koordinat 8°53'30"-7°20'11" LS dan 109°17'30"-109°40'30" BT di Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Asemdayong antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Alur, Dermaga bongkar muat, Saluran Drainase dan Turap/Revetment).
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Tanah, Gedung/Kantor TPI, Lantai TPI, Menara Air, SPDN, CBIP, Kios, Instalasi Listrik, Tempat Pengolahan, Tempat Penjemuran ikan).
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai luas, Kantor Satker Pelabuhan luas, Kantor Pos Pengawasan Lanal TNI luas, Pondok Boro Nelayan, Mushola, MCK (kondisi sedang), Kantor Kesehatan Pelabuhan, Warung makan dan kios, Pertokoan, dan Tempat parkir motor).

2) *Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kabupaten Pekalongan*

PPP Wonokerto secara geografis terletak pada koordinat 6°54'16" LS dan 109°42"BT di Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Wonokerto antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Alur, Dermaga bongkar muat, Talud/Turap, Lahan PPI, Jalan Lingkungan, Menara Suar, Kolam Pelabuhan dan Breakwater).
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Tanah, Gedung/Kantor TPI, Lantai TPI, SPDN, Instalasi Listrik, Instalasi Air Bersih, dan Menara Suar).
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Areal Parkir, Tempat Penjemuran Ikan, Tempat Penjemuran Alat Tangkap, Kamar Mandi/WC, Kios/Los Pertokoan, Pondok Boro, dan Mushola).

3) *Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kabupaten Kendal*

PPP Tawang secara geografis terletak pada koordinat 6°55'0,3"LS dan 110°02'49,7"BT di Desa Gempolsari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Tawang antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Break water, Alur Perairan, Dermaga (Tiang tambat labuh, penerangan, penangkis gelombang/talud)).
- Fasilitas Fungsional (meliputi : TPI/lantai lelang, Instalasi listrik, Air bersih (artesis dan PDAM), Kantor, SPDN, Pabrik es curah mini, (*Containerized Block Ice Plant*, Genset, Sound system, Menara suar, Rambu pengaman di muara))
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Areal parker, Kantor Kamladu, Kios ikan, Kamar mandi/WC, Mushola, Pos Jaga).

4) *Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kabupaten Jepara*

PPP Karimunjawa secara geografis terletak pada koordinat 5°51'50"LS dan 110°26'08" BT di Tanjung Benteng Desa/Pulau Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Karimunjawa antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Tanah, Dermaga/Turap, Kolam Pelabuhan, Break Water, Jalan komplek/ paving)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Gedung Kantor, TPI, Gedung Pabrik Es, Bengkel, Resevoir Air Tawar, Genset, Radio SSB)
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Administrator, Mess Operator 3 kopel)/ Renovasi, Mess Operator).

5) *Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kabupaten Tegal*

PPP Larangan secara geografis terletak pada koordinat 6°51'41.530"LS dan 109°11'33.572" BT di Desa Munjung Agung Kec.Kramat, Kab. Tegal. Sebagai salah satu UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 47 Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang Operasional Pelabuhan Dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola Dan Pelayanan Usaha.

3. Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A

Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A (BKIKHP) merupakan gabungan dari dua UPT yaitu Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan (BLPKIL) dan Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPMHP). Terletak di Jl. Siliwangi No.636, Krapyak, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50184.

BKIKHP Kelas A telah memiliki Sertifikat Akreditasi KAN dengan No : LP-1120-IDN yang ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2017 sebagai Laboratorium yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai Laboratorium Penguji dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005) sebagai persyaratan umum untuk kompetensi Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi.

Wilayah kerja Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A meliputi seluruh Jawa Tengah. Jenis layanan di BKIKHP, antara lain;

1. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI).
2. Pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan secara laboratoris.
3. Kegiatan tanggap darurat terkait wabah penyakit ikan
4. Pembinaan dan pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan di 35 Kab/Kota

5. Pembinaan pada Unit Pengolahan Ikan
6. Kesesuaian hasil proses sertifikasi

4. Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A

Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A terletak di Desa Tugu Kecamatan Tugu, Kota Semarang. BIAP Karanganyar memiliki luas tambak 3,4 Ha dan luas bangunan 5.000 m². Fasilitas di BIAP Karanganyar antara lain: Luas lahan produktif berupa 4 petak tambak untuk budidaya; 2 petak kecil tambak untuk pendederan (penampungan air), dengan luas total lahan ± 4 Ha. Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut membawahi 3 (tiga) Loka Budidaya Air Payau, meliputi: Loka Budidaya Ikan Air Payau Maribaya Tegal, Loka Perbenihan Ikan Air Payau Sluke Rembang dan Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Laut Karimunjawa Jepara.

a. Loka BIAP Maribaya Tegal

Loka Budidaya Ikan Air Payau (BIAP) Maribaya berada di Jl. Raya Beringin Km 10 Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Loka Budidaya Ikan Air Payau (BIAP) Maribaya memiliki luas lahan tambak yang produktif ± 18.800 m² yang terdiri dari 5 petakan tambak plastik HDPE, dan 3 petakan tambak tanah lumpur. Tambak ini dimanfaatkan untuk pembesaran udang vanname ukuran konsumsi

b. Loka PIAP Sluke Rembang

Loka Perbenihan Ikan Air Payau (PIAP) Sluke terletak di Desa Jatisari Kecamatan Sluke. Loka PIAP Sluke berdiri di atas tanah seluas 5.751 m² yang dimanfaatkan untuk gedung kantor, hatchery, bak filter air, dll. Fasilitas di Loka BIAP Sluke antara lain:

- 1 (satu) gedung kantor
- 1 (satu) labotarorium pakan alami
- 1 (satu) bak induk udang kapasitas 10 ton
- 2 (dua) bak induk bandeng kapasitas 200 ton
- 1 (satu) bak induk indoor kapasitas 40 ton
- 1 (satu) bak kultur massal plankton outdoor
- 10 (sepuluh) bak beton outdoor kapasitas 8 ton
- 2 (dua) reservoir air laut 100 ton

c. Loka PBIAL Karimunjawa Jepara

Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Laut Karimunjawa Jepara terletak di Pulau Karimunjawa Kabupaten Jepara. Loka PBIAL Karimunjawa memiliki luas lahan sebesar 10.000 m² dan Luas Bangunan sebesar 150 m². Fasilitas di PBIAL Karimunjawa antara lain;

- Hatchery ukuran 5 x 2 m sebanyak 5 bak
- Bak ukuran 2,5 x 2,4 m sebanyak 12 unit
- Bak bulat volume 30 ton sebanyak 1 unit
- Bak bulat volume 15 ton sebanyak 2 unit
- Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 35 petak produksi
- Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 6 petak pembenihan
- Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 10 petak calon induk

- Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 9 petak konsumsi
- d. Loka PBI Ambarawa
- Loka PBI Ambarawa terletak di Jl. Pemuda No. 94 Temanggung Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. Luas lahan Loka PBI Ambarawa adalah 9.150 m² yang terdiri dari 6.000 m² untuk kolam dan 3.150 m² untuk bangunan, antara lain: gedung kantor, hatchery, laboratorium, dan mushola.
- e. Loka PBI Muntilan
- Loka PBI Muntilan terletak di Jl. Kerkof No. 1 Desa Muntilan Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Luas lahan Loka PBI Muntilan adalah 29.000 m² dengan luas kolam 16.127 m² dan luas bangunan 2.554 m². Fasilitas yang ada di Loka PBI Muntilan antara lain: gedung kantor, rumah dinas, asrama, mushola, aula, dan perpustakaan.
- f. Loka PBI Ngrajek
- Loka PBI Ngrajek terletak di Jl. Mayor Kusen Km. 4 Kelurahan Ngrajek Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. Luas area di Loka PBI Ngrajek adalah 5,3 ha. Fasilitas yang ada di Loka PBI Ngrajek antara lain: gedung kantor, asrama, mushola, dan aula.
- Berawal dari nama Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Ngrajek, yang berlokasi di Desa Ngrajek, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan ketinggian 340 meter di atas permukaan air laut. Dibangun pada tahun 1962 dan arealnya diperluas pada tahun 1964 menjadi 5,3 hektar. Sumber air berasal dari 2 (dua) mata air yaitu Mudal dan Combrang, dengan debit 54 liter/dt pada daerah pangkal saluran dan 5 liter/dt pada daerah ujung saluran. Orientasi awal yang tetap menjadi andalan Loka Ngrajek hingga saat ini adalah penyediaan benih ikan air tawar unggul dan tahan penyakit seperti: Tawes, Karper Merah Cangkringan dan Majalaya, Lele (Dumbo, Sangkuriang, dan Phytan), Nila (Hitam dan Merah), Grasscarp, Patin, dan Nilem dan calon induk ikan air serta penyediaan induk unggul ikan lele yang dapat menghasilkan benih unggul dan tahan penyakit. Selain melaksanakan pelayanan penyediaan benih dan induk unggul Loka Ngrajek juga menyediakan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan. Pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, Loka Ngrajek juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:
1. Penelitian;
 2. Magang;
 3. Pelatihan;
 4. Pengembangan broodstock karper dan lele; dan
 5. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.
- g. Loka PBI Janti
- Loka PBI Janti terletak di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Luas Loka Janti adalah 2,84 ha, dengan luas kolam 1,7

ha, bangunan dan ruang terbuka 0,98 ha saluran 0,16 m. Fasilitas yang terdapat di Loka Janti antara lain gedung kantor, asrama, dan mushola.

Loka Janti terletak di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Dibangun pada tahun 1979 di atas lahan seluas 2,89 hektar. Luas kolam 1,7 hektar (60%), bangunan dan ruang terbuka 0,98 hektar (30%) dan saluran 0,21 hektar (10%), dengan ketinggian tempat 203 meter di atas permukaan air laut. Sumber air berasal dari Umbul Nilo dan Umbul Wunut melalui saluran irigasi teknis yang mengalir sepanjang tahun dengan debit berkisar 25-40 l/dt dan kualitas yang cukup baik sehingga ideal bagi kegiatan perbenihan ikan.

Loka Janti memiliki tugas sebagai Pusat Pengembangan Induk Ikan Nila Regional (PPIINR) yang ditetapkan berdasarkan SK. Dirjen Perikanan Budidaya NO. 6378/DPB -1/-PB. 110. D1/12/03 sebagai perpanjangan tangan terhadap Pusat Pengembangan Ikan Nila Nasional (PPIIN) yang berpusat di Sukabumi. Dengan tugas utama memperbaiki mutu genetik untuk induk dan benih ikan nila.

Selain melaksanakan pelayanan penyediaan induk unggul ikan nila, Loka Janti juga menyediakan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan. Pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, Loka Janti juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Magang;
3. Pelatihan;
4. Pengembangan broodstock Nila; dan
5. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

h. Loka PBI Randudongkal

Loka PBI Randudongkal terletak di Jl. Raya Randudongkal - Moga Km. 2 Desa Banjaranyar Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Luas tanah loka PBI Randudongkal adalah 1,5 ha terdiri dari luas bangunan 252 m², luas kolam 6.300 m² dengan jumlah 24 kolam.

i. Loka PBI Singasari

Loka PBI Singasari terletak di Jalan Raya Singasari, Dusun II, Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Luas loka PBI Singasari adalah 2 ha dengan luas kolam 0,5 ha.

Fasilitas yang ada di Loka PBI Singasari antara lain: gedung kantor, asrama, aula, dan mushola.

j. Pos PBI Tambaksogra

Pos PBI Tambaksogra terletak di Jl. Dusun III Tambaksogra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Luas Pos PBI Tambaksogra adalah 2 ha dengan luas kolam 1.2 ha. Sarana dan prasarana yang terdapat di pos PBI Tambaksogra antara lain: gedung kantor, mushola, dan aula.

Pada tahun 2014 tepatnya pada tanggal 26 Februari bernama Loka PBIAT Tambaksogra yang menjadi wilayah kerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar Muntilan Magelang). Kemudian pada tanggal 1 Maret 2018 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.47 tahun 2018 berubah menjadi Loka Tambaksogra dibawah Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A Semarang.

Loka Tambaksogra terletak di Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Memiliki luas tanah 20.000 m² dengan luas bangunan 783 m². Luas kolam 10.680 m² dengan jumlah kolam 26 petak. Menyediakan pelayanan calon induk unggul gurami dan benih ikan air tawar serta pengujian kesehatan ikan dan lingkungan. Pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, Loka Tambaksogra juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Magang;
3. Pelatihan;
4. Pengembangan broodstock Gurame; dan
5. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Indikator kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan selama 5 (lima) tahun terakhir merupakan penjabaran daari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam 2 (dua) Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 dan 2024-2026.

Sasaran strategis Renstra 2018-2023 meliputi:

1. Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan.
2. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan.

Sasaran Strategis Renstra 2024-2026 meliputi :

1. Meningkatnya produksi perikanan
2. Meningkatnya produksi garam
3. Meningkatnya angka konsumsi ikan
4. Meningkatnya nilai tukar nelayan
5. Meningkatnya nilai tukar pembudidaya ikan
6. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berkelanjutan dan partisipatif
7. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat
8. Meningkatnya kualitas pengelolaan Risiko Perangkat Daerah

Selain berdasarkan Sasaran Strategis, kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan juga mengacu pada indikator kinerja tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Kelautan dan Perikanan.

Formulasi pengukuran kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan perbandingan antara realisasi terhadap target kuantitatif sasaran strategis, yaitu terhadap Indikator Kinerja pencapaian sasaran strategis tersebut. *Review* Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	RENSTRA PD TAHUN 2018-2023																			
A.	Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB																			
	Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sector perikanan	Persen	-	-	-	1,20	1,30	1,40	1,5		4,73	-2,30	6,43	4,91		406	100	100	327,33	
B	Terwujudnya Kedaulatan Pangan Sektor Kelautan dan Perikanan																			
	Produksi Perikanan	Ton/Tahun	-	-	-	1.010.738,93	945.678,64	1.018.833,92	1.023.928,09		918.790,37	864.706,75	891.539,49	940.013		90,90	85,30	87,50	91,80	
	Tingkat Konsumsi Ikan Jawa Tengah	Kg/Kap/Th n	-	-	-	33,85	32,05	38,18	37,07		36,21	36,74	38,83	39,38		106,97	114,63	97,56	106,23	
	Produksi Garam	Ton/Tahun	-	-	-	338.742,22	355.679,33	373.463,29	652.969,04		375.074,56	197.623,92	135.792,09	652.969,05		110,73	55,56	36,36	100	
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Angka	-	-	-	106	106	107	108		107,18	112,21	104,86	99,79		101,11	104,87	97,09	92,39	
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Angka	-	-	-	101	101	101	101		109,88	110,09	109,95	110,53		108,79	109	109,95	109,43	
	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan																			

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan																			
	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persen	-	-	-	70	75	75	72		70	75	75	75		100	100	100	100	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah																			
	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	-	-	-	62	64	80	81		82,5	82,5	84,25	87		133,06	121,32	105,31	107,40	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah																			
	Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	-	-	-	69	69,5	80	81		81,3	81,34	83,44	83,55		117,56	117,04	104,30	103,14	
C	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap																			
	Produksi perikanan tangkap	Ton/tahun	-	-	-	496.346,93	497.833	500.322,17	502.823,78		433.277,37	330.293,06	333.361.47	396.079		87,29	66,35	66,29	78,77	
	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	-	-	-	-	-	0,10	0,10		-	-	0,04	0,10		-	-	40	100	
	Program Pengelolaan																			

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Perikanan Budidaya																			
	Produksi perikanan budidaya	Ton/Tahun	-	-	-	514.392	515.932	518.522,75	521.104,31		485.513	516.369,07	533.011,18	543.934		94,39	100,08	102,28	104,38	
	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	-	-	-	-	-	0,20	0,20		-	-	0,20	0,40		-	-	100	200	
	Persentase Peningkatan Produksi Benih	Persen	-	-	-	10	15	2	25		38,13	15	2,5	25		381,3	100	125	100	
	Persentase Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan	Persen	-	-	-	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan																			
	Persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan	Persen	-	-	-	10	15	2	25		3,27	15	7,2	37,61		32,7	100	356	150,44	
	Persentase Peningkatan Dokumen Kelayakan Mutu	Persen	-	-	-	20	15	2	50		0	15	2	72,9		0	100	100	145,8	
	Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																			
	Persentase Peningkatan Produksi Garam	Persen	-	-	-	5	5	0,10	25		5,54	-29,85	0,05	37,99		110,8	-597	50	151,96	
	persentase Kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan	Persen	-	-	-	0	2,5	2,5	17,6		0	2,5	2,5	17,6		0	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	yang efektif																			
	persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan taruna pesisir	Persen	-	-	-	10	1	5	30		0	39,8	5	30		0	398	100	30	
	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya di wilayah selatan Jawa Tengah	Persen	-	-	-	1	1	1	25		1	1	1	38,63		100	100	100	154,52	
	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya di wilayah barat Jawa Tengah	Persen	-	-	-	1	1	1	25		1	1	1	38,63		100	100	100	154,52	
	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya di wilayah timur Jawa Tengah	Persen	-	-	-	0,5	0,5	0,5	25		0,5	0,5	0,57	30,43		100	100	114	121,72	
	Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha wilayah selatan Jawa	Persen	-	-	-	1	1	1	1		1	1	1	1,08		100	100	100	108	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Tengah																			
	Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha wilayah barat Jawa Tengah	Persen	-	-	-	1	1	1	1		1	1	1	1		100	100	100	100	
	Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha wilayah timur Jawa Tengah	Persen	-	-	-	1	1	1	1		1	1	1	1		100	100	100	100	
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		-	-	-															
	persentase jumlah pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang ditindaklanjuti	Persen	-	-	-	2	3	-	-		2	3	2	2		100	100	100	100	
	Persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku di sektor perikanan	Persen	-	-	-	-	-	71	72		-	-	71	72		-	-	100	100	
	Persentase peran aktif kelompok masyarakat	Persen	-	-	-	-	-	40	45		-	-	40	45		-	-	100	100	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	pengawas dalam pengawasan sdkp																			
	persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai selatan Jawa Tengah	Persen	-	-	2	8	6	2	2		8	6	2	2		100	100	100	100	
	persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai barat Jawa Tengah	Persen	-	-	2	8	6	2	2		6	6	2	2		75	100	100	100	
	persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai timur Jawa Tengah	Persen	-	-	2	8	6	2	2		6	6	2	2		75	100	100	100	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat	Persen	-	-	-	100	100	100	100		92,76	100	100	100		92,76	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	daerah																			
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	Persen	-	-	-	100	100	100	100		99,30	100	100	100		99,30	100	100	100	
B	RENSTRA PD TAHUN 2024-2026																			
1	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan																			
	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	Persen								1					1					100
2	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan																			
	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	Persen								108					105					97
3	Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan																			
	Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi	Pesen								0,75					1					100
4	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah																			
	Indeks Reformasi	Angka								82					82					100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Birokrasi (Perangkat Daerah)																			
	PROGRAM																			
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL																			
	Persentase produksi garam	Persen								1					1					100
	Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	Persen								5					5					100
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	Persen								3,7					3,7					100
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	Persen								1,39					2,56					184,17
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	Persen								3,7					3,7					100
	PROGRAM																			

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP																			
	Persentase produksi perikanan tangkap	Persen								5					3,7					74
	Indeks harga yang diterima oleh nelayan	Angka								108,27					101,41					93,66
	Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya	Persen								44,44					44,44					100
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari	Persen								72					72					100
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdayong	Persen								72,72					72,72					100
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto	Persen								81,82					90,91					111,11
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Klidanglor	Persen								70					70					100
	Persentase	Persen								62,62					72,72					116,13

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang																			
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak	Persen								81					81					100
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo	Persen								100					100					100
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung	Persen								100					100					100
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa	Persen								63,63					90,9					142,86
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	Persen								63					63					100
	Persentase ketercapaian	Persen								72					72					100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan																			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA																			
	Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	Persen								100					100					100
	Persentase produksi ikan konsumsi air laut	Persen								5					5					100
	Produksi perikanan budidaya	Ton/Tahun								600.000					554.810,13					92,47
	Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya	Angka								111,27					131,6					118,27
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN																			
	Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	Persen								70					73					104,29
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah	Persen								2					2					100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	kerja Cabdin Wilayah Barat																			
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	Persen								61					61					100
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	Persen								2					0,8					250
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	Persen								61					64,5					105,74
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan	Persen								2					2					100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur																			
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	Persen								61					61					100
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN																			
	Jumlah produksi olahan ikan	Ton								160.000					299.838,50					187,4
	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	Persen								4					4					100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi																			
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Persen								100					100					100
	Persentase tingkat pelayanan umum,	Persen								100					100					100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah																			

2.3.1. Kinerja Pelayanan Sektor Kelautan dan Perikanan

Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah pada Renstra 2018-2023 yaitu “meningkatnya laju pertumbuhan PDRB”, dengan indikator kinerja adalah laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan. Target kinerja pada tahun 2019 sebesar 1% terealisasi 4,42% dengan capaian kinerja 442%, target tahun 2020 sebesar 1,2% dengan realisasi 4,88% dan mendapatkan capaian kinerja 406%, target tahun 2021 sebesar 1,3% terealisasi 1,3% dengan capaian kinerja 100%, target 2022 sebesar 1,4% terealisasi 1,4% dan mendapatkan capaian kinerja 100%.

Dalam mencapai target kinerja pada tujuan Renstra 2018-2023, Dinas Kelautan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah menetapkan beberapa sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Kedaulatan Pangan Sektor Kelautan dan Perikanan
 - 2) Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan
 - 3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah
 - 4) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
-
- 1) Sasaran strategis pertama yaitu Terwujudnya Kedaulatan Pangan Sektor Kelautan dan Perikanan, di implementasikan melalui beberapa program dan kegiatan guna menunjang pencapaian beberapa indikator sasaran strategis dengan penjabaran sebagai berikut:
 - a) Produksi Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki target produksi perikanan tahun 2019 sebesar 857.758,41 ton/tahun, terealisasi sebesar 1.095.042,22 ton/tahun dan mendapatkan capaian kinerja 127,66%. Target produksi perikanan tahun 2020 sebesar 1.010.738,93 ton/tahun, dengan realisasi sebesar 918.790,37 ton/tahun dan mendapatkan capaian kinerja 90,90%. Target produksi perikanan tahun 2021 sebesar 945.678,64 ton/tahun, dengan realisasi sebesar 864.706,75 ton/tahun dan mendapatkan capaian kinerja 85,30%. Target produksi perikanan tahun 2022 sebesar 1.023.928,09 ton/tahun, terealisasi sebesar 866,372.65* ton/tahun dengan capaian kinerja 85,03% dan target produksi perikanan tahun 2023 sebesar 1.023.928,09 ton/tahun.

Capaian produksi perikanan 2020-2023 menghasilkan rata-rata sebesar 97,22%, upaya pencapaian tersebut dilakukan melalui beberapa program penunjang sebagai berikut:

- i) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Target indikator kinerja pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap meliputi persentase pertumbuhan produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan tangkap.

Indikator persentase pertumbuhan produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 memiliki target 0,10% dan terealisasi 0,04% dengan capaian kinerja 40%, pada tahun 2023 memiliki target 0,10%.

Indikator produksi perikanan tangkap memiliki target pada tahun 2019 sebesar 393.150 ton/tahun terealisasi 526.750,22 ton/tahun dengan capaian kinerja 133,98%, pada tahun 2020 sebesar 496.346,93 ton/tahun terealisasi 433.277,37 ton/tahun mendapatkan capaian kinerja 87,29%, pada tahun 2021 memiliki target 2021 sebesar 497.833 ton/tahun terealisasi 330.293,06 ton/tahun dengan capaian kinerja 66,35%, pada tahun 2022 memiliki target sebesar 500.322,17 ton/tahun terealisasi 333.361,47 ton/tahun mendapatkan capaian kinerja 66,29% dan target pada tahun 2023 sebesar 502.823,78 ton/tahun.

Capaian produksi perikanan tangkap sepanjang tahun 2020-2023 menghasilkan rata-rata sebesar 88,48%, upaya guna pencapaian melalui kegiatan pengembangan sarana Pelabuhan perikanan, sosialisasi dan peningkatan kapasitas nelayan serta pemberian bantuan sarana dan prasana penangkapan ikan kepada nelayan. Adapun tidak tercapainya target produksi perikanan tangkap disebabkan oleh penurunan sumber daya ikan di daerah laut Jawa dikarenakan *over exploitation*, serta menurunnya aktivitas penangkapan ikan akibat dari kenaikan BBM pada tahun 2022 dan juga kondisi cuaca yang buruk yaitu musim gelombang yang terjadi cukup lama (musim barat) disertai dengan angin kencang yang menyebabkan nelayan tidak berani melaut karena berisiko tinggi. Produksi perikanan tahun 2024 terealisasi 968.353,80 ton dari target 927.350 ton sehingga persentase realisasi sebesar 104,42%. Komponen penyusun produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap tahun 2024 terealisasi 413.543,67 ton dari target 327.350 ton sehingga persentase realisasi sebesar 126,33%. Realisasi produksi perikanan tangkap melebihi target disebabkan beberapa faktor, yaitu:

- a. Implementasi kebijakan Perikanan Ikan Terukur (PIT) ditunda sampai 31 Desember 2025 sehingga nelayan dapat mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan asal.
- b. Adanya petugas enumerator dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas mendata jumlah ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung, Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor, Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo dan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak.
- c. Cuaca atau iklim pada tahun 2024 relatif aman terkendali sehingga nelayan (kapal besar) dapat melaut untuk menangkap ikan.

Namun terkait belum optimalnya pengelolaan produksi perikanan tangkap terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan:

- a. Masih terbatasnya sarana prasarana dan inovasi teknologi penangkapan ikan yang dimiliki nelayan/kelompok nelayan.
- b. Masih rendahnya kesadaran pengurusan izin perikanan tangkap.
- c. Kondisi overfishing di WPP 712 dan 573 yang menjadi kewenangan provinsi.
- d. Relatif tingginya unreported produksi hasil tangkapan/hasil tangkapan yang tidak dilaporkan atau tercatat.
- e. Masih belum optimalnya pengamanan daerah asuhan ikan (jalur 1a atau 0-2 mil) dari alat tangkap aktif bermesin.

Permasalahan yang dihadapi adalah penerapan peraturan Penangkapan Ikan Terukur memberikan dampak positif dan negatif. Positifnya membuat produksi perikanan tangkap meningkat, disisi lain setelah diwajibkan bongkar muat di pelabuhan pangkalan maka produksi perikanan tangkap di Jawa Tengah akan menurun karena sebagian besar berasal dari wilayah Timur Indonesia atau Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718; terjadinya penurunan SDI di laut Jawa; terjadinya pendangkalan alur dan muara sungai serta kolam pelabuhan yang menghambat keluar-masuk kapal perikanan; infrastruktur dan sarpras pelabuhan yang terganggu air rob maupun yang rusak dan perlu diperbaiki. Upaya mengatasi antara lain mengusulkan kegiatan melalui DAK dengan menu sarpras pelabuhan, penenggelaman terumbu karang buatan, pembuatan rumah ikan, pengusulan pembelian excavator terapung; pemberian hibah alat tangkap yang ramah lingkungan dan dilakukannya gerai-gerai perizinan di lokasi nelayan. Manfaat dari program tersebut adalah terjagannya SDI di Laut Jawa, meningkatnya pelayanan pelabuhan perikanan, meningkatnya retribusi dari sektor penangkapan ikan, terpenuhinya kebutuhan melaut para nelayan, terjaminnya keselamatan kerja nelayan kecil, dan terpenuhinya persyaratan perizinan nelayan.

ii) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Target indikator kinerja pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya meliputi persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya, produksi perikanan budidaya, persentase peningkatan produksi benih, persentase penanganan kasus hama penyakit ikan.

Indikator persentase pertumbuhan perikanan budidaya pada tahun 2022 memiliki target sebesar 0,20% dengan realisasi 0,20% dan mendapatkan capaian kinerja 100% serta target penanaman pada tahun 2023 sebesar 0,10%.

Pada tahun 2020 memiliki target sebesar 514.392 ton/tahun, terealisasi 485.513 ton/tahun mendapatkan capaian kinerja 94,39%. Pada tahun 2021 memiliki target sebesar 515.932 ton/tahun terealisasi 516.369,07 ton/tahun dengan capaian kinerja 100,08%. Pada tahun 2022 memiliki target sebesar 518.522,75 ton/tahun dengan realisasi

533.011,18 dan mendapatkan capaian kinerja 102,28% serta target penanaman pada tahun 2023 sebesar 521.104,31 ton/tahun.

Indikator persentase peningkatan produksi benih pada tahun 2019 memiliki target sebesar 5% terealisasi 37,1% dengan capaian kinerja 742%. Pada tahun 2020 memiliki target sebesar 10%, terealisasi 38,13% mendapatkan capaian kinerja 381,3%. Pada tahun 2021 memiliki target sebesar 15% terealisasi 15% dengan capaian kinerja 100%. Pada tahun 2022 memiliki target sebesar 2% dengan realisasi 2,5% dan mendapatkan capaian kinerja 125% serta target penanaman pada tahun 2023 sebesar 25%.

Indikator Persentase Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan Pada tahun 2020 memiliki target sebesar 100%, terealisasi 100% mendapatkan capaian kinerja 100%. Pada tahun 2021 memiliki target sebesar 100% terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%. Pada tahun 2022 memiliki target sebesar 100% dengan realisasi 100% dan mendapatkan capaian kinerja 100% serta target penanaman pada tahun 2023 sebesar 100%.

Capaian kinerja didukung oleh upaya yang dilakukan antara lain melalui penggunaan induk dan benih unggul dalam proses produksi pembudidayaan ikan, pengendalian hama penyakit ikan, pelaksanaan sertifikasi penerapan Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) serta berkembangnya teknologi perikanan budidaya antara lain teknologi Bioflock.

Produksi perikanan budidaya tahun 2024 terealisasi 554.810,13 ton dari target 600.000 ton sehingga persentase realisasi sebesar 92,47%. Realisasi produksi perikanan budidaya tidak tercapai dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Musim kemarau di Triwulan III dan awal Triwulan IV di beberapa kabupaten/kota yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air untuk kegiatan budidaya.
2. Harga jual ikan di tingkat pembudidaya yang cenderung menurun (komoditas lele) karena masuknya produk perikanan dari luar provinsi dengan harga yang lebih murah, daya beli masyarakat yang cenderung menurun, sehingga mengakibatkan pembudidaya membatasi jumlah tebar ikan untuk menghemat operasional.
3. Terdapat alih fungsi lahan di Kabupaten Kendal yang semula lahan tambak menjadi industri.
4. Terdapat upwelling di Waduk Mulur Kabupaten Sukoharjo yang seharusnya ikan akan di panen di Triwulan IV.
5. Terdapat musibah banjir di Kabupaten Demak pada awal tahun yang mengakibatkan beberapa kolam dan hasil budidaya hanyut.

Permasalahan yang dihadapi adalah musim kemarau di Triwulan III dan awal Triwulan IV di beberapa Kabupaten/Kota yang menyebabkan

berkurangnya ketersediaan air untuk kegiatan budidaya; harga jual ikan di tingkat pembudidaya yang cenderung menurun (komoditas lele) karena masuknya produksi perikanan dari luar provinsi dengan harga yang lebih murah, daya beli masyarakat yg cenderung menurun, sehingga mengakibatkan pembudidaya membatasi jumlah tebar ikan untuk menghemat operasional, terdapat alih fungsi lahan di Kab. Kendal yang semula lahan tambak menjadi industri, terdapat upwelling di Waduk Mulur Kab. Sukoharjo yang seharusnya ikan akan di panen di Triwulan 4, terdapat musibah banjir di Kab. Demak pada awal tahun yang mengakibatkan beberapa kolam dan hasil budidaya hanyut; masih sulitnya pemenuhan persyaratan sertifikasi CPIB, CBIB bagi pembudidaya ikan skala kecil; menurunnya kapasitas loka-loka budidaya dan perbenihan ikan; belum seluruh wilayah Jawa Tengah dapat dimonitor hama dan penyakit ikan secara rutin. Upaya mengatasi dengan mendorong pengembangan pakan mandiri melalui pemberian hibah mesin pembuat pakan; revitalisasi loka-loka budidaya melalui anggaran DAK; pemberian hibah sarpras budidaya; pendampingan sertifikasi CPIB dan CBIB; serta melakukan monitoring hama penyakit ikan secara kolektif. Manfaat dari program tersebut adalah penurunan kasus hama penyakit ikan, meningkatnya kualitas bibit ikan dan optimalnya produksi perikanan budidaya.

b) Tingkat Konsumsi Ikan Jawa Tengah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menetapkan target dalam Renstra 2020-2023 Target tingkat konsumsi ikan Jawa Tengah tahun 2020 sebesar 33,85, dengan realisasi 36,21 dan mendapatkan capaian kinerja 106,97%. Target tingkat konsumsi ikan Jawa Tengah tahun 2021 sebesar 32,05, terealisasi sebesar 36,74 dengan capaian kinerja 110,73%. Target tingkat konsumsi ikan Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 38,18, dengan realisasi sebesar 37,25 dan mendapatkan capaian kinerja 85,03%. Target tingkat konsumsi ikan Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 37,07.

Angka konsumsi ikan di Jawa Tengah tahun 2024 terealisasi 40,12 kg/kap/tahun dari target 40,12 kg/kap/tahun sehingga persentase realisasi sebesar 100%. Realisasi angka konsumsi ikan masih bersifat sementara karena belum di validasi Tingkat nasional. Angka konsumsi ikan di Jawa Tengah tahun 2024 masih berada di bawah target angka konsumsi ikan secara nasional tahun 2024 yaitu sebesar 62,50 kg/kap/tahun. Rendahnya angka konsumsi ikan di Jawa Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: perubahan tren konsumen, keberlanjutan usaha poklhasar dan pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dapat membuat pelatihan kurang relevan dan kurang efektif. Tindak lanjut yang perlu dilakukan diantaranya mengembangkan strategi pemasaran yang komprehensif dan memantau pasar secara aktif, pelatihan diversifikasi olahan hasil perikanan, sosialisasi dan pendampingan pemenuhan persyaratan cara pengolahan ikan yang baik, sosialisasi dan kampanye Gemarikan serta kolaborasi dengan stakeholder terkait.

Capaian tingkat konsumsi ikan Jawa Tengah tahun 2020-2023 menghasilkan rata-rata sebesar 103.31%, upaya pencapaian tersebut dilakukan melalui program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan penjelasan sebagai berikut :

Target kinerja pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan meliputi persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan dan persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu.

Indikator persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan pada tahun 2020 memiliki target sebesar 10% dengan realisasi 3,27% dan mendapatkan capaian kinerja 32,7%, pada tahun 2021 memiliki target sebesar 15%, terealisasi 15% dengan capaian kinerja 100%, pada tahun 2022 memiliki target sebesar 2% dengan realisasi 7,2% dan mendapatkan capaian kinerja 356% serta target pada tahun 2023 sebesar 25%.

Indikator persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu pada tahun 2020 memiliki target sebesar 20% dengan realisasi 0% dan mendapatkan capaian kinerja 0%, pada tahun 2021 memiliki target sebesar 15%, terealisasi 15% dengan capaian kinerja 100%, pada tahun 2022 memiliki target sebesar 2% dengan realisasi 2% dan mendapatkan capaian kinerja 100% serta target pada tahun 2023 sebesar 50%.

Capaian kinerja didukung dengan upaya pencapaian melalui sosialisasi dan peningkatan kapasitas poklaksar, pemberian bantuan sarana dan prasarana poklaksar, pembinaan SKP serta pembinaan penerapan sanitasi dan higienis pada UPI, kampanye Gemarikan dan FORIKAN.

Permasalahan yang dihadapi adalah masih kecilnya unit pengolah ikan yang bersertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) atau cara pengolahan ikan yang baik; masih adanya penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya serta rendahnya konsumsi ikan masyarakat. Adapun upaya mengatasi dengan melakukan pembinaan penerapan GMP kepada unit pengolah ikan skala kecil; dan kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN). Manfaat dari program tersebut adalah meningkatnya daya saing produk perikanan serta peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan.

c) Produksi Garam

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi memiliki target dalam Renstra 2020-2023 pada indikator produksi garam Target produksi tahun 2020 sebesar 338.742,22 ton/tahun, dengan realisasi sebesar 375.074,56 ton/tahun dan mendapatkan capaian kinerja 110,73%. Target produksi garam tahun 2021 sebesar 355.679,33 ton/tahun, terealisasi sebesar 197.623,92 ton/tahun dengan capaian kinerja 55,56%. Target produksi garam tahun 2022 sebesar 373.463,29 ton/tahun, dengan realisasi sebesar 135.792,09 ton/tahun dan mendapatkan capaian kinerja 36,36%. Target produksi garam pada tahun 2023 sebesar 392.136,46 ton/tahun.

Capaian produksi garam sepanjang tahun 2020-2023 menghasilkan rata-rata sebesar 112,155%, upaya pencapaian tersebut dilakukan melalui

program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan rincian sebagai berikut :

Target kinerja pada Program Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi persentase peningkatan produksi garam dengan target target pada tahun 2020 sebesar 5% dengan realisasi 5,54% dan mendapatkan capaian kinerja 110,8%, target pada tahun 2021 sebesar 5% terealisasi -29,85% dengan capaian kinerja -597%, target pada tahun 2022 sebesar 0,10% dengan realisasi 0,05% dan mendapatkan capaian kinerja 50% serta target pada tahun 2023 sebesar 25%.

Guna mendukung pencapaian kinerja dilakukan upaya antara lain melalui sosialisasi dan pengembangan kapasitas kugar, serta pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi garam rakyat. Capaian peningkatan produksi garam sangat dipengaruhi pada faktor cuaca dikarenakan adanya musim kemarau basah, dimana musim kemarau disertai hujan sehingga menyebabkan mayoritas petambak garam hanya memproduksi sedikit garam dan bahkan tidak berproduksi, selain itu terjadinya pandemi Covid-19 dengan aturan pembatasan aktifitas petambak juga menyebabkan produksi garam merosot tajam.

Tingkat produksi garam tahun 2024 terealisasi 629.952,95 ton dari target 133.320 ton sehingga persentase realisasi sebesar 472,51%. Realisasi produksi garam melebihi target memberikan kontribusi produksi garam secara nasional sebesar 31,50%. Faktor yang mendukung tercapainya target yang ditetapkan yaitu adanya dukungan anggaran yang memadai, dukungan instansi terkait di Kabupaten serta peran serta stakeholder terkait. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan kegiatan yaitu adanya keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan peningkatan produksi garam terkait dengan perbaikan atau pembangunan infrastruktur berupa sungai dan irigasi tambak garam serta jalan produksi. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui berkoordinasi dengan instansi terkait yang membidangi infrastruktur, yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana serta dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum di provinsi maupun kabupaten.

d) Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi memiliki target dalam Renstra 2020-2023. Target Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2020 sebesar 106, dengan realisasi sebesar 107,18 dan mendapatkan capaian kinerja 101,11%. Target Nilai Tukar Nelayan tahun 2021 sebesar 106, terealisasi sebesar 112,21 dengan capaian kinerja 104,87%. Target Nilai Tukar Nelayan tahun 2022 sebesar 107, dengan realisasi sebesar 104,86 dan mendapatkan capaian kinerja 97,09% serta target Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2023 sebesar 108. Capaian Nilai Tukar Nelayan sepanjang tahun 2019-2023 menghasilkan rata-rata sebesar 100,50%.

Pada tahun 2024, Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai nilai tertinggi 102,46 pada bulan Maret-April. Namun mengalami penurunan pada bulan Mei dan mencapai titik terendah pada bulan September sebesar 99,67. NTN mengalami peningkatan kembali pada bulan Oktober sampai Desember. NTN bulan Desember tercatat sebesar 101,41.

e) Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi memiliki target dalam Renstra 2020-2023. Target Nilai Tukar Pembudidaya Ikan pada tahun 2020 sebesar 101, dengan realisasi sebesar 109,88 dan mendapatkan capaian kinerja 108,79%. Target Nilai Tukar Pembudidaya Ikan tahun 2021 sebesar 101, terealisasi sebesar 110,09 dengan capaian kinerja 109%. Target Nilai Tukar Pembudidaya Ikan tahun 2022 sebesar 101, dengan realisasi sebesar 109,95 dan mendapatkan capaian kinerja 109,95% serta target Nilai Tukar Pembudidaya Ikan pada tahun 2023 sebesar 101. Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan sepanjang tahun 2019-2023 menghasilkan rata-rata sebesar 109,06%.

Pada tahun 2024 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) cukup fluktuatif dimana nilai tertinggi mencapai 107,45 pada bulan November. Nilai NTPi terendah tercatat sebesar 100,79 pada bulan Mei. Pada Bulan Januari NTPi (107,26) mengalami penurunan sampai dengan bulan Mei kemudian mengalami peningkatan pada bulan Juni sampai Desember. NTPi bulan Desember tercatat sebesar 107,34.

2) **Sasaran strategis kedua yaitu** “Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan” diimplementasikan melalui beberapa program dan kegiatan guna menunjang pencapaian beberapa indikator sasaran strategis dengan penjabaran sebagai berikut:

a) Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki target persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. target pada tahun 2020 sebesar 70%, dengan realisasi sebesar 70% dan mendapatkan capaian kinerja 100%, target pada tahun 2021 sebesar 75%, terealisasi sebesar 75% dengan capaian kinerja 100%, target pada tahun 2022 sebesar 75%, dengan realisasi sebesar 75% dan mendapatkan capaian kinerja 100% serta target pada tahun 2023 sebesar 72%.

Capaian persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tahun 2020-2023 menghasilkan rata-rata sebesar 100%, upaya pencapaian tersebut dilakukan melalui program sebagai berikut:

i) Program Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut

Target kinerja pada Program Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut meliputi persentase kawasan konservasi yang ditata menuju

pengelolaan yang efektif, persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan taruna pesisir, persentase peningkatan luas kawasan mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya dan persentase peningkatan verifikasi perizinan unit usaha.

Indikator persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif memiliki Target pada tahun 2021 sebesar 2,5% dengan realisasi 2,5% dan mendapatkan capaian 100%. Target pada tahun 2022 sebesar 2,5%, terealisasi 2,5% dengan capaian kinerja 100%, dan target pada tahun 2023 sebesar 17,6%. Upaya guna pencapaian target kinerja meliputi pelaksanaan koordinasi, fgd serta updating RZWP3K.

Indikator persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan taruna pesisir memiliki Target pada tahun 2021 sebesar 1% dengan realisasi 39,8% dan mendapatkan capaian 398%. Target pada tahun 2022 sebesar 5%, terealisasi 5% dengan capaian kinerja 100%, dan target pada tahun 2023 sebesar 30%. Upaya pencapaian target kinerja meliputi pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Indikator persentase peningkatan luas kawasan mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya pada tahun 2020-2022 Cabang Dinas Kelautan (CDK) Wilayah Selatan dan CDK Wilayah Barat memiliki target sebesar 1%, terealisasi 1% dengan capaian kinerja 100%. Sedangkan pada CDK Wilayah Timur pada tahun 2020-2022 memiliki target sebesar 0,5%, pada tahun 2019-2021 terealisasi 0,5% dengan capaian kinerja 100%, pada tahun 2022 terealisasi 0,57% mendapatkan capaian kinerja 114%. Pada tahun 2023 seluruh CDK memiliki target sebesar 25%. Upaya guna pencapaian target kinerja meliputi pelaksanaan sosialisasi ekosistem mangrove, penanaman mangrove, penanaman cemara laut dan mangrove for education.

Permasalahan yang dihadapi antara lain kesulitan pemilihan lokasi penanaman mangrove dengan status tanah negara yang bisa ditanami; lokasi penanaman mangrove yang belum siap untuk ditanam bibit mangrove; dan jenis tanah yang sesuai untuk penanaman mangrove. Upaya mengatasi dengan melakukan koordinasi dengan stakeholder yang menangani mangrove, membuka kesempatan CSR penanaman mangrove pada perusahaan; perencanaan dan persiapan penanaman lebih awal untuk mengatasi lahan yang tidak siap ditanami dan mencari lokasi yang cocok untuk jenis-jenis mangrove. Manfaat dari program tersebut adalah peningkatan produktivitas garam rakyat dan menaikkan daya dukung serta menanggulangi kerusakan ekosistem pesisir.

Indikator persentase peningkatan verifikasi perizinan unit usaha seluruh CDK pada tahun 2020-2023 memiliki target sebesar 1%, dengan realisasi pada tahun 2020-2023 1% dan mendapatkan capaian kinerja 100%. Upaya guna pencapaian target kinerja meliputi pelaksanaan sosialisasi perijinan, pendampingan pengurusan ijin dan penerbitan rekomendasi teknis.

- ii) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan persentase jumlah pelanggaran pengelolaan

Target kinerja pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan meliputi persentase jumlah pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang ditindaklanjuti, persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di sektor perikanan, persentase peran aktif kelompok masyarakat pengawas dalam pengawasan sdkp.

Indikator persentase jumlah pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang ditindaklanjuti target pada tahun 2020 sebesar 2% dengan realisasi 2% dan mendapatkan capaian kinerja 100%, target pada tahun 2021 sebesar 3% terealisasi 3% dengan capaian kinerja 100%. Pada tahun 2022 indikator ini berubah menjadi persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di sektor perikanan dan persentase peran aktif kelompok masyarakat pengawas dalam pengawasan sdkp.

Indikator persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di sektor perikanan memiliki target pada tahun 2022 sebesar 71% dengan realisasi 71% dan mendapatkan capaian kinerja 100% serta target pada tahun 2023 sebesar 72%. Indikator persentase peran aktif kelompok masyarakat pengawas dalam pengawasan sdkp memiliki target pada tahun 2022 sebesar 40% dengan realisasi 40% dan mendapatkan capaian kinerja 100% serta target pada tahun 2023 sebesar 45%. Capaian indikator program tersebut sepanjang tahun 2019-2023 menghasilkan rata-rata sebesar 100% melalui dukungan pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pemulihan sumberdaya perikanan dan kelautan.

Realisasi persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR) I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan tahun 2024 sebesar 62% sehingga persentasenya sebesar 100% atau kategori sangat tinggi. WPPNR I yang dipantau dari kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) telah dilakukan di dua WPP yang ada di Jawa Tengah yaitu WPP 712 laut Jawa di wilayah pantura (pantai Utara dari Kab. Brebes sampai Kab. Rembang) dan WPP 573 Samudera Hindia di wilayah Pantai Selatan (pantai Selatan Kab. Wonogiri sampai Kab. Cilacap). Pengawasan selain dilakukan oleh aparat pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan juga dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

Permasalahan dalam Kegiatan Pengawasan SDKP sampai dengan 12 mil dan kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah

Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah di Jawa Tengah adalah:

1. Masih belum optimalnya pengelolaan perizinan berusaha pada sektor kelautan dan perikanan khususnya kategori Mikro dan Kecil, meskipun perizinan berusaha tersebut bisa terbit otomatis.
2. Belum optimalnya Pengawasan perizinan berusaha berbasis Resiko sektor Kelautan dan perikanan pasca diundangkannya Undang – Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Hal ini dengan masih banyaknya penggunaan alat penangkapan ikan (API) yang tidak ramah lingkungan / yang dilarang seperti arad (mini trawl), bolga / purse seine waring, sodo (push net) dengan kapal dan alat penangkap ikan jenis garuk kerang yang masih banyak beroperasi di jalur Ia, sehingga potensi konflik antar nelayan masih banyak terjadi, potensi konflik semakin tinggi pasca diterbitkannya Permen KP nomor 36 tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat.
4. Masih adanya penggunaan formalin sebagai bahan tambahan pengawet produk perikanan terutama pada produk kering.
5. Belum adanya regulasi level daerah tentang Pengenaan Sanksi Administratif.

Pemecahan masalah dalam kegiatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan SDKP di Jawa Tengah adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam percepatan, pertukaran data dan informasi tentang perizinaan berusaha berbasis resiko dan termasuk kegiatan Pengawasannya.
2. Optimalisasi kearifan lokal terhadap penggunaan alat ramah lingkungan dan Sosialisasi larangan penggunaan alat penangkapan ikan dan ketaatan pelaku usaha kelautan dan Perikanan terhadap perundangan yang berlaku dengan penegasan tentang sanksi pidana terhadap ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku.
3. Optimalisasi sosialisasi dan pengawasan larangan penggunaan formalin mulai dari dalam proses penanganan ikan diatas kapal, unit pengolahan ikan hingga ke pasar – pasar tradisional yang menjual hasil perikanan serta melakukan kooordinasi antar provinsi karena disinyalir produk yang mengandung formalin bersal dari provinsi tetangga.

4. Optimalisasi patroli pengawasan di laut terhadap usaha penangkapan ikan dengan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Optimalisasi Pokmaswas dalam membantu kegiatan pengawasan pengelolaan SDKP berbasis masyarakat.
6. Membangun sinergi antar Pemerintah Pusat – Provinsi dan Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Segera menyusun regulasi di level provinsi terkait Pengawasan dan Peneleaan Sanksi Administratif.

Permasalahan yang dihadapi adalah jumlah operasi kapal pengawasan terbatas; masih ditemukan penggunaan alat penangkap ikan destruktif dan konflik antar nelayan. Adapun upaya mengatasi dengan mengoptimalkan hari operasi kapal pengawasan yang terbatas dengan menargetkan wilayah rawan pelanggaran; peningkatan operasi penggunaan alat tangkap destruktif dan mengadakan Perjanjian Kerjasama (PKS) antar provinsi perbatasan untuk mengurangi potensi konflik. Manfaat dari program tersebut antara lain terjaganya ekosistem laut, perairan umum daratan, sumber daya ikan serta mutu dan keamanan hasil perikanan, menurunnya pelanggaran peraturan, berkurangnya konflik nelayan serta terbangunnya sinergi dan kerjasama antar provinsi.

- 3) **Sasaran ketiga** yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah, diimplementasikan melalui pencapaian indikator Nilai Kepuasan Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki Target Nilai Kepuasan Masyarakat tahun 2020 sebesar 62, terealisasi sebesar 82,5 dengan capaian kinerja 133,06%. Target Nilai Kepuasan Masyarakat tahun 2021 sebesar 64, terealisasi sebesar 82,5 dengan capaian kinerja 121,32%. Target Nilai Kepuasan Masyarakat tahun 2022 sebesar 80, terealisasi sebesar 84,25 dan mendapatkan capaian kinerja 105,31% serta target Nilai Kepuasan Masyarakat tahun 2023 sebesar 81.

- 4) **Sasaran keempat** yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, diimplementasikan melalui pencapaian indikator Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut :

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki target Nilai SAKIP Target Nilai SAKIP tahun 2020 sebesar 69, terealisasi sebesar 81,3 dengan capaian kinerja 117,56 %. Target Nilai SAKIP tahun 2021 sebesar 69,5, terealisasi sebesar 81,34 dengan capaian kinerja 117,04%. Target Nilai SAKIP tahun 2022 sebesar 80, terealisasi sebesar 83,44 dan mendapatkan capaian kinerja 104,30% serta target Nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 81.

Capaian Nilai Kepuasan Masyarakat dan Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2020-2023, upaya pencapaian tersebut dilakukan melalui program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Target kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah meliputi Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah serta Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD.

Indikator Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah pada tahun 2020 sampai 2023 memiliki target 100% dan terealisasi 92,76 pada tahun 2020 dengan capaian 92,76% dan terealisasi 100% pada tahun 2021 dan 2022 dengan capaian 100%.

Indikator Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD pada tahun 2020 sampai 2023 memiliki target 100% dan dengan Tingkat realisasi 99,30% pada tahun 2020 dengan Tingkat capaian 99,30% dan realisasi 100% pada tahun 2021 dan 2022 dengan capaian 100%.

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Uraian **)	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp.000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Pendapatan						9.900.000	10.683.550	12.768.000	13.950.000	14.025.000	14.579.538	14.444.412	16.717.690	21.016.161	17.931.810	147,27	135,20	130,93	150,65	127,86	7,74	7,42
Belanja	102.851.000	109.264.500	116.228.000	121.989.000	102.522.285	79.581.156	142.242.398	120.179.610	118.343.957	112.793.854	74.597.943	118.176.526	108.286.797	115.638.783.594	110.689.157	93,74	83,08	90,10	97,71	98,13	7,30	3,95
Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah bersumber dari Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang meliputi Penerimaan Penjualan Produksi Balai Benih dan Penerimaan Penjualan Produksi Es Batu; Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Sewa Alat Berat, Sewa Workshop/Bengkel, Sewa Rumah Dinas, Sewa Gedung/Ruang/Aula/Asrama, Sewa Laboratorium, Sewa Lahan, Pas Masuk dan Sewa Tambah Labuh; serta Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan. Capaian Pendapatan Asli Daerah untuk sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2020 sampai dengan 2024 melebihi target yang ditetapkan masing masing sebesar 147,27% pada tahun 2020; 135,20% pada tahun 2021; 130,93% pada tahun 2022; 150,65% pada tahun 2023; 127,86% pada tahun 2024.

- **Belanja Daerah**

Belanja daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi Belanja Tidak Langsung yang digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS. Sedangkan Belanja Langsung digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan operasional serta pembangunan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Rasio Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung tahun 2020-2024 berturut-turut sebesar 93,74%; 83,08%; 90,10%; 97,71%; 98,13%. Adanya pegawai yang memasuki masa purna tugas serta silpa pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus yang tidak dapat dioptimalkan, serta rasionalisasi anggaran menyebabkan rasio Belanja tidak terserap 100, sehingga hal tersebut mempengaruhi capaian kinerja anggaran.

2.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan dan ketahanan pangan. Penentuan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menjadi awal dalam merumuskan isu-isu strategis. Isu-isu strategis tersebut akan sangat membantu dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan 5 (lima) tahun ke depan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, sasaran dan pendanaan indikatif pun akan lebih reliable berdasar pada identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Proses identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, didasarkan pula pada evaluasi terhadap capaian/kondisi saat ini, standar yang digunakan, faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi, sehingga akan muncul permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun ke belakang.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah antara lain :

1. Belum optimalnya produksi perikanan (perikanan tangkap dan perikanan budidaya) dan produksi garam rakyat dikarenakan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi serta kurang efisiennya sistem distribusi logistik ikan Jawa Tengah.
2. Menurunnya daya dukung lingkungan dan kerusakan ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun).
3. Masih rendahnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4. Masih tingginya resiko usaha, belum adanya jaminan usaha kelautan dan perikanan, serta belum optimalnya perlindungan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha perikanan dan pergaraman;
5. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui diversifikasi pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan pangan;

Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Menurunnya Pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap	Masih terbatasnya sarana prasarana dan inovasi teknologi penangkapan ikan yang dimiliki nelayan/keompok nelayan
			Masih rendahnya kesadaran pengurusan izin perikanan tangkap
			Kondisi overfishing di WPP 712,573 yang menjadi kewenangan provinsi
			Relatif tingginya unreported produksi hasil tangkapan / Hasil tangkapan yang tidak dilaporkan atau tercatat
			Masih belum optimalnya pengamanan daerah asuhan ikan (jalur 1a atau 0-2 mil) dari alat tangkap aktif bermesin
			Belum terpenuhinya kebutuhan pangan biru dari ikan hasil tangkapan
		Belum optimalnya pelayanan pelabuhan perikanan pantai kewenangan provinsi	Masih terbatasnya sarana prasarana pelabuhan perikanan pantai
			Belum optimalnya penerapan SOP Kepelabuhan perikanan di PPP
			Kurangnya jumlah SDM dan masih rendahnya kompetensi SDM yang ada di PPP
			Masih rendahnya kesadaran nelayan mengurus izin perikanan tangkap, yang menyebabkan nelayan dan kapalnya tidak terlayani oleh pelabuhan perikanan, tidak bisa diterbitkan SLO dan PB, tidak bisa mendapatkan rekomendasi pembelian BBM Subsidi
			Belum optimalnya pelayanan operasional kapal perikanan dan kesyahbandaran pada pelabuhan perikanan kewenangan provinsi, seperti belum adanya sarana radio komunikasi dengan kapal beserta operatornya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum optimalnya kegiatan patroli dilaut sebagai kontrol kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundangan yang berlaku
		Masih rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan	Belum optimalnya jaminan perlindungan nelayan (perlindungan jiwa dan usaha)
			Budaya bagi hasil yang tidak proporsional
			Kurangnya akses permodalan sehingga nelayan masih tergantung dengan pengijon
			Kurangnya keterampilan dan kompetensi Nelayan
			Terbatasnya industri pengolahan di kawasan pelabuhan perikanan yang bersinergi dengan proses produksi untuk meningkatkan nilai produk hasil perikanan
			Budaya sosial dan pengelolaan ekonomi masyarakat nelayan yang cenderung konsumtif kondisional
			Tingginya biaya perbekalan terutama Bahan Bakar Minyak sebagai salah satu komponen terbesar dari biaya produksi kegiatan penangkapan ikan
			Sistem pembayaran dari bakul/ perusahaan yang tidak lancer
		Belum optimalnya produksi perikanan budidaya	Terbatasnya ketersediaan kualitas dan kuantitas benih dan induk unggul
			Tingginya biaya produksi , Harga pakan cenderung naik tidak diiringi dengan kenaikan harga jual ikan
			Kurang memadainya sarana dan prasarana perikanan budidaya
			Keterbatasan akses pasar terhadap hasil produksi
			Belum optimalnya perkembangan sentra sentra produksi perikanan budidaya/kawasan/kampung perikanan budidaya
			Belum optimalnya adopsi dan inovasi teknologi adaptif perikanan budidaya
			Menurunnya daya dukung lahan dan perikanan budidaya
			Berkurangnya luasan lahan perikanan budidaya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Rendahnya penerapan prinsip-prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik, Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik
			Terjadinya perubahan iklim yang ekstrim
			Terbatasnya akses permodalan usaha perikanan budidaya
			Terjadinya kematian massal ikan
			Rendahnya pengetahuan dan keterampilan teknis pembudidaya ikan
			Rendahnya kesadaran pembudidaya ikan dalam pengurusan perizinan kegiatan usaha budidaya ikan
			Belum terpenuhinya kebutuhan pangan biru dari perikanan budidaya
		Masih tingginya Kasus Hama Penyakit Ikan	Menurunnya kualitas perairan akibat pencemaran (industry, rumah tangga, akibat perubahan zona peruntukan budidaya)
			Perubahan cuaca yang ekstrim
			Penggunaan benih yang tidak standar/SPF (Specific Pathogen Free)/SPR (Specific Pathogen Resistant)
			Rendahnya pengetahuan terkait dengan hama dan penyakit ikan bagi pembudidaya ikan
			Penggunaan Obat Ikan yang belum terdaftar KKP
		Belum optimalnya kualitas dan kuantitas hasil olahan ikan	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang mutu produk perikanan dan cara pengolahan/penanganan ikan yang baik
			Kurangnya kompetensi pengolah hasil perikanan
			Terbatasnya sarana prasarana dan inovasi teknologi pengolah hasil perikanan
			kurang optimalnya fungsi jejaring pemasaran antar pelaku usaha
			Kurang optimalnya peta logistik dan rendahnya pemantauan distribusi olahan ikan
			Kurangnya akurasi data unit pengolah ikan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Rendahnya kesadaran UPI dalam menerapkan sistem jaminan mutu
			Rendahnya pemahaman UPI dalam memenuhi persyaratan system jaminan mutu
			Rendahnya minat UPI dalam menerapkan SNI bagi produk perikanan
			Terdapat beberapa produk olahan hasil perikanan yang mengandung bahan kimia berbahaya
			Belum adanya penentuan standar baku dalam penentuan kelas kelompok pelaku usaha perikanan
		Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan kelautan dan perikanan	Masih rendahnya kesadaran pemenuhan perizinan berusaha perikanan tangkap
			Masih rendahnya kesadaran pemenuhan perizinan berusaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
			Masih rendahnya kesadaran pemenuhan perizinan pemanfaatan ruang laut
			Masih rendahnya kesadaran pemenuhan perizinan berusaha perikanan budidaya
			Masih kecilnya angka penanganan kasus pelanggaran peraturan perundangan kelautan dan perikanan
			Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan perikanan
			Masih tingginya kasus konflik antar nelayan
			Masih rendahnya cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP
			Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi penggunaan alat tangkap yang sesuai dengan aturan yang berlaku
		Rendahnya produktivitas garam rakyat	Minimnya penerapan dan akses teknologi produksi oleh petambak garam dalam meningkatkan kualitas garam
			Masih belum memadainya saluran irigasi dan jalan produksi tambak

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			garam
			Masih terbatasnya kemampuan petambak garam dalam mengakses peningkatan kompetensi
		Masih Rendahnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Masih adanya kesenjangan gender pada SDM usaha perikanan
			Budaya patriarki yang lebih mendominasi peran laki-laki sebagai pencari nafkah sehingga peran di luar rumah diprioritaskan untuk laki-laki sehingga akses perempuan menjadi rendah untuk ikut berpartisipasi
			Masih rendahnya kualitas SDM masyarakat pesisir dalam pengembangan potensi pesisir
			belum optimalnya kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan
		Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (abrasi, mangrove dan terumbu karang).	Tidak seimbangnya upaya rehabilitasi dan laju kerusakan kawasan pesisir dan laut
			Belum tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan terkait RZWP3K yang telah diintegrasikan dengan RTRW
			Belum terkelolanya kawasan konservasi perairan secara efektif, terstruktur dan sistematis
			Masih terbatasnya data potensi kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil di Jawa Tengah yang faktual dan terkini
			Masih terbatasnya pengetahuan pelaku usaha mengenai mekanisme perijinan pemanfaatan ruang laut
			Masih adanya ketidaksesuaian rencana pemanfaatan ruang laut dengan alokasi ruang laut, adanya penyimpangan lokasi usaha dari izin pkprl serta minimnya informasi dampak sosial dan lingkungan
		Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil	Adanya Kerusakan Habitat Mangrove, terumbu karang, dan padang lamun
			Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ekosistem laut dan pesisir
			Adanya dampak perubahan iklim
			Minimnya pengelolaan sampah plastik
			Terjadinya pencemaran laut dan sedimentasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya pengelolaan kawasan konservasi	Kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi
			Kurangnya sarpras pengelolaan kawasan konservasi
			Kurangnya ketersediaan data dan informasi neraca sumber daya laut konservasi
			Kurangnya jumlah SDM pengelola kawasan konservasi yang kompeten
			Belum maksimalnya upaya pengawasan di kawasan konservasi
			Penerapan SOP terkait pengelolaan kawasan konservasi masih kurang maksimal

2.5. Isu Strategis Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan yang menjadi kewenangan daerah.

Dengan demikian, tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Renstra yaitu “Meningkatkan pertumbuhan PDRB dan kualitas ekosistem kelautan dan perikanan” mempunyai keterkaitan dalam mendukung sasaran daerah yang pertama yaitu : “perwujudan perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dalam kerangka Jateng Makmur melalui Transformasi Ekonomi.

Pertumbuhan PDRB Subsektor perikanan Jawa Tengah yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh tingkat produktivitas sektor-sektor perikanan yang belum optimal, serta belum memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam sebagai sumber produksi. Oleh karena itu, isu ke depan adalah bagaimana mewujudkan sektor perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan melakukan transformasi ekonomi untuk memperkuat perekonomian daerah Jawa Tengah. Transformasi ekonomi dilakukan dengan mendorong pertumbuhan produksi sektor perikanan meliputi produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, industri pengolahan. Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global. Transformasi ekonomi tersebut dilakukan dengan menerapkan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi yang menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal yang lebih hijau (*green investment*), infrastruktur hijau, dan pekerjaan yang ramah lingkungan (*green jobs*) untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Ekonomi biru menjadi strategi yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian ekosistem.

Transformasi ekonomi akan tercapai juga apabila didukung dengan kondisi lingkungan wilayah yang kondusif yang akan menjamin lancar dan amannya semua pihak dalam proses pembangunan ekonomi Jawa Tengah, dengan mengacu Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044. Serta mengacu peruntukan ruang dalam

wilayah provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Disamping itu masih rendahnya pertumbuhan ekonomi subsector perikanan disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. **Rendahnya kesejahteraan masyarakat pesisir** karena kompetensi dan keterampilan rendah/belum memadai, bagi hasil tidak proporsional, praktik ijon, akses permodalan terbatas, jaminan perlindungan nelayan belum optimal, serta dekat dengan kemiskinan;
2. **Cenderung menurunnya produksi perikanan tangkap** karena *overfishing* di wilayah pengelolaan perikanan, *overcapacity* di Pelabuhan perikanan, *unreported* hasil tangkapan serta minimnya teknologi penangkapan ikan;
3. **Belum optimalnya produksi perikanan budidaya** dikarenakan tingginya harga pakan, rendahnya teknologi, wabah penyakit, menurunnya kualitas benih dan induk, serta kurang memadainya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
4. **Menurunnya daya dukung pesisir** karena abrasi, alih fungsi lahan, perubahan iklim, minimnya pengetahuan stakeholder dalam pengawasan, belum optimalnya pengelolaan ruang laut, serta ketidaksesuaian antara rencana pemanfaatan dengan alokasi ruang laut;
5. **Masih rendahnya produksi dan kualitas garam rakyat** dikarenakan rendahnya kompetensi petambak garam dan teknologi produksinya, serta belum adanya perlindungan terhadap komoditas dan harga garam;
6. **Rendahnya Angka Konsumsi Ikan** dikarenakan rendahnya kompetensi, kurang terkontrolnya jaminan mutu, kurang kesadaran konsumsi ikan masyarakat, serta belum terbentuknya jejaring pemasaran antar pelaku usaha.
7. **Belum optimalnya perlindungan usaha** sehingga masih rendahnya daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.
8. **Belum optimalnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan** dikarenakan minimnya upaya pemberantasan dan penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, fasilitas dan sarpras pendukungnya, dan teknologi pengawasan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kelautan dan perikanan di Jawa Tengah memiliki potensi atau tantangan yang akan dihadapi oleh perangkat daerah ke depan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Identifikasi isu strategis pada kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Tengah memperhatikan lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang mempengaruhi perangkat daerah langsung maupun tidak langsung. Rumusan isu strategis disajikan dalam table 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1. Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya 2. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil 3. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 4. Pengawasan dan penegakan hukum aktivitas perikanan	1. Belum optimalnya pengelolaan produksi perikanan (tangkap, budidaya dan garam), perbaikan sistem distribusi, ketersediaan sarana dan prasarana; 2. Masih tingginya resiko usaha dan belum adanya jaminan usaha kelautan dan perikanan; 3. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan	1. Ancaman keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup 2. Produktivitas, daya saing dan keberlanjutan sektor unggulan ekonomi masih relatif rendah 3. Belum optimalnya penuntasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif 4. Belum Optimalnya Tata Kelola	1. Sumber Daya Kelautan 2. Produksi dan konsumsi berkelanjutan 3. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan 4. Produksi dan konsumsi berkelanjutan 5. Infrastruktur 6. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja 7. Gender 8. Pendidikan 9. Kemiskinan	1. Isu Ekonomi : rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi 2. Isu sosial: kemiskinan menuju nol persen, akses dan kualitas belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan social	1. Ekonomi 2. Sarpras 3. Politik dan Tata Pemerintahan 4. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan 2. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Ketahanan pangan yang berkelanjutan 4. Tata kelola pemerintahan yang dinamis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	jaminan keamanan pangan; 4. Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun).	Pemerintah yang Akuntabel dan Berbasis Teknologi Informasi		3. Isu tata kelola pemerintahan: pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas 4. Isu kesinambungan pembangunan: konsistensi perencanaan penganggaran, konsisten perencanaan pusat daerah, kapasitas pembiayaan terbatas		

2.5.1 Peluang Dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan

Dari uraian sebelumnya maka dapat dilakukan identifikasi terhadap tantangan dan peluang dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Jawa Tengah guna menghasilkan kebijakan dan strategi yang tepat, dengan uraian sebagai berikut :

a. Tantangan

Tantangan (*threat*) adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah:

- (1) Terjadinya penurunan stok sumber daya ikan, khususnya di WPP 723 (Laut Jawa) dikarenakan tingginya tekanan terhadap sumberdaya alam kelautan dan perikanan, terutama pencemaran yang bermuara ke laut dan fenomena *overfishing* serta degradasi lingkungan (mangrove, terumbu karang) dan penurunan mutu perairan;
- (2) Masih adanya praktik *Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing* terutama tingginya produksi perikanan yang tidak tercatat/terlaporkan;
- (3) Semakin ketatnya persaingan pasar perikanan dan kelautan serta tuntutan penyediaan produk berdaya saing dan berkelanjutan bertolak belakang dengan masih rendahnya daya saing dan tingkat pendapatan pelaku usaha (UKM) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta kurangnya nilai tambah produk pengolahan perikanan di Jawa Tengah;
- (4) Keterbatasan bahan baku dan belum meratanya distribusi ikan untuk konsumsi dan pemenuhan bahan baku industri;
- (5) Isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14000), isu tenaga kerja, isu *responsible fisheries* dan isu keamanan pangan dan penerapan bea masuk produk perikanan di beberapa negara mengurangi daya saing produk perikanan Indonesia;
- (6) Minimnya akses permodalan bagi usaha kelautan dan perikanan;
- (7) Tidak seimbangnya luas dan jangkauan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sarana prasarana serta personel pengawas perikanan;
- (8) Tingginya harga pakan ikan dan semakin banyaknya dokumen kapal perikanan dikarenakan adanya perubahan regulasi;
- (9) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur sektor kelautan dan perikanan, seperti infrastuktur pelabuhan, pabrik pakan, gudang garam;

- (10) Masih adanya kebijakan lintas instansi/lembaga yang belum sinkron bahkan kontra produktif;
- (11) Kemiskinan berkepanjangan secara struktural dan kultural terutama di desa nelayan;
- (12) Peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan yang belum merata;
- (13) Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal dalam mendukung pelayanan, antara lain : pelayanan rekomendasi Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), Rekomendasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Pengolahan, rekomendasi ijin lokasi, rekomendasi ijin pengelolaan perairan pesisir, rekomendasi ijin reklamasi, rekomendasi ijin budidaya ikan, rekomendasi ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan.

b. Peluang

Peluang (*opportunity*) adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas dalam kurun waktu tiga tahun mendatang. Peluang-peluang (*opportunity*) tersebut antara lain :

- (1) Dukungan dan komitmen Pemerintah dalam kebijakan sektor kelautan dan perikanan semakin besar;
- (2) Adanya payung hukum perlindungan pelaku usaha kelautan dan Perikanan serta payung hukum penyelenggaraan usaha kelautan dan perikanan di Jawa Tengah;
- (3) Adanya lembaga pemerintahan yang menangani sampai tingkat Kabupaten/Kota yang didukung *stakeholders*, termasuk di dalamnya kekayaan/Aset Barang Daerah dalam lingkup Kelautan dan Perikanan;
- (4) Efektifitas dan efisiensi pemakaian anggaran APBD.
- (5) Dukungan permodalan oleh pemerintah, swasta dan perbankan dengan bentuk kredit murah dan pola kemitraan;
- (6) Kelembagaan nelayan, pembudidaya, petambak garam, pengolah dan pemasar semakin berkembang;
- (7) Kualitas sumberdaya manusia perikanan dan kelautan yang berbasis Gender semakin meningkat dan bertambah;
- (8) Pemanfaatan dan pengawasan sumberdaya alam yang optimal dan bertanggungjawab;
- (9) Peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- (10) Peningkatan kapasitas melalui inovasi teknologi, modal, pasar, penentuan kawasan dan sinkronisasi kebijakan;
- (11) Pelayanan berbasis teknologi informasi. akan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, dan murah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan Dan Perikanan

A. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan menangani isu strategis daerah yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai.

Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang akan dicapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan Pelayanan : “Meningkatkan Pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan” dengan indikator pertumbuhan sub sektor perikanan (persen) dan persentase luasan mangrove yang berkualitas baik (persen).
2. Berkaitan dengan kesekretariatan : “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis” dengan indikator tujuan indeks reformasi birokrasi perangkat daerah (angka).

B. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga tujuan dapat dijabarkan lebih dari satu sasaran.

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi perikanan, dengan indikator sasaran: produksi perikanan (ton/tahun), produksi garam (ton/tahun);
2. Meningkatnya luasan mangrove yang direhabilitasi, dengan indikator sasaran: persentase luasan mangrove yang direhabilitasi;
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah, dengan indikator sasaran: indeks manajemen risiko perangkat daerah;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, dengan indikator sasaran: indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan		Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	1,5	1	1	2	2,1	2,2	2,2	2,4	2,4
			Persentase Luasan Mangrove Yang Berkualitas Baik	%	N/A	N/A	66,72	66,88	67,03	67,19	67,34	67,5	67,5
		Meningkatnya luasan mangrove yang direhabilitasi	Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi	%	N/A	0,75	0,79	0,84	0,88	0,92	0,96	1	1
		Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	Ton	940.018	968.353,80	952.717,50	954.029	969.649,90	985.589,40	1.001.857,10	1.018.462,80	4.929.588,2
			Produksi Garam	Ton	595.984,41	629.952,95	539.293,69	541.775,75	544.457,81	547.139,84	549.821,93	552.503,98	2.735.699,31

Untuk tujuan dan sasaran, serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan, ditetapkan sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	81	82	83	84	85	86	89	90	90
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks manajemen risiko perangkat daerah	Angka	2,63	2,95	3,04	3,13	3,22	3,32	3,42	3,52	3,52
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah	Angka	82	83	84	85	86	87	88	89	89

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Strategi yang akan diambil dalam menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah :

1. Peningkatan produksi tangkap dan produktivitas nelayan yang didukung teknologi informasi terpadu, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
2. Peningkatan produksi garam berkualitas melalui penerapan teknologi dan peningkatan kapasitas petambak garam;
3. Peningkatan produksi budidaya ikan melalui penggunaan benih berkualitas dan induk unggul yang didukung penerapan teknologi, produksi pakan, lingkungan perairan yang kondusif, pembudidaya yang kompeten serta sarana prasarana yang memadai;
4. Peningkatan mutu produk dan jaminan keamanan pangan usaha pengolahan dan pemasaran tradisional serta mendorong usaha pengolahan dan pemasaran modern untuk berorientasi ekspor;
5. Peningkatan luasan mangrove melalui rehabilitasi mangrove dan konservasi habitat vital di pesisir dan laut, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, serta mengoptimalkan peran stakeholder;
6. Peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan; dan
7. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.

Adapun strategi dan arah kebijakan atas tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan	1. Meningkatnya produksi perikanan	1.1.1 Peningkatan produksi tangkap dan produktivitas nelayan yang didukung teknologi informasi terpadu, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	1. Pengelolaan Perikanan Tangkap melalui: a. Pengembangan sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan; b. Replacement alat tangkap yang ramah Lingkungan; c. Sosialisasi dan gerai perizinan perikanan tangkap; d. Penenggelaman fish apartment; e. Penyediaan data dan sumber informasi SDI; f. Penggunaan teknologi penangkapan ikan; g. Penerapan cold chain system pada kapal perikanan; h. Penyediaan dokumen pengembangan Kawasan pelabuhan perikanan; i. Penyelenggaraan operasional Pelabuhan dan kesyahbandaran; j. Penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan usaha; k. Pengembangan SPBN; l. Penjaminan kecukupan BBM bagi nelayan melalui rekomendasi pembangunan SPBN; m. Mengoptimalkan pengawasan dan patroli di laut kewenangan provinsi; n. Normalisasi alur pelayaran kapal perikanan. 2. Perlindungan kepentingan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, melalui: a. Pembiayaan premi asuransi nelayan;

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
				b. Pemberdayaan usaha perikanan tangkap skala kecil; c. Pengembangan kartu ngopeni nelayan yang terintegrasi dengan sistem informasi terpadu; d. Fasilitasi kurikulum kelautan dan perikanan di Institusi Pendidikan; e. Fasilitasi regenerasi nelayan berupa rekomendasi untuk masuk sekolah dan perguruan tinggi perikanan; f. Sosialisasi dan fasilitasi perjanjian kerja laut (PKL); g. Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha melalui kelembagaan; h. Penguatan kelembagaan kelompok nelayan bertransformasi menjadi koperasi nelayan yang bisa membiayai operasional nelayan; i. Menggandeng lembaga keuangan/perbankan untuk membuka gerai pelayanan di kawasan sentra ekonomi nelayan; j. Pelatihan ketrampilan dan peningkatan kompetensi awak kapal perikanan; k. Fasilitasi BBM Subsidi bagi nelayan kecil; l. Bantuan subsidi bunga Vehicle Monitoring System (VMS); m. Bantuan hibah sarpras penangkapan ikan; n. Pelatihan nelayan milenial o. Bantuan hibah teknologi penangkapan ikan
			1.1.2 Peningkatan	1. Peningkatan produksi perikanan budidaya,

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			produksi budidaya ikan melalui penggunaan benih berkualitas dan induk unggul yang didukung penerapan teknologi, produksi pakan, lingkungan perairan yang kondusif, pembudidaya yang kompeten serta sarana prasarana yang memadai	melalui: - Pengembangan broodstock center untuk peningkatan kualitas calon induk unggul - peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis pembudidayaan ikan sesuai dengan prinsip-prinsip Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPIB); - Penerapan teknologi budidaya yang toleran terhadap perubahan cuaca; - Fasilitasi perizinan usaha perikanan budidaya (Gerai Perizinan) - Fasilitasi terkait dengan akses permodalan dan pembiayaan usaha perikanan budidaya; - Intensifikasi dan penerapan teknologi produksi perikanan budidaya yang adaptif; - Pengembangan pakan ikan mandiri; - Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya; - Pengembangan sentra/kawasan/kampung perikanan budidaya, seperti kawasan nila salin, kampung lele, kawasan mina padi dll; - Peningkatan sarana dan prasarana produksi benih dan calon induk unggul; - Revitalisasi tambak idle (tambak yang tidak produktif); - Rehabilitasi sarana prasarana unit perbenihan UPTD; - Bantuan calon induk untuk Unit

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
				Perbenihan Rakyat (UPR); n. Subsidi pakan ikan untuk pembudidaya ikan.
				2. Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan Melalui : a. Pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis pembudidayaan ikan sesuai dengan prinsip-prinsip Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPIB); b. Fasilitasi perizinan usaha perikanan budidaya (Gerai Perizinan); c. Fasilitasi terkait dengan akses permodalan dan pembiayaan usaha perikanan budidaya; d. Pelatihan budidaya untuk pembudidaya milenial;
				3. Pengendalian sebaran hama penyakit ikan melalui a. Fasilitasi monitoring kualitas lingkungan budidaya; b. Penyebarluasan informasi terkait dengan perubahan iklim; c. Fasilitasi pengujian kesehatan dan hama penyakit ikan; d. Fasilitasi penyebarluasan informasi terkait dengan hama dan penyakit ikan; e. Fasilitasi pendataan dan pembinaan

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
				peredaran Obat Ikan.
				4. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan kelautan dan perikanan, melalui: a. Meningkatkan angka penanganan kasus pelanggaran peraturann perundangan kelautan dan perikanan. b. Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan perikanan. d. Meningkatkan sinergitas stakeholder kelautan dan perikanan dalam antisipasi konflik antar nelayan. e. Meningkatkan cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP.
			1.1.3 Peningkatan produksi garam berkualitas melalui penerapan teknologi dan peningkatan kapasitas petambak garam	1. Peningkatan produksi usaha garam rakyat melalui: a. Pembangunan dan revitalisasi prasarana usaha pergaraman b. Pemberian bantuan sarana produksi c. Peningkatan kompetensi SDM petambak garam d. Peningkatan luasan tambak garam yang

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
				menerapkan teknologi e. Penyusunan data potensi garam rakyat Jawa Tengah
				2. Pemberdayaan perempuan dan taruna pesisir melalui: a. Sosialisasi dan pelatihan teknologi tepat guna serta pelatihan manajemen usaha mulai dari pra produksi hingga paska produksi dan pemasaran; b. Pemberian bantuan sarana prasarana usaha;
			1.1.4 Peningkatan mutu produk dan jaminan keamanan pangan usaha pengolahan dan pemasaran tradisional serta mendorong usaha pengolahan dan pemasaran modern untuk berorientasi ekspor	1. Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melalui : a. pemenuhan kebutuhan bahan baku; b. peningkatan konsumsi ikan; c. peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, sanitasi dan higien; d. Peningkatan kompetensi pengolah hasil perikanan; e. Peningkatan sarana prasarana dan inovasi teknologi pengolah hasil perikanan; f. Verifikasi perizinan usaha pengolah dan pemasar perikanan; g. Promosi dan pemasaran produk perikanan termasuk Gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) h. Pelatihan Pengolahan Ikan (GMP/SSOP/Diversifikasi Olahan Ikan); i. Pembangunan fish market (dengan BUMD

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
				sebagai leading sektor) j. Mengoptimalkan pengawasan distribusi kesesuaian peruntukan bahan baku ikan olahan dan hasil olahan ikan; k. Mengoptimalkan pengawasan penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya pada produk olahan ikan; l. Diversifikasi produk perikanan; m. fasilitasi kemitraan pemasaran antara pelaku usaha; n. Penguatan kerjasama tata kelola logistic; o. Perluasan ke akses pasar institusi.
			1.1.5 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	1. Peningkatan peran serta dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, melalui : a. Meningkatkan angka penanganan kasus pelanggaran peraturann perundangan kelautan dan perikanan; b. Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan; c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan perikanan; d. Meningkatkan sinergitas stakeholder kelautan dan perikanan dalam antisipasi konflik antar nelayan;

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
				e. Meningkatkan cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP; f. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pos Pengawasan Pokmaswas di Perairan Umum Daratan; g. Bantuan Sarana dan Prasarana Pokmaswas; h. Hibah Pemberdayaan Masyarakat melalui Bagan Kekurangan yang berfungsi sebagai Pos Pengawasan Pokmaswas; i. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pos Pengawasan Pokmaswas di Perairan Umum Daratan; j. Bantuan Sarana dan Prasarana Perahu Pokmaswas di Perairan Daratan. k. Bantuan Peralatan Pengelolaan Sampah Plastik di Wilayah Pesisir dan Payau
		2. Meningkatnya Luasan Mangrove yang Direhabilitasi	1.2.1 Peningkatan luasan mangrove melalui rehabilitasi mangrove dan konservasi habitat vital di pesisir dan laut, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, serta mengoptimalkan peran stakeholder	1. Pengelolaan dan peningkatan sumberdaya kelautan dan perikanan, melalui b. Penyusunan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan konservasi; c. Pembentukan Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi; d. Pemutakhiran data potensi kelautan, pesisir dan pulau” kecil Jawa Tengah; e. Rehabilitasi ekosistem mangrove dan penenggelaman terumbu karang buatan; f. Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait RZWP3K yang telah terintegrasi dengan RTRW ;

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
				g. Sosialisasi pengelolaan Kawasan konservasi kepada stake holder terkait; h. Monitoring kesesuaian pemanfaatan ruang laut; i. Verifikasi teknis terkait rencana pengajuan kesesuaian pemanfaatan ruang laut; j. Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, pengamanan daerah asuhan ikan (jalur Ia atau 0-2 mil dari alat tangkap aktif bermesin dan peningkatan kerjasama antar provinsi dan lintas sektoral dalam pengaturan nelayan andon; k. Peningkatan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat tentang RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem vital di laut dan pesisir; l. Pemanfaatan teknologi digital dengan pengembangan sistem aplikasi yang mencakup update informasi terkait sektor kelautan dan perikanan di Jawa Tengah.
3	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis		1.3.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Kelautan dan	1. Peningkatan kualitas pelayanan perangkat melalui : a. Pengembangan kompetensi dan kinerja ASN; b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik; c. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik;

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Perikanan	d. Peningkatan pengelolaan informasi yang kompetitif; e. Peningkatan pengelolaan data dan informasi melalui manajemen yang baik; f. Penguatan tim dalam rangka mendukung tingkat organisasi maupun pelayanan public; g. Rehabilitasi sarana prasarana pelayanan.
			1.3.2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Peningkatan kualitas pengeloan risiko perangkat daerah : a. Penguatan komitmen dalam meningkatkan nilai-nilai kedisiplinan mengenai hak dan kewajiban PNS; b. Pengembangan kompetensi dan kinerja ASN; c. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik; d. Penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis IT; e. Penguatan pengawasan dan pengendalian sesuai tujuan dan risiko.

Selain itu, disajikan pentahapan pembangunan yang dimaksudkan untuk menggambarkan prioritas pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Prioritas dalam setiap tahapan harus mendasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan sebelumnya. Pentahapan dimaksud disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan produktivitas serta daya saing produksi perikanan, melalui : - Rehabilitasi Sarpras Pelabuhan Perikanan - Peninggian kawasan pelabuhan - Pemenuhan dokumen pendukung Pelabuhan perikanan - Asuransi nelayan - Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha perikanan dan pergaraman melalui pelatihan - Penyediaan benih ikan berkualitas melalui rehabilitasi sarpras UPTD perbenihan - Revitalisasi tambak nila salin - Pelatihan diversifikasi	Peningkatan peran sub sektor perikanan dalam PDRB Jawa Tengah, melalui : - Rehabilitasi Sarpras Pelabuhan Perikanan - Asuransi nelayan - Penguatan kapasitas SDM pelaku usaha perikanan dan pergaraman melalui pelatihan - Pembinaan cara distribusi ikan yang baik (CDIB) - Modernisasi sarpras pelaku usaha perikanan dan pergaraman - Revitalisasi tambak nila salin - Bantuan benih untuk UPR - Pelatihan diversifikasi usaha	Peningkatan dan pemerataan ekonomi berbasis optimalisasi potensi sektor kelautan perikanan, melalui : - Rehabilitasi Sarpras Pelabuhan Perikanan - Asuransi nelayan - Peningkatan kelembagaan pelaku usaha perikanan dan pergaraman - Pembinaan cara distribusi ikan yang baik (CDIB) - Modernisasi sarpras pelaku usaha perikanan dan pergaraman - Pengembangan pakan mandiri - Pelatihan diversifikasi usaha dan manajemen keuangan Perempuan pesisir - Kampanye GEMARIKAN	Menumbuhkan daya saing sektor kelautan dan perikanan Jawa Tengah yang maju dan berkelanjutan, melalui : - Rehabilitasi sarpras pelabuhan perikanan - Asuransi nelayan - Fasilitasi akses permodalan pelaku usaha perikanan dan pergaraman - Pengembangan kawasan Budidaya ikan berbasis kearifan lokal (kelanjutan nila salin) - Pengembangan pakan mandiri - Fasilitasi Kegiatan Hasil Penerapan Teknologi Lahan Garam - Pelatihan diversifikasi usaha dan manajemen keuangan Perempuan	Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan yang maju dan berkelanjutan melalui : - Rehabilitasi sarpras pelabuhan perikanan - Digitalisasi sistem tata kelola pelabuhan perikanan - Kerjasama dengan lembaga keuangan/perbankan untuk membuka gerai pelayanan di kawasan sentra ekonomi nelayan; - Memperluas jejaring pemasaran produk kelautan perikanan agar semakin maju dan berkelanjutan - Kampanye GEMARIKAN - Ekstensifikasi pembudidayaan ikan berkelanjutan - Meningkatkan ketangguhan pengawasan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
usaha pengolahan ikan dan manajemen keuangan Perempuan pesisir - Kampanye GEMARIKAN - <i>Piloting project underwater restocking</i> - Rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove) - Kajian dokumen untuk usulan penetapan kawasan konservasi - Bantuan Vehicle Monitoring System (VMS) Kapal Perikanan	pengolahan ikan dan manajemen keuangan Perempuan pesisir - Kampanye GEMARIKAN - Rehabilitasi mangrove (Mageri Segoro) - Kajian dokumen untuk usulan penetapan kawasan konservasi - <i>Kelanjutan project underwater restocking</i> - Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha perikanan - Hibah kelompok Masyarakat pengawas	- Rehabilitasi mangrove (Mageri Segoro) - Kajian dokumen untuk usulan penetapan kawasan konservasi - Bantuan Sarana dan Prasarana Perahu Pokmaswas di Perairan Daratan - Perluasan lahan garam yang berteknologi untuk pemenuhan kebutuhan industri di Jawa Tengah - <i>Kelanjutan project underwater restocking</i>	pesisir - Pengembangan Jejaring pemasaran pengolah dan pemasar produk perikanan - Kampanye GEMARIKAN - Rehabilitasi ekosistem mangrove (Mageri Segoro) - <i>Kelanjutan project underwater restocking</i> - Pemberdayaan Masyarakat melalui Pos Pengawasan Pokmaswas di Perairan Umum Daratan	SDKP - Meningkatkan pelayanan melalui rehabilitasi sarana prasarana penunjang gedung kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - Replikasi pengembangan kawasan konservasi berbasis eco wisata berkelanjutan - <i>Kelanjutan project underwater restocking</i> - Pembangunan pabrik pengolahan garam (konvergensi dengan SPJT)

3.3 Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis
Dinas Kelautan dan Perikanan
Tahun 2025- 2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi perikanan	Kematian ikan	12	Adanya hama dan penyakit ikan	Menurunnya pasokan ikan di masyarakat	Monitoring hama dan penyakit ikan	Kepala OPD	Tahun 2025-2029
		Benih ikan tidak tumbuh berkembang	12	Benih ikan tidak bermutu.	Menurunnya pasokan ikan di masyarakat	Sertifikasi dan pembinaan perbenihan	Kepala OPD	Tahun 2025-2029
		Nelayan tidak melaut	12	cuaca buruk dan tingginya biaya operasional melaut	Menurunnya pasokan ikan di masyarakat	Hibah/bantuan kepada nelayan	Kepala OPD	Tahun 2025-2029
		Nelayan melaut semakin jauh	12	Menurunnya Sumber Daya Ikan di laut	Menurunnya pasokan ikan di masyarakat	Pembuatan Terumbu Karang Buatan dan pengawasan penggunaan alat tangkap	Kepala OPD	Tahun 2025-2029
Meningkatnya Produksi Garam	Produksi garam	Petambak garam tidak dapat berproduksi	16	Tingginya curah hujan	Volume produksi garam turun	Penggunaan teknologi geo membran dan tunnel dalam produksi garam	Kepala OPD	Tahun 2025-2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Petambak garam tidak dapat berproduksi	16	Proses produksi masih tradisional	Volume produksi garam turun	Bantuan/hibah peralatan produksi garam kepada petambak garam	Kepala OPD	Tahun 2025-2029
Meningkatnya Luasan Mangrove Yang Direhabilitasi	Persentase Luasan Mangrove yang Direhabilitasi	Matinya bibit mangrove yang ditanam	12	Lokasi dan jenis tanah tidak sesuai	Ekosistem pesisir rusak	Jenis mangrove sesuai dengan jenis tanah	Kepala OPD	Tahun 2025-2029
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	Pelayanan lambat	9	Personil OPD tidak memahami tugasnya	Kebutuhan masyarakat tidak terlayani	Rapat evaluasi dan pengendalian kegiatan	Kepala OPD	Tahun 2025-2029
		Pelayanan lambat	9	Personil OPD tidak berorientasi pelayanan	Kebutuhan masyarakat tidak terlayani	Sosialisasi dan kanal aduan	Kepala OPD	Tahun 2025-2029

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang diambil dari program yang menunjang secara langsung pencapaian Tujuan dan Sasaran serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada satu urusan pilihan (kelautan dan perikanan).

Dalam perkembangan periode waktu 5 (lima) tahun, upaya mewujudkan kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan dan mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan di Jawa Tengah, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, program dimaksud adalah :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
3. Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
4. Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Kegiatan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan tersebut meliputi :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
 - b. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
 - c. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

- d. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi PPP Asemdayong
- e. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi PPP Bajomulyo
- f. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi PPP Karimunjawa
- g. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi PPP Klidanglor
- h. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi PPP Larangan
- i. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi PPP Lohgending
- j. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi PPP Morodemak
- k. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi PPP Tasikagung
- l. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi PPP Tawang
- m. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi PPP Tegalsari
- n. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi PPP Wonokerto

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, terdiri dari :

- a. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
- b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat
- c. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut pada Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A
- d. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat pada Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A
- e. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut pada Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A

3. Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- a. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- b. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
- c. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat
- d. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur
- e. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan

4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

- a. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
 - b. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - c. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat
 - d. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur
 - e. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari :
- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - b. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
 - c. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - d. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar pada Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A
 - e. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi pada Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, terdiri dari
- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program dan kegiatan serta pendanaan tahun ke-1 s.d tahun ke-5 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut ini :

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkat kan Pertumbu han PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan (PE) *								75.361.404.500		28.852.096.500		28.861.404.500		29.818.046.500		31.961.404.500	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan *	%	1,0	2,0		2,1		2,2		2,2		2,4		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkat nya Produksi Perikanan **							75.361.404.500		28.852.096.500		28.861.404.500		29.818.046.500		31.961.404.500	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Produksi Perikanan **	Ton	968.354	954.029	74.515.115.500	969.650	28.005.807.500	985.589	28.015.115.500	1.001.857	28.971.757.500	1.018.463	30.915.115.500	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ***						521.071.000		521.071.000		521.071.000		521.071.000		621.071.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
			Meningkatnya Dokumen IKRL (Informasi Kesesuaian Ruang Laut) yang Diterbitkan	Persentase Peningkatan Dokumen IKRL (informasi kesesuaian ruang laut) yang diterbitkan ***	%	N/A	25	521.071.000	40	521.071.000	54	521.071.000	68	521.071.000	82	621.071.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi ****						521.071.000		521.071.000		521.071.000		521.071.000		621.071.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
			Meningkatnya Kawasan Konservasi yang Ditetapkan Oleh SK Menteri	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan ****	Lokasi	1	1	302.798.000	1	302.798.000	1	302.798.000	1	302.798.000	1	402.798.000	Pokja Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	
		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat *****						302.798.000		302.798.000		302.798.000		302.798.000		402.798.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola *****	Ha	244,88	750,03	302.798.000	299,86	302.798.000	2.245,99	302.798.000	1.176,31	302.798.000	1.083,89	402.798.000	Pokja Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil JAWA TENGAH
			Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dimanfaatkan Sesuai Ketentuan RTRWP	Jumlah wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang dimanfaatkan sesuai ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi *****	Lokasi	5	5	218.273.000	5	218.273.000	5	218.273.000	5	218.273.000	5	218.273.000	Pokja Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir *****						218.273.000		218.273.000		218.273.000		218.273.000		218.273.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
			Tersusunnya dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP *****	Dokumen	1	4	218.273.000	4	218.273.000	4	218.273.000	3	218.273.000	2	218.273.000	Pokja Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP ***						26.684.586.000		4.084.586.000		4.084.586.000		4.084.586.000		4.384.586.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap ***	Ton	410.642	354.029	26.684.586.000	364.650	4.084.586.000	375.589	4.084.586.000	386.857	4.084.586.000	398.463	4.384.586.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap	
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil *****						25.773.748.000		3.173.748.000		3.173.748.000		3.173.748.000		3.373.748.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap	
			Meningkatnya nelayan yang mendapatkan asuransi, Bantuan Operasional Penangkapan Ikan, Fasilitasi Kelembagaan serta Perlindungan dan Pemberdayaan Lainnya	Jumlah nelayan yang mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan *****	Orang	10.000	10.000	24.733.380.000	10.000	2.233.380.000	10.000	2.233.380.000	10.000	2.233.380.000	10.000	2.233.380.000	Pokja Kepelabuhanan dan Kenelayanan	
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap *****						24.733.380.000		2.233.380.000		2.233.380.000		2.233.380.000		2.233.380.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil *****	Unit	N/A	2	24.733.380.000	2	2.233.380.000	2	2.233.380.000	2	2.233.380.000	2	2.233.380.000	Pokja Kepelabuhanan dan Kenelayanan	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap
			Meningkatnya nelayan yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi seperti: Sertifikat Kelayakan Nelayan (SKN), cara penanganan ikan yang baik di atas kapal (CPIB), Basic Safety Training Fisheries (BSTF), Ahli nautika kapal perikanan Tingkat 3 (Ankapin 3), Ahli Teknik kapal perikanan tingkat 3 (Atkapin 3) dll	Jumlah nelayan ditingkatkan kompetensinya *****	Orang	30	30	890.368.000	30	790.368.000	30	790.368.000	30	790.368.000	30	990.368.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	
		Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap *****						890.368.000		790.368.000		790.368.000		790.368.000		990.368.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil *****	Unit	50	30	890.368.000	30	790.368.000	30	790.368.000	30	790.368.000	30	990.368.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	Bidang Perikanan Tangkap JAWA TENGAH
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektor Perikanan Tangkap	Jumlah Data dan Informasi Sektor Perikanan Tangkap yang dikumpulkan dan diperiksa ****	Data	53	53	150.000.000	53	150.000.000	53	150.000.000	53	150.000.000	53	150.000.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan *****						150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap	
			Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil *****	Dokumen	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT ****						560.838.000		560.838.000		560.838.000		560.838.000		660.838.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Kapal Yang Menerapkan Dokumen Kapal Perikanan	Jumlah Kapal yang menerapkan dokumen kapal perikanan ****	Unit	1.072	1.000	560.838.000	1.000	560.838.000	1.000	560.838.000	1.000	560.838.000	1.000	660.838.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	
		Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil *****						560.838.000		560.838.000		560.838.000		560.838.000		660.838.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap	
			Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil *****	%	100	100	560.838.000	100	560.838.000	100	560.838.000	100	560.838.000	100	660.838.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ****						350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap	
			Tersedianya Dokumen Perencanaan dan/ atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan Meliputi Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Daerah, Penetapan Kelas Pelabuhan dan Personil Pembiayaan Sarana dan Prasarana dan Dokumen (PPPD) Pelabuhan Perikanan serta dokumen lain yang bersifat global	Jumlah Dokumen Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan yang disusun ****	Dokumen	1	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	Pokja Kepelabuhanan dan Kenelayanan	
		Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan *****						350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan *****	Pelabuhan Perikanan	11	11	350.000.000	11	350.000.000	11	350.000.000	11	350.000.000	11	350.000.000	Pokja Kepelabuhanan dan Kenelayanan	Bidang Perikanan Tangkap JAWA TENGAH
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP ***						788.189.000		788.189.000		788.189.000		788.189.000		788.189.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
			Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Asemdayong Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong ***	%	73	100	788.189.000	100	788.189.000	100	788.189.000	100	788.189.000	100	788.189.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ****						788.189.000		788.189.000		788.189.000		788.189.000		788.189.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi ****	Unit	1	1	83.840.000	1	83.840.000	1	83.840.000	1	83.840.000	1	83.840.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan *****						83.840.000		83.840.000		83.840.000		83.840.000		83.840.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia *****	Unit	27	27	83.840.000	27	83.840.000	27	83.840.000	27	83.840.000	27	83.840.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B PEMALANG
			Meningkatnya Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan ****	Dokumen	224	1.660	704.349.000	1.700	704.349.000	1.720	704.349.000	1.750	704.349.000	1.780	704.349.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan *****						704.349.000		704.349.000		704.349.000		704.349.000		704.349.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
			Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana *****	Layanan	10	10	704.349.000	10	704.349.000	10	704.349.000	10	704.349.000	10	704.349.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B PEMALANG
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP ***						838.323.000		838.323.000		838.323.000		838.323.000		838.323.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
			Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Wonokerto Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto ***	%	100	100	838.323.000	100	838.323.000	100	838.323.000	100	838.323.000	100	838.323.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ****						838.323.000		838.323.000		838.323.000		838.323.000		838.323.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
			Meningkatnya Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi ****	Unit	3	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan *****						200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia *****	Unit	23	23	200.000.000	23	200.000.000	23	200.000.000	23	200.000.000	23	200.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
			Meningkatnya Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan *****	Dokumen	1.278	1.050	638.323.000	1.050	638.323.000	1.050	638.323.000	1.050	638.323.000	1.050	638.323.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan *****						638.323.000		638.323.000		638.323.000		638.323.000		638.323.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana *****	Layanan	11	11	638.323.000	11	638.323.000	11	638.323.000	11	638.323.000	11	638.323.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP ***						881.261.000		881.261.000		881.261.000		881.261.000		881.261.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
			Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan PPP Klidanglor Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor ***	%	70	100	881.261.000	100	881.261.000	100	881.261.000	100	881.261.000	100	881.261.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ****						881.261.000		881.261.000		881.261.000		881.261.000		881.261.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi ****	Unit	4	1	453.600.000	1	453.600.000	1	453.600.000	1	453.600.000	1	453.600.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan *****						453.600.000		453.600.000		453.600.000		453.600.000		453.600.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia *****	Unit	19	19	453.600.000	19	453.600.000	19	453.600.000	19	453.600.000	19	453.600.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	BATANG Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
			Meningkatnya Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan *****	Dokumen	5.020	4.050	427.661.000	4.100	427.661.000	4.150	427.661.000	4.200	427.661.000	4.250	427.661.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan *****						427.661.000		427.661.000		427.661.000		427.661.000		427.661.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
			Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana *****	Layanan	15	15	427.661.000	15	427.661.000	15	427.661.000	15	427.661.000	15	427.661.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	BATANG Pela buhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP ***						928.813.000		928.813.000		928.813.000		928.813.000		928.813.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
			Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Tawang Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang ***	%	100	100	928.813.000	100	928.813.000	100	928.813.000	100	928.813.000	100	928.813.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ****						928.813.000		928.813.000		928.813.000		928.813.000		928.813.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
			Meningkatnya Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilita si ****	kg/kapita/ta hun	3	1	436.524.000	1	436.524.000	1	436.524.000	1	436.524.000	1	436.524.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan *****						436.524.000		436.524.000		436.524.000		436.524.000		436.524.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia *****	Unit	17	17	436.524.000	17	436.524.000	17	436.524.000	17	436.524.000	17	436.524.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL Pela buhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan ****	Dokumen	226	50	492.289.000	60	492.289.000	70	492.289.000	80	492.289.000	90	492.289.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan *****						492.289.000		492.289.000		492.289.000		492.289.000		492.289.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
			Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana *****	Layanan	13	17	492.289.000	17	492.289.000	17	492.289.000	17	492.289.000	17	492.289.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL Pela buhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP ***						8.718.117.000		1.208.809.000		1.218.117.000		1.218.117.000		1.218.117.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Morodemak Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak ***	%	81	91	8.718.117.000	100	1.208.809.000	100	1.218.117.000	100	1.218.117.000	100	1.218.117.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ****						8.718.117.000		1.208.809.000		1.218.117.000		1.218.117.000		1.218.117.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
			Meningkatnya Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi ****	Unit	2	1	816.765.000	1	807.457.000	1	816.765.000	1	816.765.000	1	816.765.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan *****						816.765.000		807.457.000		816.765.000		816.765.000		816.765.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia *****	Unit	18	19	816.765.000	20	807.457.000	21	816.765.000	21	816.765.000	21	816.765.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	DEMAK Pelab uhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
			Meningkatnya Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan *****	Dokumen	493	4.500	7.901.352.000	5.000	401.352.000	5.500	401.352.000	6.000	401.352.000	6.500	401.352.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan *****						7.901.352.000		401.352.000		401.352.000		401.352.000		401.352.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
			Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana *****	Layanan	10	12	7.901.352.000	12	401.352.000	12	401.352.000	12	401.352.000	12	401.352.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	DEMAK Pelab uhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP ***						837.122.00 0		537.122.0 00		537.122.00 0		537.122.00 0		837.122.00 0	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
			Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Karimunjawa Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa ***	%	91	100	837.122.000	100	537.122.000	100	537.122.000	100	537.122.000	100	837.122.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ****						837.122.000		537.122.000		537.122.000		537.122.000		837.122.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
			Meningkatnya Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan ****	Dokumen	505	930	390.092.000	950	90.092.000	970	90.092.000	990	90.092.000	1.000	390.092.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan *****						390.092.000		90.092.000		90.092.000		90.092.000		390.092.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
			Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana *****	Layanan	10	15	390.092.000	15	90.092.000	15	90.092.000	15	90.092.000	15	390.092.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
			Meningkatnya Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi *****	Unit	2	2	447.030.000	2	447.030.000	2	447.030.000	2	447.030.000	2	447.030.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan *****						447.030.000		447.030.000		447.030.000		447.030.000		447.030.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia *****	Unit	23	23	447.030.000	23	447.030.000	23	447.030.000	23	447.030.000	23	447.030.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA Pelab uhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP ***						691.613.000		691.613.000		691.613.000		691.613.000		691.613.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
			Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Larangan Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan ***	%	72	100	691.613.000	100	691.613.000	100	691.613.000	100	691.613.000	100	691.613.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi *****						691.613.000		691.613.000		691.613.000		691.613.000		691.613.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
			Meningkatnya Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan *****	Dokumen	1.115	150	541.928.000	160	541.928.000	170	541.928.000	180	541.928.000	190	541.928.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan *****						541.928.000		541.928.000		541.928.000		541.928.000		541.928.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
			Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana *****	Layanan	8	14	541.928.000	14	541.928.000	14	541.928.000	14	541.928.000	14	541.928.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B TEGAL
			Meningkatnya Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi *****	Unit	1	1	149.685.000	1	149.685.000	1	149.685.000	1	149.685.000	1	149.685.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan *****						149.685.000		149.685.000		149.685.000		149.685.000		149.685.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia *****	Unit	14	14	149.685.000	14	149.685.000	14	149.685.000	14	149.685.000	14	149.685.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B TEGAL
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP ***						1.199.130.000		1.199.130.000		1.199.130.000		1.199.130.000		1.199.130.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
			Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPN Tegalsari Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari ***	%	72	100	1.199.130.000	100	1.199.130.000	100	1.199.130.000	100	1.199.130.000	100	1.199.130.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ****						1.199.130.000		1.199.130.000		1.199.130.000		1.199.130.000		1.199.130.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan ****	Dokumen	3.533	9.725	281.490.000	9.725	281.490.000	9.725	281.490.000	9.725	281.490.000	9.725	281.490.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan *****						281.490.000		281.490.000		281.490.000		281.490.000		281.490.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
			Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana *****	Layanan	16	20	281.490.000	20	281.490.000	20	281.490.000	20	281.490.000	20	281.490.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	KOTA TEGAL
			Meningkatnya Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi ****	Unit	1	1	917.640.000	1	917.640.000	1	917.640.000	1	917.640.000	1	917.640.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan *****						917.640.000		917.640.000		917.640.000		917.640.000		917.640.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia *****	Unit	26	26	917.640.000	26	917.640.000	26	917.640.000	26	917.640.000	26	917.640.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	KOTA TEGAL
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP ***						1.307.791.000		1.107.791.000		1.107.791.000		1.107.791.000		1.307.791.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	
			Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Juwana ***	%	100	100	1.307.791.000	100	1.107.791.000	100	1.107.791.000	100	1.107.791.000	100	1.307.791.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi *****						1.307.791.000		1.107.791.000		1.107.791.000		1.107.791.000		1.307.791.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	672.517.000	1	672.517.000	1	672.517.000	1	672.517.000	1	672.517.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan *****						672.517.000		672.517.000		672.517.000		672.517.000		672.517.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia *****	Unit	29	29	672.517.000	29	672.517.000	29	672.517.000	29	672.517.000	29	672.517.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	JAWA TENGAH PATI
			Meningkatnya Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan *****	Dokumen	3.272	6.600	635.274.000	6.600	435.274.000	6.600	435.274.000	6.600	435.274.000	6.600	635.274.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan *****						635.274.000		435.274.000		435.274.000		435.274.000		635.274.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana *****	Layanan	16	15	635.274.000	15	435.274.000	15	435.274.000	15	435.274.000	15	635.274.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	JAWA TENGAH PATI
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP ***						1.335.766.000		1.035.766.000		1.035.766.000		1.035.766.000		1.335.766.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
			Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPN Tasikagung Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung ***	%	100	100	1.335.766.000	100	1.035.766.000	100	1.035.766.000	100	1.035.766.000	100	1.335.766.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ****						1.335.766.000		1.035.766.000		1.035.766.000		1.035.766.000		1.335.766.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi, termasuk penyediaan dokumen pendukung seperti Master Plan/DED/ WKOPP/ Dokumen Lingkungan(AMDAL,U KL-UPL, SPPL,Pertek Air Limbah, Andalalin,)/Dokumen ISO/WBK/KKPRL/KKPR/Studi Kelayakan/IMB atau PBG/Sertifikat Tanah *****	Unit	1	1	153.390.000	1	153.390.000	1	153.390.000	1	153.390.000	1	153.390.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan *****						153.390.000		153.390.000		153.390.000		153.390.000		153.390.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia *****	Unit	12	12	153.390.000	12	153.390.000	12	153.390.000	12	153.390.000	12	153.390.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A REMBANG

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan ****	Dokumen	7.189	9.700	1.182.376.000	9.720	882.376.000	9.750	882.376.000	9.775	882.376.000	9.800	1.182.376.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan *****						1.182.376.000		882.376.000		882.376.000		882.376.000		1.182.376.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
			Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana *****	Layanan	11	15	1.182.376.000	15	882.376.000	15	882.376.000	15	882.376.000	15	1.182.376.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	PPN Tasikagung Kelas A, JAWA TENGAH REM BANG
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP ***						1.080.716.500		1.080.716.500		1.080.716.500		1.080.716.500		1.080.716.500	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
			Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Lohgending Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Logending ***	%	63	100	1.080.716.500	100	1.080.716.500	100	1.080.716.500	100	1.080.716.500	100	1.080.716.500	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ****						1.080.716.500		1.080.716.500		1.080.716.500		1.080.716.500		1.080.716.500	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
			Meningkatnya Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi ****	Unit	N/A	1	433.289.500	1	433.289.500	1	433.289.500	1	433.289.500	1	433.289.500	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan *****						433.289.500		433.289.500		433.289.500		433.289.500		433.289.500	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia *****	Unit	25	25	433.289.500	25	433.289.500	25	433.289.500	25	433.289.500	25	433.289.500	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	DESA AYAH, AYAH, KEBUMEN
			Meningkatnya Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan *****	Dokumen	54	52	647.427.000	63	647.427.000	65	647.427.000	70	647.427.000	75	647.427.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan *****						647.427.000		647.427.000		647.427.000		647.427.000		647.427.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
			Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana *****	Layanan	16	16	647.427.000	16	647.427.000	16	647.427.000	16	647.427.000	17	647.427.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	KEBUMEN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA ***						1.964.220.000		1.664.220.000		1.664.220.000		1.664.220.000		1.964.220.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya ***	Ton	554.810	600.000	1.964.220.000	605.000	1.664.220.000	610.000	1.664.220.000	615.000	1.664.220.000	620.000	1.964.220.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut *****						683.220.000		683.220.000		683.220.000		683.220.000		683.220.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Pembinaan yang dilaksanakan kepada pembudidaya ikan (CBIB, CPIB, CPPIB, Kelembagaan, Bimtek ,akses Permodalan dll)	Jenis Pembinaan Yang Dilaksanakan ****	Jenis	3	3	339.220.000	3	339.220.000	3	339.220.000	3	339.220.000	3	339.220.000	Pokja Pengembangan Komoditas	
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi *****						339.220.000		339.220.000		339.220.000		339.220.000		339.220.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
			Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya *****	Orang	40	30	339.220.000	30	339.220.000	30	339.220.000	30	339.220.000	30	339.220.000	Pokja Pengembangan Komoditas	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas JA WA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Pembudidaya Ikan yang Menerima Sarpras Perikanan Budidaya yang Meliputi Keramba Jaring Apung / Benih/ Pakan/dll	Jumlah Pembudidaya ikan yang difasilitasi sarana dan prasarana *****	Orang	N/A	10	344.000.000	10	344.000.000	10	344.000.000	10	344.000.000	10	344.000.000	Pokja Pengembangan Komoditas	
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						154.000.000		154.000.000		154.000.000		154.000.000		154.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
			Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Dokumen	1	1	154.000.000	1	154.000.000	1	154.000.000	1	154.000.000	1	154.000.000	Pokja Pengembangan Komoditas	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas JA WA TENGAH
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut *****						190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut *****	Unit	N/A	1	190.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000	Pokja Pengembangan Komoditas	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas JAWA TENGAH
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat *****						1.281.000.000		981.000.000		981.000.000		981.000.000		1.281.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
			Meningkatnya Teknologi yang Diterapkan Oleh Pembudidaya Ikan Meliputi Kolam Bundar, Nila Salin, Minapadi, Mesin Pakan Ikan	Jenis teknologi budidaya yang diterapkan oleh pembudidaya *****	Jenis	2	3	1.281.000.000	3	981.000.000	3	981.000.000	3	981.000.000	3	1.281.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
		Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						1.281.000.000		981.000.000		981.000.000		981.000.000		1.281.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Unit	19	10	1.281.000.000	10	981.000.000	10	981.000.000	10	981.000.000	10	1.281.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas JA WA TENGAH
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA ***						863.640.000		863.640.000		863.640.000		863.640.000		863.640.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Meningkatnya Penanganan Hama, Penyakit Ikan dan lingkungan	Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan ***	%	100	100	863.640.000	100	863.640.000	100	863.640.000	100	863.640.000	100	863.640.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut *****						863.640.000		863.640.000		863.640.000		863.640.000		863.640.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Sampel Yang Diujikan Di Tiga (3) Laboratorium Yaitu Laboratorium Biologi, Laboratorium Biomolekuler dan Laboratorium Kualitas Air	Jumlah sampel yang diuji melalui laboratorium ****	sampel	446	450	471.089.000	500	471.089.000	550	471.089.000	600	471.089.000	650	471.089.000	Pokja Pengelolaan Kesehatan Ikan	
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						471.089.000		471.089.000		471.089.000		471.089.000		471.089.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan dan Ikan	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia *****	Unit	3	3	471.089.000	3	471.089.000	3	471.089.000	3	471.089.000	3	471.089.000	Pokja Pengelolaan Kesehatan Ikan	JAWA TENGAH
			Meningkatnya Unit Pembudidaya Ikan Yang Tertangani Terkait Kesehatan Ikan dan Lingkungannya	Jumlah unit pembudidaya ikan yang tertangani terkait kesehatan ikan dan lingkungannya ****	Unit	35	40	392.551.000	45	392.551.000	50	392.551.000	55	392.551.000	60	392.551.000	Pokja Penerapan dan Kelayakan Produk Hasil Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						392.551.000		392.551.000		392.551.000		392.551.000		392.551.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Termonitornya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Dokumen	35	35	392.551.000	35	392.551.000	35	392.551.000	35	392.551.000	35	392.551.000	Pokja Penerapan dan Kelayakan Produk Hasil Perikanan	JAWA TENGAH
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA ***						20.634.743.000		5.634.743.000		5.634.743.000		6.591.385.000		6.634.743.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Meningkatnya Produksi Ikan Konsumsi	Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut ***	%	5	5	20.634.743.000	5	5.634.743.000	5	5.634.743.000	5	6.591.385.000	5	6.634.743.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut ****						650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		1.150.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Meningkatnya Loka Air Laut yang Direhabilitasi Sarana dan Prasaranya	Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya ****	Lokasi	1	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	1	1.150.000.000	Pokja Kemitraan dan Pelayanan Usaha	
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut *****						250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut *****	Unit	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	Pokja Kemitraan dan Pelayanan Usaha	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut *****						400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		900.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut *****	Unit	1	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	900.000.000	Pokja Kemitraan dan Pelayanan Usaha	JAWA TENGAH
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat *****						19.984.743.000		4.984.743.000		4.984.743.000		5.941.385.000		5.484.743.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Meningkatnya Ikan Endemik Lokal yang Dikembangkan	Jenis ikan endemik lokal yang dikembangkan *****	Jenis	1	1	4.984.743.000	1	4.484.743.000	1	4.484.743.000	1	4.484.743.000	1	4.984.743.000	Pokja Produksi dan Diseminasi Perikanan Budidaya	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						4.984.743.000		4.484.743.000		4.484.743.000		4.484.743.000		4.984.743.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Unit	27	27	4.984.743.000	27	4.484.743.000	27	4.484.743.000	27	4.484.743.000	27	4.984.743.000	Pokja Produksi dan Diseminasi Perikanan Budidaya	JAWA TENGAH
			Meningkatnya Loka Air Tawar dan Payau Yang Direhabilitasi Sarana dan Prasarananya	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya *****	Lokasi	9	9	15.000.000.000	9	500.000.000	9	500.000.000	9	1.456.642.000	9	500.000.000	Pokja Produksi dan Diseminasi Perikanan Budidaya	
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						15.000.000.000		500.000.000		500.000.000		1.456.642.000		500.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Unit	5	5	15.000.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	1.456.642.000	5	500.000.000	Pokja Produksi dan Diseminasi Perikanan Budidaya	JAWA TENGAH
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN ***						642.909.000		642.909.000		642.909.000		642.909.000		642.909.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan ***	%	N/A	50	342.909.000	50	342.909.000	52	342.909.000	55	342.909.000	55	342.909.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil ****						342.909.000		342.909.000		342.909.000		342.909.000		342.909.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya tindakan lanjutan Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil	Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan Kelautan sampai dengan 12 mil ****	%	80	80	236.985.000	80	236.985.000	85	236.985.000	90	236.985.000	90	236.985.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi *****						58.300.000		58.300.000		58.300.000		58.300.000		58.300.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani *****	Perkara	N/A	3	58.300.000	3	58.300.000	4	58.300.000	4	58.300.000	5	58.300.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
		Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi *****						66.460.000		66.460.000		66.460.000		66.460.000		66.460.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi *****	Pelaku Usaha	15	3	66.460.000	3	66.460.000	5	66.460.000	5	66.460.000	5	66.460	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) *****						112.225.000		112.225.000		112.225.000		112.225.000		112.225.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan *****	Kelompok Masyarakat	N/A	3	112.225.000	4	112.225.000	4	112.225.000	5	112.225.000	6	112.225.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
			Meningkatnya HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan	Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan ****	Dokumen	N/A	10	105.924.000	15	105.924.000	15	105.924.000	20	105.924.000	25	105.924.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi *****						105.924.000		105.924.000		105.924.000		105.924.000		105.924.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi *****	Pelaku Usaha	30	20	105.924.000	24	105.924.000	24	105.924.000	30	105.924.000	30	105.924.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
			Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Cakupan WPPNRI yang diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan ***	%	N/A	50	300.000.000	50	300.000.000	50	300.000.000	50	300.000.000	50	300.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil *****						300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan	Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan ****	%	80	50	300.000.000	50	300.000.000	52	300.000.000	52	300.000.000	52	300.000.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan *****						300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan *****	Hari Operasi	8	10	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	14	300.000.000	14	300.000.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN ***						819.093.000		819.093.000		819.093.000		819.093.000		819.093.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Cakupan WPPNRI yang Diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur ***	%	N/A	61	494.056.000	61	494.056.000	61	494.056.000	61	494.056.000	61	494.056.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil ****						494.056.000		494.056.000		494.056.000		494.056.000		494.056.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Meningkatnya Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan	Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan ****	%	N/A	50	494.056.000	50	494.056.000	48	494.056.000	48	494.056.000	48	494.056.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan *****						494.056.000		494.056.000		494.056.000		494.056.000		494.056.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan *****	Hari Operasi	10	10	494.056.000	12	494.056.000	12	494.056.000	15	494.056.000	15	494.056.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
			Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Persentase kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur ***	%	N/A	17	325.037.000	19	325.037.000	21	325.037.000	23	325.037.000	25	325.037.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil ****						325.037.000		325.037.000		325.037.000		325.037.000		325.037.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Meningkatnya tindaklanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil	Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil ****	%	100	100	258.066.000	100	258.066.000	100	258.066.000	100	258.066.000	100	258.066.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi *****						56.984.000		56.984.000		56.984.000		56.984.000		56.984.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani *****	Perkara	N/A	5	56.984.000	5	56.984.000	5	56.984.000	7	56.984.000	7	56.984.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
		Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi *****						61.268.000		61.268.000		61.268.000		61.268.000		61.268.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi *****	Pelaku Usaha	50	24	61.268.000	24	61.268.000	30	61.268.000	30	61.268.000	30	61.268.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi *****						56.984.000		56.984.000		56.984.000		56.984.000		56.984.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi *****	Pelaku Usaha	71	24	56.984.000	24	56.984.000	24	56.984.000	30	56.984.000	30	56.984.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) *****						82.830.000		82.830.000		82.830.000		82.830.000		82.830.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan *****	Kelompok Masyarakat	N/A	2	82.830.000	2	82.830.000	2	82.830.000	3	82.830.000	3	82.830.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan	Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan ****	Dokumen	N/A	10	66.971.000	15	66.971.000	15	66.971.000	20	66.971.000	25	66.971.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi *****						66.971.000		66.971.000		66.971.000		66.971.000		66.971.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi *****	Pelaku Usaha	36	24	66.971.000	30	66.971.000	30	66.971.000	30	66.971.000	30	66.971.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN ***						661.681.000		661.681.000		661.681.000		661.681.000		661.681.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat ***	%	N/A	17	178.061.000	19	178.061.000	21	178.061.000	23	178.061.000	25	178.061.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil ****						178.061.000		178.061.000		178.061.000		178.061.000		178.061.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Meningkatnya tindaklanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil di Wilayah Kerja CDK Barat	Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil ****	%	100	100	101.690.000	100	101.690.000	100	101.690.000	100	101.690.000	100	101.690.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi *****						12.400.000		12.400.000		12.400.000		12.400.000		12.400.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani *****	Perkara	N/A	5	12.400.000	5	12.400.000	5	12.400.000	5	12.400.000	5	12.400.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
		Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi *****						8.125.000		8.125.000		8.125.000		8.125.000		8.125.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi *****	Pelaku Usaha	10	5	8.125.000	5	8.125.000	5	8.125.000	5	8.125.000	5	8.125.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi *****						8.125.000		8.125.000		8.125.000		8.125.000		8.125.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi *****	Pelaku Usaha	7	5	8.125.000	5	8.125.000	5	8.125.000	5	8.125.000	5	8.125.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) *****						73.040.000		73.040.000		73.040.000		73.040.000		73.040.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan *****	Kelompok Masyarakat	N/A	5	73.040.000	5	73.040.000	5	73.040.000	5	73.040.000	5	73.040.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan di Wilayah Kerja CDK Barat	Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan ****	Dokumen	N/A	10	76.371.000	15	76.371.000	15	76.371.000	20	76.371.000	25	76.371.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi *****						76.371.000		76.371.000		76.371.000		76.371.000		76.371.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi *****	Pelaku Usaha	33	20	76.371.000	20	76.371.000	20	76.371.000	20	76.371.000	20	76.371.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Cakupan WPPNRI yang Diawasi Dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat ***	%	N/A	72	483.620.000	72	483.620.000	72	483.620.000	100	483.620.000	100	483.620.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil ****						483.620.000		483.620.000		483.620.000		483.620.000		483.620.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Meningkatnya Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan di Wilayah Kerja CDK Barat	Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan ****	%	N/A	75	483.620.000	75	483.620.000	75	483.620.000	100	483.620.000	100	483.620.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan *****						483.620.000		483.620.000		483.620.000		483.620.000		483.620.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan *****	Hari Operasi	7	15	483.620.000	15	483.620.000	15	483.620.000	20	483.620.000	20	483.620.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN ***						729.221.000		729.221.000		729.221.000		729.221.000		829.221.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
			Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pengendalian Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan ***	%	70	70	729.221.000	71	729.221.000	73	729.221.000	74	729.221.000	75	829.221.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil ****						596.321.000		596.321.000		596.321.000		596.321.000		696.321.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya penanganan pelanggaran pelaku usaha perikanan dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan yang diselesaikan	Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha perikanan dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan yang diselesaikan ****	%	120	90	519.866.000	90	519.866.000	90	519.866.000	90	519.866.000	90	619.866.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
		Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi *****						233.623.000		233.623.000		233.623.000		233.623.000		333.623.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
			Perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani *****	Perkara	2	5	233.623.000	6	233.623.000	7	233.623.000	8	233.623.000	9	333.623.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) *****						200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
			Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan *****	Kelompok Masyarakat	35	35	200.000.000	35	200.000.000	35	200.000.000	35	200.000.000	35	200.000.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	JAWA TENGAH
		Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah *****						86.243.000		86.243.000		86.243.000		86.243.000		86.243.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan *****	Forum	1	1	86.243.000	1	86.243.000	1	86.243.000	1	86.243.000	1	86.243.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	JAWA TENGAH
			Meningkatnya pelaku usaha pergaraman dan pembudidaya ikan di air payau yang diberikan pemahaman peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaku usaha pergaraman dan pembudidaya ikan air payau yang mengetahui peraturan perundang-undangan ****	Orang	46	60	76.455.000	60	76.455.000	60	76.455.000	60	76.455.000	60	76.455.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
		Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi *****						76.455.000		76.455.000		76.455.000		76.455.000		76.455.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi *****	Pelaku Usaha	6	10	76.455.000	10	76.455.000	15	76.455.000	15	76.455.000	20	76.455.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	JAWA TENGAH
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi *****						132.900.000		132.900.000		132.900.000		132.900.000		132.900.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Pelaku Usaha Di Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi Sesuai Kewenangannya	Persentase Penanganan Pelanggaran Pelaku Usaha Di Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi Sesuai Kewenangannya ****	%	90	90	44.300.000	90	44.300.000	90	44.300.000	90	44.300.000	90	44.300.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
		Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi *****						44.300.000		44.300.000		44.300.000		44.300.000		44.300.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi *****	Pelaku Usaha	19	15	44.300.000	20	44.300.000	20	44.300.000	20	44.300.000	20	44.300.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	JAWA TENGAH
			Meningkatnya Pelaku Usaha Sektor Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi Sesuai Kewenangannya Yang Mengetahui Peraturan Perundangan Sektor KP	Jumlah pelaku usaha sektor Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP ****	Orang	90	180	88.600.000	180	88.600.000	180	88.600.000	180	88.600.000	180	88.600.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi *****						44.300.000		44.300.000		44.300.000		44.300.000		44.300.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
			Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi *****	Pelaku Usaha	6	10	44.300.000	10	44.300.000	15	44.300.000	15	44.300.000	20	44.300.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	JAWA TENGAH
		Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi *****						44.300.000		44.300.000		44.300.000		44.300.000		44.300.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi *****	Pelaku Usaha	5	10	44.300.000	10	44.300.000	15	44.300.000	15	44.300.000	20	44.300.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	JAWA TENGAH
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN ***						1.507.527.000		1.207.527.000		1.207.527.000		1.207.527.000		1.507.527.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
			Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan ***	kg/kapita/ta hun	40	18	1.507.527.000	18	1.207.527.000	19	1.207.527.000	19	1.207.527.000	19	1.507.527.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi ****						125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggunjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Produk Olahan Ikan yang Dihasilkan oleh Unit Pengolahan Ikan Meliputi : Pengalengan, Pembekuan, Penggaraman/Pengeringan, Pemindangan, Pengasapan, Peragian/Fermentasi, Pereduksian, Pelumatan Daging, Pengolahan Ikan Segar, Pengolahan Ikan lainnya di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah	Jumlah Produk Olahan Ikan ****	Ton	299.839	161.604	125.000.000	162.412	125.000.000	163.224	125.000.000	164.040	125.000.000	164.860	125.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi *****						125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
			Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko *****	Dokumen	1	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar *****						1.344.527.000		1.044.527.000		1.044.527.000		1.044.527.000		1.344.527.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			SDM Dan Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Kegiatan (Bazar, Gemarikan, Lomba Masak Ikan, Jejaring Pemasaran, Pembinaan Mutu Kepada Pelaku Usaha Perikanan, Diversifikasi Olahan Produk Perikanan, Business Matching/Kemitraan, Akses Permodalan/Pembiayaan, Peningkatan Kelembagaan, Mendukung IPRO Pengembangan Investasi Sektor Kelautan Dan Perikanan, Sarpras)	Jumlah SDM dan Pelaku Usaha yang Difasilitasi Kegiatan ****	Orang	3.500	2.000	1.344.527.000	2.000	1.044.527.000	2.000	1.044.527.000	2.000	1.044.527.000	2.000	1.344.527.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing *****						1.344.527.000		1.044.527.000		1.044.527.000		1.044.527.000		1.344.527.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing *****	Kegiatan	10	10	1.344.527.000	10	1.044.527.000	10	1.044.527.000	10	1.044.527.000	10	1.344.527.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi *****						38.000.000		38.000.000		38.000.000		38.000.000		38.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Kegiatan Yang Difasilitasi Untuk Memperoleh Kontinuitas Bahan Baku Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Ikan; Dan Distrbusi Produk Perikanan	Fasilitasi kegiatan kontinuitas bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan; dan distrbusi produk perikanan ****	Kegiatan	1	1	38.000.000	1	38.000.000	1	38.000.000	1	38.000.000	1	38.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku *****						38.000.000		38.000.000		38.000.000		38.000.000		38.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
			Meningkatnya ketersediaan bahan baku untuk konsumsi dan usaha pengolahan ikan	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan *****	Ton	472.223	981.000	38.000.000	985.000	38.000.000	989.000	38.000.000	993.000	38.000.000	997.000	38.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN ***						879.583.000		879.583.000		879.583.000		879.583.000		879.583.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Meningkatnya dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan ***	%	4	4	879.583.000	4	879.583.000	4	879.583.000	4	879.583.000	4	879.583.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi ****						175.919.000		175.919.000		175.919.000		175.919.000		175.919.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan Yang difasilitasi kelayakan mutunya	Jumlah Unit Pengolahan Ikan Yang difasilitasi kelayakan mutunya ****	Unit	88	85	175.919.000	90	175.919.000	95	175.919.000	100	175.919.000	105	175.919.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko *****						175.919.000		175.919.000		175.919.000		175.919.000		175.919.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Terlaksananya verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko *****	Rekomenda si	100	105	175.919.000	110	175.919.000	115	175.919.000	120	175.919.000	125	175.919.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar *****						703.664.000		703.664.000		703.664.000		703.664.000		703.664.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan berdasarkan laporan hasil pengujian produk hasil perikanan	Jumlah Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan *****	Dokumen	904	550	703.664.000	600	703.664.000	650	703.664.000	700	703.664.000	750	703.664.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
		Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing *****						703.664.000		703.664.000		703.664.000		703.664.000		703.664.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing *****	Kegiatan	80	575	703.664.000	625	703.664.000	675	703.664.000	725	703.664.000	775	703.664.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A
				Produksi Garam **	Ton	629.953	541.776	846.289.000	544.458	846.289.000	547.140	846.289.000	549.822	846.289.000	552.504	1.046.289.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ***						846.289.000		846.289.000		846.289.000		846.289.000		1.046.289.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Luas Lahan Garam Rakyat dan Lahan Kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang Difasilitasi Teknologi	Persentase luas lahan garam rakyat dan lahan kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang difasilitasi teknologi ***	%	49	50	846.289.000	51	846.289.000	51	846.289.000	52	846.289.000	53	1.046.289.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ****						846.289.000		846.289.000		846.289.000		846.289.000		1.046.289.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
			Meningkatnya Masyarakat Pesisir Yang Mendapatkan Pelatihan, Pembinaan Serta Mendapatkan Bantuan Sarpras Usaha	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan ****	Kelompok	5	10	279.321.000	10	279.321.000	10	279.321.000	10	279.321.000	10	479.321.000	Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil *****						279.321.000		279.321.000		279.321.000		279.321.000		479.321.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya *****	Orang	90	120	279.321.000	120	279.321.000	120	279.321.000	120	279.321.000	120	479.321.000	Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil JAWA TENGAH
			Meningkatnya Kelompok Usaha Garam (KUGAR) yang Menerapkan Teknologi Produksi Garam	Jumlah Kelompok Usaha Garam (KUGAR) yang meningkat teknologinya ****	Kelompok	55	10	566.968.000	11	566.968.000	12	566.968.000	13	566.968.000	14	566.968.000	Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman *****						566.968.000		566.968.000		566.968.000		566.968.000		566.968.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
			Tersedianya Sarana Usaha Pergaraman	Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia *****	Unit	8	10	566.968.000	11	566.968.000	12	566.968.000	13	566.968.000	14	566.968.000	Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkat kan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegrit as dan Dinamis di Dinas Kelautan dan Perikanan *								58.963.885.500		59.075.925.500		59.961.009.500		66.075.925.500		93.802.823.500	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan *	Angka	82	84		85		86		89		90		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan **							58.063.885.500		58.175.925.500		59.061.009.500		65.175.925.500		92.902.823.500	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan **	Angka	83	85	58.063.885.500	86	58.175.925.500	87	59.061.009.500	88	65.175.925.500	89	92.902.823.500	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						54.066.032.000		54.178.072.000		55.063.156.000		61.178.072.000		88.904.970.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan ***	%	100	100	54.066.032.000	100	54.178.072.000	100	55.063.156.000	100	61.178.072.000	100	88.904.970.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****						48.963.672.000		48.963.672.000		48.963.672.000		48.963.672.000		48.963.672.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	1	1	48.963.672.000	1	48.963.672.000	1	48.963.672.000	1	48.963.672.000	1	48.963.672.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****						47.893.672.000		47.893.672.000		47.893.672.000		47.893.672.000		47.893.672.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bula n	N/A	252	47.893.672.000	252	47.893.672.000	252	47.893.672.000	252	47.893.672.000	252	47.893.672.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****						150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	N/A	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****						920.000.000		920.000.000		920.000.000		920.000.000		920.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****	Laporan	N/A	1	920.000.000	1	920.000.000	1	920.000.000	1	920.000.000	1	920.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *****						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *****	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *****						200.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *****	%	100	100	200.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****						0		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	N/A	252	0	252	150.000.000	252	150.000.000	252	150.000.000	252	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****						150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****	Dokumen	N/A	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****						40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	N/A	30	40.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah *****						734.400.000		759.400.000		759.400.000		759.400.000		759.400.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *****	%	100	100	734.400.000	100	759.400.000	100	759.400.000	100	759.400.000	100	759.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						90.600.000		90.600.000		90.600.000		90.600.000		90.600.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	90.600.000	1	90.600.000	1	90.600.000	1	90.600.000	1	90.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****						106.800.000		106.800.000		106.800.000		106.800.000		106.800.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	106.800.000	1	106.800.000	1	106.800.000	1	106.800.000	1	106.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****						0		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	1	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****						15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	N/A	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *****						1.387.960.000		1.250.000.000		2.135.084.000		8.250.000.000		35.976.898.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *****	Unit	1	1	1.387.960.000	1	1.250.000.000	1	2.135.084.000	1	8.250.000.000	1	35.976.898.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						0		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	0	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Pengadaan Alat Besar *****						0		0		0		7.000.000.000		0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	0	N/A	0	N/A	0	N/A	7.000.000.000	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Pengadaan Mebel *****						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						100.000.000		100.000.000		98.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	100.000.000	1	100.000.000	1	98.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						1.187.960.000		500.000.000		1.387.084.000		500.000.000		35.226.898.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	1.187.960.000	1	500.000.000	1	1.387.084.000	1	500.000.000	1	35.226.898.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	0	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *****						1.655.000.000		1.655.000.000		1.655.000.000		1.655.000.000		1.655.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *****	Laporan	1	1	1.655.000.000	1	1.655.000.000	1	1.655.000.000	1	1.655.000.000	1	1.655.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						1.250.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	1.250.000.000	12	1.250.000.000	12	1.250.000.000	12	1.250.000.000	12	1.250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *****						1.025.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1.025.000.000	1	1.100.000.000	1	1.100.000.000	1	1.100.000.000	1	1.100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						295.000.000		295.000.000		295.000.000		295.000.000		295.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	1	295.000.000	1	295.000.000	1	295.000.000	1	295.000.000	1	295.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Pemeliharaan Mebel *****						0		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****						0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi *****	Unit	N/A	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						154.900.000		154.900.000		154.900.000		154.900.000		154.900.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong ***	%	100	100	154.900.000	100	154.900.000	100	154.900.000	100	154.900.000	100	154.900.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						30.050.000		30.050.000		30.050.000		30.050.000		30.050.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	30.050.000	100	30.050.000	100	30.050.000	100	30.050.000	100	30.050.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi PEM ALANG
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi PEM ALANG

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						6.550.000		6.550.000		6.550.000		6.550.000		6.550.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	6.550.000	12	6.550.000	12	6.550.000	12	6.550.000	12	6.550.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi PEM ALANG
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *****						42.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *****	Laporan	12	12	42.000.000	12	42.000.000	12	42.000.000	12	42.000.000	12	42.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	12	2.000.000	121	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi PEM ALANG

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						82.850.000		82.850.000		82.850.000		82.850.000		82.850.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	82.850.000	1	82.850.000	1	82.850.000	1	82.850.000	1	82.850.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						23.850.000		23.850.000		23.850.000		23.850.000		23.850.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	1	23.850.000	1	23.850.000	1	23.850.000	1	23.850.000	1	23.850.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi PEM ALANG

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi PEM ALANG
		Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi *****	Unit	N/A	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi PEM ALANG

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						106.500.000		106.500.000		106.500.000		106.500.000		106.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto ***	%	100	100	106.500.000	100	106.500.000	100	106.500.000	100	106.500.000	100	106.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						1.850.000		1.850.000		1.850.000		1.850.000		1.850.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	1.850.000	1	1.850.000	1	1.850.000	1	1.850.000	1	1.850.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	KOTA PEKALONGAN >OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*****						7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	KOTA PEKALONGAN >OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						8.650.000		8.650.000		8.650.000		8.650.000		8.650.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	8.650.000	12	8.650.000	12	8.650.000	12	8.650.000	12	8.650.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi PEKA LONGAN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *****						31.000.000		31.000.000		31.000.000		31.000.000		31.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *****	Laporan	12	12	31.000.000	12	31.000.000	12	31.000.000	12	31.000.000	12	31.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	KOTA PEKALONGAN >OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	KOTA PEKALONGAN >OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						57.500.000		57.500.000		57.500.000		57.500.000		57.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	57.500.000	1	57.500.000	1	57.500.000	1	57.500.000	1	57.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						25.500.000		25.500.000		25.500.000		25.500.000		25.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	25.500.000	1	25.500.000	1	25.500.000	1	25.500.000	1	25.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi PEKA LONGAN

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi PEKA LONGAN
		Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi *****	Unit	1	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi PEKA LONGAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						240.922.000		240.922.000		240.922.000		240.922.000		240.922.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Kliidanglor Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor ***	%	100	100	240.922.000	100	240.922.000	100	240.922.000	100	240.922.000	100	240.922.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						77.000.000		77.000.000		77.000.000		77.000.000		77.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	77.000.000	100	77.000.000	100	77.000.000	100	77.000.000	100	77.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *****						42.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	42.000.000	12	42.000.000	12	42.000.000	12	42.000.000	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****						1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****	Laporan	12	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****						40.500.000		40.500.000		40.500.000		40.500.000		40.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan ****	Laporan	12	12	40.500.000	12	40.500.000	12	40.500.000	12	40.500.000	12	40.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						121.922.000		121.922.000		121.922.000		121.922.000		121.922.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	121.922.000	1	121.922.000	1	121.922.000	1	121.922.000	1	121.922.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						6.922.000		6.922.000		6.922.000		6.922.000		6.922.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	6.922.000	1	6.922.000	1	6.922.000	1	6.922.000	1	6.922.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG OPD Provinsi
		Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi *****	Unit	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						128.400.000		128.400.000		128.400.000		128.400.000		128.400.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang ***	%	100	100	128.400.000	100	128.400.000	100	128.400.000	100	128.400.000	100	128.400.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *****						50.400.000		50.400.000		50.400.000		50.400.000		50.400.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	50.400.000	12	50.400.000	12	50.400.000	12	50.400.000	12	50.400.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****						6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****	Laporan	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****						44.400.000		44.400.000		44.400.000		44.400.000		44.400.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan ****	Laporan	12	12	44.400.000	12	44.400.000	12	44.400.000	12	44.400.000	12	44.400.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL OPD Provinsi
		Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi *****	Unit	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						144.950.000		144.950.000		144.950.000		144.950.000		144.950.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak ***	%	100	100	144.950.000	100	144.950.000	100	144.950.000	100	144.950.000	100	144.950.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						53.200.000		53.200.000		53.200.000		53.200.000		53.200.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	53.200.000	12	53.200.000	12	53.200.000	12	53.200.000	12	53.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						3.200.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	12	3.200.000	12	3.200.000	12	3.200.000	12	3.200.000	12	3.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						46.750.000		46.750.000		46.750.000		46.750.000		46.750.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	46.750.000	1	46.750.000	1	46.750.000	1	46.750.000	1	46.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						21.750.000		21.750.000		21.750.000		21.750.000		21.750.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	1	21.750.000	1	21.750.000	1	21.750.000	1	21.750.000	1	21.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK OPD Provinsi
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi *****	Unit	N/A	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						190.500.000		190.500.000		190.500.000		190.500.000		190.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa ***	%	100	100	190.500.000	100	190.500.000	100	190.500.000	100	190.500.000	100	190.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						18.500.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	18.500.000	100	18.500.000	100	18.500.000	100	18.500.000	100	18.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						119.200.000		119.200.000		119.200.000		119.200.000		119.200.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	119.200.000	12	119.200.000	12	119.200.000	12	119.200.000	12	119.200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						1.600.000		1.600.000		1.600.000		1.600.000		1.600.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	12	1.600.000	12	1.600.000	12	1.600.000	12	1.600.000	12	1.600.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						117.600.000		117.600.000		117.600.000		117.600.000		117.600.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	117.600.000	12	117.600.000	12	117.600.000	12	117.600.000	12	117.600.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						52.800.000		52.800.000		52.800.000		52.800.000		52.800.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	52.800.000	1	52.800.000	1	52.800.000	1	52.800.000	1	52.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						22.100.000		22.100.000		22.100.000		22.100.000		22.100.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	1	22.100.000	1	22.100.000	1	22.100.000	1	22.100.000	1	22.100.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA OPD Provinsi
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	5.700.000	1	5.700.000	1	5.700.000	1	5.700.000	1	5.700.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi *****	Unit	N/A	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						119.430.000		119.430.000		119.430.000		119.430.000		119.430.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan ***	%	100	100	119.430.000	100	119.430.000	100	119.430.000	100	119.430.000	100	119.430.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggunjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Administrasi Umum Perangkat Daerah *****						24.910.000		24.910.000		24.910.000		24.910.000		24.910.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *****	%	100	100	24.910.000	100	24.910.000	100	24.910.000	100	24.910.000	100	24.910.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						3.250.000		3.250.000		3.250.000		3.250.000		3.250.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	3.250.000	1	3.250.000	1	3.250.000	1	3.250.000	1	3.250.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi TEG AL
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						15.900.000		15.900.000		15.900.000		15.900.000		15.900.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	15.900.000	1	15.900.000	1	15.900.000	1	15.900.000	1	15.900.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi TEG AL
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						5.760.000		5.760.000		5.760.000		5.760.000		5.760.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	5.760.000	1	5.760.000	1	5.760.000	1	5.760.000	1	5.760.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi TEG AL
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *****						43.080.000		43.080.000		43.080.000		43.080.000		43.080.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *****	Laporan	12	12	43.080.000	12	43.080.000	12	43.080.000	12	43.080.000	12	43.080.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						2.280.000		2.280.000		2.280.000		2.280.000		2.280.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	2.280.000	12	2.280.000	12	2.280.000	12	2.280.000	12	2.280.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi TEG AL
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						40.800.000		40.800.000		40.800.000		40.800.000		40.800.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	40.800.000	12	40.800.000	12	40.800.000	12	40.800.000	12	40.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi TEG AL
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *****						51.440.000		51.440.000		51.440.000		51.440.000		51.440.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	51.440.000	1	51.440.000	1	51.440.000	1	51.440.000	1	51.440.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						28.190.000		28.190.000		28.190.000		28.190.000		28.190.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	28.190.000	1	28.190.000	1	28.190.000	1	28.190.000	1	28.190.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi TEGAL
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						2.750.000		2.750.000		2.750.000		2.750.000		2.750.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	2.750.000	1	2.750.000	1	2.750.000	1	2.750.000	1	2.750.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi TEGAL
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						20.500.000		20.500.000		20.500.000		20.500.000		20.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	20.500.000	1	20.500.000	1	20.500.000	1	20.500.000	1	20.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi TEGAL
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						134.506.000		134.506.000		134.506.000		134.506.000		134.506.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan ***	%	100	100	134.506.000	100	134.506.000	100	134.506.000	100	134.506.000	100	134.506.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						55.006.000		55.006.000		55.006.000		55.006.000		55.006.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	55.006.000	100	55.006.000	100	55.006.000	100	55.006.000	100	55.006.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						42.546.000		42.546.000		42.546.000		42.546.000		42.546.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	42.546.000	1	42.546.000	1	42.546.000	1	42.546.000	1	42.546.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						11.960.000		11.960.000		11.960.000		11.960.000		11.960.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	11.960.000	12	11.960.000	12	11.960.000	12	11.960.000	12	11.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *****						34.500.000		34.500.000		34.500.000		34.500.000		34.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *****	Laporan	12	12	34.500.000	12	34.500.000	12	34.500.000	12	34.500.000	12	34.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						34.000.000		34.000.000		34.000.000		34.000.000		34.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	34.000.000	12	34.000.000	12	34.000.000	12	34.000.000	12	34.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur ***	%	100	100	190.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Administrasi Umum Perangkat Daerah *****						110.500.000		110.500.000		110.500.000		110.500.000		110.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *****	%	100	100	110.500.000	100	110.500.000	100	110.500.000	100	110.500.000	100	110.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						86.580.000		86.580.000		86.580.000		86.580.000		86.580.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	86.580.000	1	86.580.000	1	86.580.000	1	86.580.000	1	86.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						20.920.000		20.920.000		20.920.000		20.920.000		20.920.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	20.920.000	12	20.920.000	12	20.920.000	12	20.920.000	12	20.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *****						35.200.000		35.200.000		35.200.000		35.200.000		35.200.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *****	Laporan	12	12	35.200.000	12	35.200.000	12	35.200.000	12	35.200.000	12	35.200.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						34.200.000		34.200.000		34.200.000		34.200.000		34.200.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	34.200.000	12	34.200.000	12	34.200.000	12	34.200.000	12	34.200.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *****						44.300.000		44.300.000		44.300.000		44.300.000		44.300.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	44.300.000	1	44.300.000	1	44.300.000	1	44.300.000	1	44.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****						23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya ****	Unit	1	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****						4.300.000		4.300.000		4.300.000		4.300.000		4.300.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	4.300.000	1	4.300.000	1	4.300.000	1	4.300.000	1	4.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
		Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi *****	Unit	1	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						193.973.000		193.973.000		193.973.000		193.973.000		193.973.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat ***	%	100	100	193.973.000	100	193.973.000	100	193.973.000	100	193.973.000	100	193.973.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						62.500.000		62.500.000		62.500.000		62.500.000		62.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	62.500.000	100	62.500.000	100	62.500.000	100	62.500.000	100	62.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi TEG AL

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						32.500.000		32.500.000		32.500.000		32.500.000		32.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	32.500.000	1	32.500.000	1	32.500.000	1	32.500.000	1	32.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi TEGAL
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						27.600.000		27.600.000		27.600.000		27.600.000		27.600.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	1	27.600.000	1	27.600.000	1	27.600.000	1	27.600.000	1	27.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *****						41.200.000		41.200.000		41.200.000		41.200.000		41.200.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	41.200.000	12	41.200.000	12	41.200.000	12	41.200.000	12	41.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi TEGAL
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						38.200.000		38.200.000		38.200.000		38.200.000		38.200.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	38.200.000	12	38.200.000	12	38.200.000	12	38.200.000	12	38.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi TEGAL

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						90.273.000		90.273.000		90.273.000		90.273.000		90.273.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	90.273.000	1	90.273.000	1	90.273.000	1	90.273.000	1	90.273.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						27.273.000		27.273.000		27.273.000		27.273.000		27.273.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	1	27.273.000	1	27.273.000	1	27.273.000	1	27.273.000	1	27.273.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi TEG AL

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi TEGAL
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi TEGAL
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						372.180.000		372.180.000		372.180.000		372.180.000		372.180.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari ***	%	100	100	372.180.000	100	372.180.000	100	372.180.000	100	372.180.000	100	372.180.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						46.000.000		46.000.000		46.000.000		46.000.000		46.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	46.000.000	100	46.000.000	100	46.000.000	100	46.000.000	100	46.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						211.180.000		211.180.000		211.180.000		211.180.000		211.180.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	211.180.000	12	211.180.000	12	211.180.000	12	211.180.000	12	211.180.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						2.700.000		2.700.000		2.700.000		2.700.000		2.700.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	2.700.000	12	2.700.000	12	2.700.000	12	2.700.000	12	2.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						208.480.000		208.480.000		208.480.000		208.480.000		208.480.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	208.480.000	12	208.480.000	12	208.480.000	12	208.480.000	12	208.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						115.000.000		115.000.000		115.000.000		115.000.000		115.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						43.000.000		43.000.000		43.000.000		43.000.000		43.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	43.000.000	1	43.000.000	1	43.000.000	1	43.000.000	1	43.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL OPD Provinsi
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi *****	Unit	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						164.240.000		164.240.000		164.240.000		164.240.000		164.240.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Juwana	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Juwana ***	%	100	100	164.240.000	100	164.240.000	100	164.240.000	100	164.240.000	100	164.240.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Administrasi Umum Perangkat Daerah *****						28.740.000		28.740.000		28.740.000		28.740.000		28.740.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *****	%	100	100	28.740.000	100	28.740.000	100	28.740.000	100	28.740.000	100	28.740.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						19.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	19.000.000	1	19.000.000	1	19.000.000	1	19.000.000	1	19.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						6.740.000		6.740.000		6.740.000		6.740.000		6.740.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	6.740.000	12	6.740.000	12	6.740.000	12	6.740.000	12	6.740.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						64.100.000		64.100.000		64.100.000		64.100.000		64.100.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	64.100.000	12	64.100.000	12	64.100.000	12	64.100.000	12	64.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						61.100.000		61.100.000		61.100.000		61.100.000		61.100.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	61.100.000	12	61.100.000	12	61.100.000	12	61.100.000	12	61.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *****						71.400.000		71.400.000		71.400.000		71.400.000		71.400.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	71.400.000	1	71.400.000	1	71.400.000	1	71.400.000	1	71.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						31.400.000		31.400.000		31.400.000		31.400.000		31.400.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	31.400.000	1	31.400.000	1	31.400.000	1	31.400.000	1	31.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi *****	Unit	N/A	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						571.433.000		571.433.000		571.433.000		571.433.000		571.433.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung ***	%	100	100	571.433.000	100	571.433.000	100	571.433.000	1.001	571.433.000	100	571.433.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						107.000.000		107.000.000		107.000.000		107.000.000		107.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	107.000.000	100	107.000.000	100	107.000.000	100	107.000.000	100	107.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						57.000.000		57.000.000		57.000.000		57.000.000		57.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	57.000.000	1	57.000.000	1	57.000.000	1	57.000.000	1	57.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						284.433.000		284.433.000		284.433.000		284.433.000		284.433.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	284.433.000	12	284.433.000	12	284.433.000	12	284.433.000	12	284.433.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						2.433.000		2.433.000		2.433.000		2.433.000		2.433.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	2.433.000	12	2.433.000	12	2.433.000	12	2.433.000	12	2.433.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						282.000.000		282.000.000		282.000.000		282.000.000		282.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	282.000.000	12	282.000.000	12	282.000.000	12	282.000.000	12	282.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi *****	Unit	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						164.064.500		164.064.500		164.064.500		164.064.500		164.064.500	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Logending ***	%	100	100	164.064.500	100	164.064.500	100	164.064.500	100	164.064.500	100	164.064.500	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						37.064.500		37.064.500		37.064.500		37.064.500		37.064.500	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	37.064.500	100	37.064.500	100	37.064.500	100	37.064.500	100	37.064.500	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						7.551.500		7.551.500		7.551.500		7.551.500		7.551.500	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	7.551.500	1	7.551.500	1	7.551.500	1	7.551.500	1	7.551.500	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OP D Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						6.413.000		6.413.000		6.413.000		6.413.000		6.413.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	6.413.000	1	6.413.000	1	6.413.000	1	6.413.000	1	6.413.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OP D Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						23.100.000		23.100.000		23.100.000		23.100.000		23.100.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	23.100.000	12	23.100.000	12	23.100.000	12	23.100.000	12	23.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OP D Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						66.800.000		66.800.000		66.800.000		66.800.000		66.800.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	66.800.000	12	66.800.000	12	66.800.000	12	66.800.000	12	66.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OP D Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						64.800.000		64.800.000		64.800.000		64.800.000		64.800.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	64.800.000	12	64.800.000	12	64.800.000	12	64.800.000	12	64.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OP D Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *****						60.200.000		60.200.000		60.200.000		60.200.000		60.200.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	60.200.000	1	60.200.000	1	60.200.000	1	60.200.000	1	60.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OP D Provinsi
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						10.200.000		10.200.000		10.200.000		10.200.000		10.200.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	10.200.000	1	10.200.000	1	10.200.000	1	10.200.000	1	10.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OP D Provinsi
		Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi *****	Unit	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OP D Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						480.355.000		480.355.000		480.355.000		480.355.000		480.355.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan ***	%	100	100	480.355.000	100	480.355.000	100	480.355.000	100	480.355.000	100	480.355.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						42.105.000		42.105.000		42.105.000		42.105.000		42.105.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	42.105.000	100	42.105.000	100	42.105.000	100	42.105.000	100	42.105.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						6.405.000		6.405.000		6.405.000		6.405.000		6.405.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	6.405.000	1	6.405.000	1	6.405.000	1	6.405.000	1	6.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						25.700.000		25.700.000		25.700.000		25.700.000		25.700.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	25.700.000	1	25.700.000	1	25.700.000	1	25.700.000	1	25.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						313.300.000		313.300.000		313.300.000		313.300.000		313.300.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	313.300.000	12	313.300.000	12	313.300.000	12	313.300.000	12	313.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						3.300.000		3.300.000		3.300.000		3.300.000		3.300.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	12	3.300.000	12	3.300.000	12	3.300.000	12	3.300.000	12	3.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	310.000.000	12	310.000.000	12	310.000.000	12	310.000.000	12	310.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						124.950.000		124.950.000		124.950.000		124.950.000		124.950.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	124.950.000	1	124.950.000	1	124.950.000	1	124.950.000	1	124.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						31.950.000		31.950.000		31.950.000		31.950.000		31.950.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	1	31.950.000	1	31.950.000	1	31.950.000	1	31.950.000	1	31.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi *****	Unit	N/A	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						641.500.000		641.500.000		641.500.000		641.500.000		641.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Perikanan Budidaya	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Perikanan Budidaya ***	%	100	100	641.500.000	100	641.500.000	100	641.500.000	100	641.500.000	100	641.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	26.000.000	100	26.000.000	100	26.000.000	100	26.000.000	100	26.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *****						508.500.000		508.500.000		508.500.000		508.500.000		508.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	508.500.000	12	508.500.000	12	508.500.000	12	508.500.000	12	508.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						505.000.000		505.000.000		505.000.000		505.000.000		505.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	505.000.000	12	505.000.000	12	505.000.000	12	505.000.000	12	505.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						107.000.000		107.000.000		107.000.000		107.000.000		107.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	107.000.000	1	107.000.000	1	107.000.000	1	107.000.000	1	107.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A
		Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi *****	Unit	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A
	Meningkat nya Kualitas Pengelolaa n Risiko Perangkat Daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan **							900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan **	Angka	3	3	900.000.000	3	900.000.000	3	900.000.000	3	900.000.000	4	900.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan ***	%	100	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****						900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *****	%	100	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****						400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	100	5	400.000.000	5	400.000.000	5	400.000.000	5	400.000.000	5	400.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****						450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	N/A	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****						27.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	180	180	27.000.000	180	27.000.000	180	27.000.000	180	27.000.000	180	27.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****						23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****	Dokumen	1	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkat kan Pertumbu han PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan (IKLH) *								2.511.067.000		1.511.067.000		1.511.067.000		1.511.067.000		1.511.067.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Persentase Luasan Mangrove Yang Berkualitas Baik *	%	N/A	67		67		67		67		68		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkat nya Luasan Mangrove yang Direhabilit asi **							2.511.067.000		1.511.067.000		1.511.067.000		1.511.067.000		1.511.067.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Persentase Luasan Mangrove yang Direhabilitasi **	%	1	1	2.511.067.000	1	1.511.067.000	1	1.511.067.000	1	1.511.067.000	1	1.511.067.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ***						397.839.000		397.839.000		397.839.000		397.839.000		397.839.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Luas Kawasan Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan ***	%	N/A	0	397.839.000	0	397.839.000	0	397.839.000	0	397.839.000	1	397.839.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi ****						397.839.000		397.839.000		397.839.000		397.839.000		397.839.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi di Wilayah Kerja CDK Selatan	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola ****	Kawasan	N/A	1	397.839.000	1	397.839.000	1	397.839.000	1	397.839.000	1	397.839.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	
		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat *****						76.002.000		76.002.000		76.002.000		76.002.000		76.002.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola *****	Ha	N/A	289	76.002.000	289	76.002.000	289	76.002.000	289	76.002.000	289	76.002.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
		Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil *****						321.837.000		321.837.000		321.837.000		321.837.000		321.837.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi *****	Ha	242	2	321.837.000	3	321.837.000	3	321.837.000	3	321.837.000	4	321.837.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ***						1.545.670.000		545.670.000		545.670.000		545.670.000		545.670.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Luas Kawasan Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur ***	%	N/A	0	1.545.670.000	0	545.670.000	0	545.670.000	0	545.670.000	1	545.670.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi ****						1.545.670.000		545.670.000		545.670.000		545.670.000		545.670.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi di Wilayah Kerja CDK Timur	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola ****	Kawasan	2	3	1.545.670.000	3	545.670.000	3	545.670.000	3	545.670.000	3	545.670.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	
		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat *****						1.061.173.000		61.173.000		61.173.000		61.173.000		61.173.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola *****	Ha	77.278	773	1.061.173.000	773	61.173.000	773	61.173.000	773	61.173.000	773	61.173.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
		Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil *****						484.497.000		484.497.000		484.497.000		484.497.000		484.497.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi *****	Ha	2	2	484.497.000	3	484.497.000	3	484.497.000	3	484.497.000	4	484.497.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ***						567.558.000		567.558.000		567.558.000		567.558.000		567.558.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Luas Kawasan Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat ***	%	N/A	0	567.558.000	0	567.558.000	0	567.558.000	0	567.558.000	0	567.558.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi ****						567.558.000		567.558.000		567.558.000		567.558.000		567.558.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi di Wilayah Kerja CDK Barat	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola ****	Kawasan	2	2	567.558.000	2	567.558.000	2	567.558.000	2	567.558.000	2	567.558.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	
		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat *****						367.558.000		367.558.000		367.558.000		367.558.000		367.558.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola *****	Ha	4.254	4.254	367.558.000	4.254	367.558.000	4.254	367.558.000	4.254	367.558.000	4.254	367.558.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
		Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil *****						200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi *****	Ha	2	2	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	4	200.000.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A

Tabel 4.2
Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Daerah Tahun 2025-2029

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di kawasan industri	- Melakukan verifikasi lokasi dan kelengkapan dokumen pendirian SPBN - Penerbitan surat permohonan rekomendasi pendirian SPBN oleh JPEN	- Tersedianya SPBN BUMD JPEN	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap/Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil/Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
		Regulasi penyediaan pupuk bagi pembudidaya ikan	Tersedianya regulasi penyediaan pupuk bagi pembudidaya ikan target 1 Dokumen	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya/Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat/Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	Program asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida	Bantuan premi asuransi untuk nelayan skala kecil	Nelayan yang terlindungi asuransi jiwa 10.000 Orang	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap/Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil/Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
3	Normalisasi bantaran muara	- Pemeliharaan muara dan jetty di Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong, Kab. Pematang	Tersedianya sarana prasarana Pelabuhan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap/Penetapan Lokasi

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Subkegiatan
	untuk kapal tradisional	- Pemeliharaan muara dan jetty di Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang, Kab. Kendal - Pemeliharaan muara dan kolam Pelabuhan Perikanan Pantai Logending, Kab. Kebumen - Pemeliharaan kolam pelabuhan, muara, dan <i>levelling</i> kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto, Kab. Pekalongan - Pemeliharaan kolam Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor, Kab. Batang - Pemeliharaan kolam pelabuhan, muara pelabuhan, dan <i>levelling</i> kawasan di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak, Kab. Demak - Pemeliharaan kolam Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa, Kab. Jepara - Pemeliharaan kolam Sentra Pendaratan Ikan Banyutowo, Kab. Pati - Pemeliharaan muara, kolam, dan jetty Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan, Kab. Tegal - Pemeliharaan Kolam Pelabuhan PPP Bajomulyo - Pemeliharaan Kolam Pelabuhan, rehabilitasi breakwater, dan rehabilitasi drainase Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari - Pemeliharaan kolam dan pembangunan	Perikanan yang layak di 2 Pelabuhan Perikanan Nusantara, 9 Pelabuhan Perikanan Pantai, dan 3 Sentra Pendaratan Ikan	Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi/ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Subkegiatan
		breakwater Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung		
4	Penghapusan hutang petani, nelayan , UMKM	- Melakukan identifikasi debitur - Melakukan Proses Penghapusan Piutang sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah	Terselesainya Piutang TPI senilai Rp 4.105.302.718	-
5	Pemberdayaan masyarakat pesisir tambak ikan nila	- Revitalisasi Tambak Nila Salin di 5 Kabupaten Kota - Pengembangan pakan mandiri - Bantuan sarpras nila salin - Polikultur nila-udang - Bantuan Calon Induk dan Pakan Untuk Masyarakat - Bantuan sarpras pembudidayaan ikan tawar/ payau/ laut	- Meningkatnya produksi ikan, terutama nila salin - Tersedianya unit produksi pakan mandiri dengan target bantuan 5 Paket - Tersedianya tambak nila salin produktif hasil revitalisasi 50 Hektar	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya / Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat/Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
6	Penyediaan benih yang berkualitas	- Penyediaan Calon Induk dan Benih Calon Induk di Loka Loka PBI : Janti, Muntilan, Ngrajek, Ambarawa, Randudongkal, Singasari dan POS PBI Tambaksogra	Tersedianya sarana prasarana perbenihan yang layak untuk menghasilkan benih	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya/Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat/Penyediaan Sarana

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Subkegiatan
		- Penyediaan Benih Nila Salin di Loka Loka PBI : Janti, Muntilan, Ngrajek, Ambarawa, Randudongkal, Singasari, POS PBI Tambaksogra, Loka Maribaya dan Loka Tugu - Rehab Sarana dan Prasarana Loka PBI: Janti, Muntilan, Ngrajek, Ambarawa, Randudongkal, Singasari, POS PBI Tambaksogra, Loka Maribaya dan Loka Tugu	berkualitas dengan target 6.000.000 ekor benih/tahun	Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
7	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	- Pelatihan diversifikasi produk perikanan - Pelatihan manajemen keuangan	Meningkatnya kapasitas SDM dan literasi keuangan perempuan pesisir Target : 17 Kabupaten/Kota Pesisir, @Kab/Kota 50 Peserta.	- Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan/Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar/Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Subkegiatan
				- Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil/Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
8	Penanggulangan bencana dan keberlanjutan lingkungan melalui Mageri Segoro untuk mengamankan garis pantai	Rehabilitasi ekosistem mangrove	Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 300.000 bibit mangrove	- Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil/Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi/ Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
9	Pembelian hasil panen nelayan oleh BUMD (pelatihan penggunaan teknologi GPS pd nelayan, pelatihan petambak garam, penyuluhan)	Pelatihan penggunaan teknologi GPS pada nelayan (VMS)	Terfasilitasinya penggunaan VMS oleh kapal perikanan sebanyak 1000 Kapal	- Program Pengawasa Sumberdaya Kelautan dan Perikanan / Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 mil / Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Subkegiatan
	/pelatihan utk meningkatkan kualitas panen)	- Pelatihan petambak garam	- Meningkatnya kapasitas petambak garam sebanyak 150 orang	- Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil/Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		- Penyuluhan/pelatihan utk meningkatkan kualitas panen (Penilaian dan pembinaan Produsen Pakan Ikan Bersertifikat CPPIB, CPIB, serta Fasilitasi perizinan berusaha sektor perikanan budidaya)	Meningkatnya Kompetensi petambak 40 Orang	- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya/Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat/Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

4. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Pembangunan kelautan dan perikanan Jawa Tengah untuk mencapai tujuan Meningkatkan Pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan serta Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam pelaksanaannya tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan dan merupakan Indikator Utama Pembangunan (IUP). Adapun rincian IKU sebagaimana Tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal		Target Capaian						Kondisi Akhir
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	1,5	1	1	2	2,1	2,2	2,2	2,4	2,4
2	Persentase Luasan Mangrove Yang Berkualitas Baik	n/a	n/a	66,72	66,88	67,03	67,19	67,34	67,5	67,5
3	Produksi perikanan	940.018	968.353,80	952.717,50	954.029	969.649,90	985.589,40	1.001.857,10	1.018.462,80	4.929.588,2
4	Produksi Garam	595.984,41	629.952,95	539.293,69	541.775,75	544.457,81	547.139,84	549.821,93	552.503,98	2.735.699,31
5	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	81	82	83	84	85	86	89	90	90

Selain IKU perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja kunci (IKK) yang merupakan indikator penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ditampilkan dalam tabel 4.4

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Awal		Target Capaian						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase kawasan konservasi daerah yang operasional dengan	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Produksi perikanan tangkap	63,76	125,44	100	100	100	100	100	100	
3	Produksi perikanan budidaya	102,7	92,47	91,74	93,95	94	94,05	94,10	94,15	
4	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	70	70	70	71	73	74	75	75	

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan memperhatikan keselarasan kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 – 2045, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2045, dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 mencakup Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun anggaran pada kurun waktu lima tahun (tahun 2025 - 2029). Sasaran dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan setiap tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rangkaian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaannya dan apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain : 1) memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran rencana strategis; 2) mengupayakan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna sebesar-besarnya mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran Renstra; 3) mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.

Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan serta kualitas ekosistem kelautan dan perikanan, meningkatkan pangan biru, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan perikanan, meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem kelautan dan perikanan serta mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan di Jawa Tengah.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 2025-2029;
2. Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPT di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*Outcome*) Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 2025-2029;
3. Pejabat eselon IV, atau ketua Kelompok Kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*Ouput*) Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 2025-2029;
4. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang, Cabang Dinas dan UPT pada di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
5. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah;
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala, evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun;
7. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, sehingga memerlukan perbaikan atau revisi maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025- 2029 jika pada kesempatan yang sama RPJMD Provinsi Jawa Tengah dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah tahun 2025-2029 ini telah disusun sesuai perkembangan dinamika politik, sosial, budaya dan isu-isu permasalahan terkini, dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, implementasi penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kerja, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 ini juga dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, baik di jajaran struktural

maupun fungsional dalam melaksanakan kualitas pelayanan dasar dan tugas sehari-hari. Renstra juga tertuang tugas pokok dan sasaran pembangunan perikanan, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri, dan berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis serta dicapai hasil yang optimal, selaras, serasi, seimbang dan berkualitas sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

Akhir kata diharapkan peran serta masyarakat khususnya pelaku usaha perikanan dan perikanan maupun stakeholder terkait untuk secara bersama-sama mewujudkan Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju Berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045.

Semarang, September 2025

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Jawa Tengah



Endi Faiz Effendi, S.Pi., MA
Pembina Utama Muda
NIP. 197109091996031006